



BAB I

PENDAHULUAN

1.a. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Pemerintah Kabupaten Magelang adalah entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Tujuan laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Untuk memenuhi tujuan tersebut laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas pemerintah daerah.

Catatan atas Laporan Keuangan menguraikan berbagai hal yang dianggap penting yang telah mempengaruhi penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang sehingga Catatan atas Laporan Keuangan membantu pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan. Tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

1.b. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan pemerintah daerah. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;



- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 11) Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.

1.c. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika Catatan Atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
 - 1.a Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan;
 - 1.b Landasan hukum penyusunan laporan keuangan;
 - 1.c Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.
- Bab II Ekonomi Makro Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.a Ekonomi Makro;
 - 2.b Kebijakan Keuangan;
 - 2.c Indikator pencapaian target kinerja APBD
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.a Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan;
 - 3.b Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.a Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah;
 - 4.b Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - 4.c Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - 4.d Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
 - 5.a Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.b Penjelasan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.c Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - 5.d Penjelasan Laporan Operasional
 - 5.e Penjelasan Laporan Arus Kas



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

5.f Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

5.g Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VII Penjelasan Refokusing dan Realokasi Anggaran

Bab VIII Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.a. Ekonomi Makro

Kondisi ekonomi Kabupaten Magelang selama tahun 2020 mengalami laju pertumbuhan ekonomi sebesar -1,68%, turun bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 5,30%, sedangkan inflasi selama tahun 2020 adalah sebesar 1,56%, turun bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 2,12%. Menurut perhitungan, pada tahun 2020 penduduk Kabupaten Magelang memiliki PDRB per-kapita sebesar 24,94 juta rupiah. Adapun kontribusi masing-masing sektor pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2020 adalah sebagai berikut: sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang sebesar Rp6.914,81 milyar (21,30%), sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp1.511,36 milyar (4,65%), sektor industri pengolahan sebesar Rp7.264,81 milyar (22,38%), sektor pengadaan listrik dan gas menyumbang sebesar Rp16,60 milyar (0,05%), sektor pengadaan air, pengelolaan sampah sebesar Rp27,93 milyar (0,08%), sektor konstruksi sebesar Rp3.027,90 milyar (9,32%), sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi sebesar Rp4.306,14 milyar (13,27%), sektor transportasi dan pergudangan sebesar Rp847,59 milyar (2,61%), sektor penyediaan akomodasi dan minum sebesar Rp1.274,04 (3,93%), sektor informasi dan komunikasi sebesar Rp1.425,19 milyar (4,39%), sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar Rp913,54 milyar (2,81%), sektor *real estate* sebesar Rp608,64 milyar (1,88%), sektor jasa perusahaan sebesar Rp87,26 milyar (0,27%), sektor administrasi pemerintahan pertanahan dan jaminan sosial wajib sebesar Rp1.100,03 (3,39%), sektor jasa pendidikan sebesar Rp2.118,82 milyar (6,53%), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar Rp307,86 milyar (0,94%), sektor jasa lainnya sebesar Rp702,20 milyar (2,16%).

Data tingkat kemiskinan, angka pengangguran, data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta indeks Gini Kabupaten Magelang selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang mengalami penurunan pada tahun 2019 sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan. Data tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang selama 3 tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.1. Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Magelang selama 3 tahun terakhir

No	Tahun	Persentase (%)	Keterangan
1	2018	11,23	
2	2019	10,67	Turun 0,56% dari tahun sebelumnya
3	2020	11,27	Naik 0,60% dari tahun sebelumnya

2. Angka pengangguran di Kabupaten Magelang selama tiga tahun terakhir mengalami kenaikan. Data angka pengangguran di Kabupaten Magelang selama 3 tahun terakhir sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 2.2. Angka Pengangguran di Kabupaten Magelang selama 3 tahun terakhir

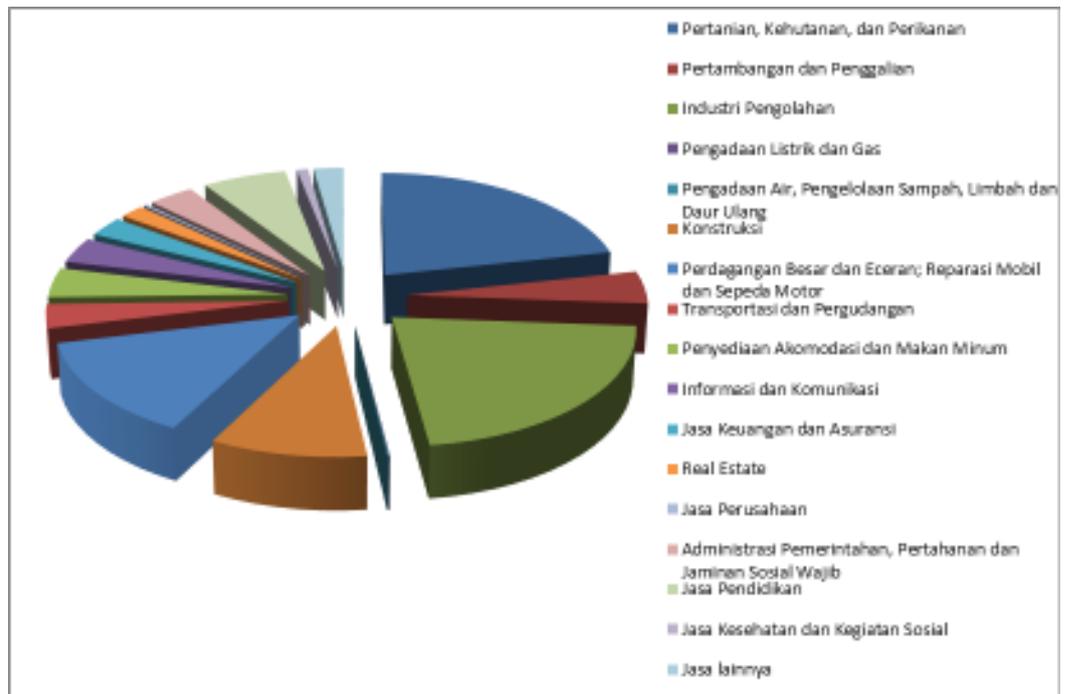
No	Tahun	Persentase (%)	Keterangan
1	2018	2,91	
2	2019	3,12	Naik 0,21% dari tahun sebelumnya
3	2020	4,27	Naik 1,15% dari tahun sebelumnya

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Magelang selama 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Magelang selama 3 tahun terakhir

No	Tahun	Persentase (%)	Keterangan
1	2018	69,11	
2	2019	69,87	Naik 0,76% dari tahun sebelumnya
3	2020	69,87	Sama dengan tahun sebelumnya

4. Indeks Gini Kabupaten Magelang selama 3 tahun terakhir hanya di tahun 2019 yang dapat menampilkan angka yaitu 0,344



Gambar 1. Kontribusi masing-masing sektor pada PDRB

2.b. Kebijakan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menimbulkan hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Hal ini menyebabkan perlunya pengelolaan keuangan daerah dalam sebuah sistem. Selain kedua hal tersebut, penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Tahun Anggaran 2019 menggunakan landasan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang



Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Nota Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Magelang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Magelang Tahun 2020 sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020.

Adapun penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Magelang Tahun 2020 berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 yang merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan APBD Tahun 2020. APBD Kabupaten Magelang Tahun 2020 dalam penyusunannya berpedoman pula pada Prioritas dan Plafon Anggaran yang merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Magelang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.

1) Arah Kebijakan Anggaran

Dalam sistem anggaran kinerja arah kebijakan anggaran merupakan instrumen perencanaan anggaran, disamping juga sebagai dasar untuk penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran.

2) Kebijakan Anggaran Pendapatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Pemerintah Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah terdiri atas :

- 1) Pendapatan Asli Daerah
- 2) Dana Perimbangan
- 3) Lain lain Pendapatan Daerah Yang sah

Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi serta menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor/impor.

Selain itu pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus selalu memperhatikan pada prinsip bahwa upaya peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Dalam APBD, pendapatan daerah merupakan elemen yang vital perannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat disamping perannya untuk menjaga kelangsungan fiskal daerah.



3) Kebijakan Anggaran Belanja

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Magelang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Kebijakan pengelolaan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi tanggung jawabnya dengan memperhatikan bahwa peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus terukur. Dalam pelaksanaan anggaran tetap memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran antara lain transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, efisiensi dan efektifitas anggaran.

4) Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

2.c. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Dalam pelaksanaan anggaran ada indikator pencapaian target kinerja yang ditetapkan, yaitu:

Tabel 2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja

No	Program	Indikator Program
1	2	3
I	Urusan Wajib	
a.	Pendidikan	
	– Program Pendidikan Anak Usia Dini	– Meningkatnya jumlah PAUD
	– Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	– APK SD/MI, SMP/MTs
	– Program Pendidikan Non Formal	– Meningkatnya pemberantasan buta aksara
	– Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	– Meningkatnya penetapan angka kredit jabatan guru
	– Program Pendidikan Tinggi	– Meningkatnya persentase penduduk yang menempuh pendidikan tinggi
	– Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	– Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan Karang Taruna/LPP
	– Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup	– Terlaksananya Pelatihan pemuda produktif bagi pemuda pengangguran
	– Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	– Terlaksananya sosialisasi bahaya narkoba



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Program	Indikator Program
1	2	3
b.	Kesehatan	
	– Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	– Ketersediaan obat sesuai kebutuhan dalam jumlah yang memadai
	– Program Upaya Kesehatan Masyarakat	– Jumlah Polindes yang meningkat
	– Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	– Meningkatnya prosentase pengembangan toga di masyarakat
	– Program Perbaikan Gizi Masyarakat	– Meningkatnya distribusi Kapsul Yodium, Vitamin A, Tablet Fe
	– Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	– Menurunnya jumlah kasus penyakit menular
	– Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	– Pelayanan kesehatan sesuai standar dan peraturan
	– Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	– Cakupan kunjungan masyarakat miskin
	– Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Rumah Sakit	– Rehabilitasi puskesmas, RSUD Muntian, Gudang farmasi, incenerator.
	– Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	– Kegiatan GSI berjalan lancar
	– Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita dan Lansia	– Terfasilitasinya kegiatan posyandu
	– Program Keluarga Berencana	– Meningkatnya peserta KB
c.	Pekerjaan Umum	
	– Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	– Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pedesaan
	– Program Pembangunan Saluran Drainase	– Terlaksananya pembangunan drainase gorong-gorong
	– Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	– Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan dan jembatan kabupaten
	– Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	– Terlaksananya pembangunan jalan kabupaten
	– Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	– Pembangunan SPAM
	– Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	– Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan
	– Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan	– Terpenuhi dan tertatanya jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
	– Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya	– Terpeliharanya sungai dan sumber daya lainnya
	– Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	– Melakukan pengawasan dan penyusunan regulasi di bidang pertambangan
	– Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan	– Terwujudnya penerapan zona tambang dan penertiban kegiatan penambangan
	– Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	– Terlayannya kebutuhan masyarakat di bidang ketenagalistrikan
d.	Perencanaan Pembangunan	
	– Program Perencanaan Pembangunan Daerah	– Tersusunnya Renja, RPTK, RKPD dan RPJMD – Terlaksananya Forum SKPD
	– Program Perencanaan Tata Ruang	– Tersedianya pedoman teknis untuk perijinan pemanfaatan ruang



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Program	Indikator Program
1	2	3
	– Program Kerjasama Pembangunan	– Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kerjasama pembangunan antar wilayah
	– Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	– Fasilitasi program perencanaan pembangunan ekonomi
e.	Perhubungan	
	– Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	– Meningkatnya jumlah angkutan darat – Meningkatnya PAD dari sektor parkir
	– Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas	– Terlaksananya kegiatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas
	– Program Pengembangan Sistem Manajemen Transportasi	– Terlaksananya Pengembangan Sistem Manajemen Transportasi
f.	Lingkungan Hidup	
	– Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	– Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan
	– Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	– Terkendalinya tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
	– Program Meningkatkan Perlindungan dan Konservasi SDA	– Program perlindungan dan konservasi SDA
	– Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup	– Cakupan pengembangan data dan informasi lingkungan
g.	Kependudukan dan Catatan Sipil	
	– Program Penataan Administrasi Kependudukan	– Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan di Kab. Magelang
	– Program Peningkatan Kualitas Manajemen Kependudukan	– Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan
h.	Sosial	
	– Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adapt (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	– Terwujudnya pemberdayaan fakir miskin, komunitas adapt (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
	– Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	– Terlayannya rehabilitasi kesejahteraan sosial
	– Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Eks Trauma	– Terbinanya para penyandang cacat
	– Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	– Terbinanya kelembagaan kesejahteraan sosial
i.	Tenaga Kerja	
	– Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	– Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja
	– Program Peningkatan Kesempatan Kerja	– Meningkatnya kesempatan kerja bagi angkatan kerja
	– Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	– Meningkatnya perlindungan dan pengembangan lembaga
j.	Koperasi dan usaha kecil menengah	
	– Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	– Tumbuhnya kemandirian dan kewirausahaan UMKM di 360 UMKM
	– Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	– Terwujudnya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Program	Indikator Program
1	2	3
	– Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	– Meningkatnya investasi dan PMAD
	– Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	– Meningkatnya kemampuan penerapan IPTEK pada sistem produksi
	– Program Pengembangan IKM	– Meningkatnya daya saing produktivitas serta efisiensi
	– Program Penataan Struktur Industri	– Meningkatnya kualitas struktur industri
	– Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	– Terlaksananya pengembangan sentra-sentra industri potensial
k.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
	– Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	– Meningkatnya prosentase kegiatan Linmas Desa
	– Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	– Meningkatnya pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam
	– Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	– Meningkatnya nasionalisme di masyarakat
	– Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	– Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat
	– Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	– Menurunnya tingkat penyalahgunaan napza, miras dan pekat lainnya
	– Program Pendidikan Politik Masyarakat	– Meningkatnya jumlah kegiatan pembinaan politik daerah
	– Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	– Menurunnya tingkat gangguan Kamtramtibmas di masyarakat
i.	Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	
	– Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	– Terciptanya standar waktu maksimum proses pelayanan administrasi perkantoran
	– Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	– Sarana prasarana kantor memadai
	– Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	– Meningkatnya kerjasama antar daerah
	– Program Peningkatan Disiplin Aparatur	– Meningkatnya disiplin aparatur
	– Program Peningkatan Manajemen Kepegawaian	– Tertatanya administrasi kepegawaian
	– Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	– Meningkatnya profesionalisme aparatur
	– Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	– Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan sesuai mekanisme
m.	Pemberdayaan masyarakat dan desa	
	– Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	– Terwujudnya rencana pembangunan desa
	– Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	– Meningkatnya kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam membangun desa
	– Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	– Lembaga perempuan berfungsi dan berperan aktif dalam pembangunan



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Program	Indikator Program
1	2	3
	– Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	– Berkembangnya pasar tradisional/pasar desa dan lembaga usaha ekonomi masyarakat. Menguatkan kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat
n.	Komunikasi dan informatika	
	– Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	– Meningkatnya pelayanan dan pemanfaatan arsip
	– Program Pengembangan Komunikasi, Informasidan Media Massa	– Meningkatnya kualitas konten dan pengakses website www.magelangkab.go.id
	– Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	– Terwujudnya kerjasama dengan insan pers dan stakeholder dalam bidang kehumasan. terdokumentasinya penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada publik
	– Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	– Terwujudnya kerjasama dengan insan pers dan stakeholder dalam bidang kehumasan terdokumentasinya penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada publik
o.	Kearsipan	
	– Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	– Meningkatnya kualitas sistem administrasi kearsipan
	– Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	– Meningkatnya pemeliharaan dan pemantauan arsip
II.	URUSAN PILIHAN	
p.	Pertanian	
	– Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	– Tercapainya peningkatan produksi dan mutu produk hortikultura
	– Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	– Tersedianya permodalan di tingkat petani / kelompok tani dan sarpras agropoliatan
	– Program Peningkatan Penerapan Teknologi pertanian/perkebunan	– Tercukupinya kebutuhan bibit
	– Program Peningkatan pemasaran hasil pertanian/perkebunan	– Terlaksananya perizinan ditingkat pengusaha.
	– Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	– Sarana dan prasarana kesehatan hewan memadai
	– Program Peningkatan Manajemen Produksi Budidaya Perikanan	– Terlaksananya pelatihan manajemen produksi budidaya perikanan
	– Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan	– Tersusunnya pedoman teknis pelaksanaan usaha sumber daya mineral
q.	Pariwisata	
	– Program Pengembangan Destinasi pariwisata	– Peningkatan kualitas sarana dan prasarana obyek wisata sehingga semakin dikenal oleh wisatawan . semakin lama tinggal dan meningkatnya jumlah kunjungan.
	– Program Peningkatan Manajemen Kepariwisataaan	– Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Manajemen Kepariwisataaan
	– Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	– Terfasilitasinya kegiatan Pengembangan Kemitraan Pariwisata
	– Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Objek Wisata	– Tersedianya sarana dan prasarana objek wisata yang memadai



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Program	Indikator Program
1	2	3
r.	Perdagangan	
	– Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	– Terlaksananya efisiensi perdagangan dalam negeri
	– Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	– Peningkatan terhadap perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
	– Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	– Terbinanya pedagang kaki lima dan asongan
	– Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	– Meningkatnya pengembangan ekspor
	– Program Peningkatan Sarana Prasarana Perdagangan	– Tersedianya sarana dan prasarana perdagangan yang memadai



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD Kabupaten Magelang menurut urusan pemerintahan daerah disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

3.a. Pendapatan

Realisasi pencapaian kinerja Pendapatan Kabupaten Magelang sebesar Rp2.380.457.680.604,00 dari target sebesar Rp2.359.822.006.628,00,00 yang meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1. Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Kabupaten Magelang
Urusan Pemerintahan Daerah – Pendapatan

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	119.608.086.000,00	149.295.168.927,00	124,82	128.605.715.341,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	7.630.582.000,00	9.817.539.924,00	128,66	19.999.789.449,00
3	Urusan Pilihan	660.000.000,00	653.931.556,00	99,08	679.510.248,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	2.231.923.338.628,00	2.220.691.040.197,00	99,50	2.426.154.810.717,00
	Jumlah	2.359.822.006.628,00	2.380.457.680.604,00	100,87	2.575.439.825.755,00

Realisasi pencapaian target kinerja per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 3.1**.

3.b. Belanja

Realisasi pencapaian kinerja Belanja Kabupaten Magelang sebesar Rp2.304.375.917.161,00 dari anggaran sebesar Rp2.571.445.204.287,00 yang meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2. Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Kabupaten Magelang
Urusan Pemerintahan Daerah – Belanja

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1.326.639.764.621,00	1.188.096.734.305,00	89,56	1.366.260.435.319,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	139.175.445.594,00	126.482.205.044,00	90,88	166.707.673.739,00
3	Urusan Pilihan	35.176.180.747,00	28.893.087.592,00	82,14	78.998.238.462,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	1.070.453.813.325,00	960.903.890.220,00	89,77	956.627.255.487,00
	JUMLAH	2.571.445.204.287,00	2.304.375.917.161,00	89,61	2.568.593.603.007,00

Realisasi pencapaian target kinerja per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 3.2**



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Magelang telah menetapkan Peraturan Bupati Magelang 53 Tahun 2020 yang terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

4.a Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan keuangan daerah (*reporting entity*) dalam laporan keuangan ini adalah Pemerintah Kabupaten Magelang yang terdiri atas 51 entitas akuntansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dengan demikian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang merupakan laporan keuangan yang terkonsolidasi dari 51 SKPD sebagai berikut:

- | | |
|--|---|
| 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 24. Sekretariat Daerah |
| 2. Dinas Kesehatan | 25. Sekretariat Dewan |
| 3. RSUD Muntilan | Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 26. Kecamatan Salaman |
| 5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 27. Kecamatan Borobudur |
| 6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran | 28. Kecamatan Ngluwar |
| 7. Kesatuan Bangsa dan Politik | 29. Kecamatan Salam |
| 8. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 30. Kecamatan Srumbung |
| 9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) | 31. Kecamatan Dukun |
| 10. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | 32. Kecamatan Sawangan |
| 11. Dinas Pertanian dan Pangan | 33. Kecamatan Muntilan |
| 12. Dinas Lingkungan Hidup | 34. Kecamatan Mungkid |
| 13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 35. Kecamatan Mertoyudan |
| 14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 36. Kecamatan Tempuran |
| 15. Dinas Perhubungan | 37. Kecamatan Kajoran |
| 16. Dinas Komunikasi dan Informatika | 38. Kecamatan Kaliangkrik |
| 17. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha | 39. Kecamatan Bandongan |
| | 40. Kecamatan Candimulyo |
| | 41. Kecamatan Pakis |
| | 42. Kecamatan Ngablak |
| | 43. Kecamatan Grabag |
| | 44. Kecamatan Tegalrejo |
| | 45. Kecamatan Secang |
| | 46. Kecamatan Windusari |
| | 47. Inspektorat |
| | 48. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan |



18. Kecil dan Menengah			
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		49.	Pengembangan Daerah
20. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga			Badan Pendapatan
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			Pengelolaan Keuangan dan
22. Dinas Peternakan dan Perikanan		50.	Aset Daerah
23. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			Pejabat Pengelola Keuangan
24. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		51.	Daerah
			Badan Kepegawaian,
			Pendidikan dan Pelatihan
			Daerah

4.b Prinsip Akuntansi Desentralisasi

Tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah didelegasikan dari Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi.

4.c Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam Lampiran I.02, PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan, pada paragraf 5 dan paragraf 7 adalah sebagai berikut:

Paragraf 5 : *“Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual”.*

Paragraf 7 : *Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran”.*

Sehingga basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan **basis akrual** untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional dan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD. belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis akrual untuk laporan operasional bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau Bendahara Penerimaan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah atau Rekening Bendahara Pengeluaran. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian



atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.d Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

1) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan.

Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar.

a) Aset Lancar

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Adapun aset lancar terdiri dari kas, piutang, persediaan dan investasi jangka pendek.

b) Aset Non Lancar

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya

Adapun rincian penjelasan masing-masing jenis aset adalah sebagai berikut:

a) Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas adalah alat pembayaran yang sah setiap saat dapat digunakan dan dinilai dalam mata uang rupiah meliputi:

- (1) Kas di Kas Daerah adalah saldo kas pemerintah daerah yang berada di rekening kas daerah pada bank;
- (2) Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sisa kas yang masih berada di bendahara pengeluaran per 31 Desember;
- (3) Kas di Bendahara Penerimaan adalah sisa kas yang masih berada di bendahara penerimaan per 31 Desember;



(4) Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijadikan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

b) Piutang/Tagihan ke Pihak Ketiga

Piutang merupakan hak atau klaim entitas pemerintah kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang daerah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan kerugian piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang. Umur piutang dihitung sejak timbulnya piutang/sejak jatuh tempo sampai dengan akhir periode pelaporan.

c) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.

Persediaan dicatat sebesar:

- (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- (2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- (3) Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/hibah.

d) Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksud untuk memperoleh manfaat ekonomi sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah dibagi atas dua yaitu:

(1) Investasi Jangka Pendek

Bentuk investasi yang dapat dicairkan sewaktu-waktu seperti deposito, surat berharga lainnya. Deposito adalah kas yang disimpan di bank yang pencairannya dibatasi pada jangka waktu tertentu.

(2) Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang terdiri atas:

- (a) Investasi permanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Penilaian Investasi Permanen Pemerintah daerah menggunakan Metode Ekuitas. Metode ini mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan



tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

- (b) Investasi non permanen yaitu investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen. Metode Penilaian Investasi untuk investasi non permanen menyatakan bahwa penyajian investasi non permanen dana bergulir di neraca berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penyajiannya dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. Dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir diragukan tertagih. Nilai bersih yang dapat direalisasikan dinilai sebesar nilai kas yang dipegang unit pengelola ditambah jumlah yang dapat tertagih.

Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan atau nilai wajar investasi jika harga perolehannya tidak ada.

e) Aset Tetap

- (1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca;
- (2) Aset tetap diakui pada saat diterima dan hak kepemilikan berpindah;
- (3) Aset tetap dicatat sebesar harga perolehan. Apabila harga perolehan tidak diketahui maka aset tetap dinilai sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

f) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya meliputi tagihan piutang angsuran, tagihan tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud dan aset lain-lain.

- (1) Tagihan piutang angsuran merupakan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah kepada pegawai pemerintah daerah yang masih akan dilunasi dalam jangka waktu lebih dari dua belas bulan.
- (2) Tagihan tuntutan ganti rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas



kewajibannya. Pelunasan tuntutan tersebut di atas dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

- (3) Kemitraan dengan pihak ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
- (4) Aset tak berwujud merupakan aset yang tidak berwujud tetapi mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan biaya perolehan asetnya dapat diukur secara andal, seperti sistem informasi/aplikasi dan dokumen perencanaan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (5) Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam tagihan piutang angsuran, tagihan tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tak berwujud. Aset lain-lain dapat berupa aset Pemerintah Daerah yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.

Pengakuan Aset

- a) Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b) Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pengukuran Aset adalah sebagai berikut:

- a) Kas dicatat sebesar nilai nominal
- b) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan
- c) Piutang dicatat sebesar nilai nominal
- d) Investasi jangka panjang dicatat sebesar menggunakan metode ekuitas untuk investasi permanen pada perusahaan daerah yang kepemilikannya di atas 20%, sedang untuk investasi permanen pada perusahaan daerah yang kepemilikannya di bawah 20% menggunakan metode biaya / perolehan.
- e) Aset tetap dicatat sebesar nilai perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- f) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dari hasil pengadaan baru atas peralatan/mesin adalah sama atau lebih dari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per unit.
- g) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tersebut di kecualikan pada mebelair atau sejenis yang terbuat dari bahan kayu.
- h) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset gedung bangunan adalah sama atau lebih dari Rp10.000.000,00 per unit.
- i) Aset tetap peralatan mesin dan gedung bangunan yang nilainya tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tidak di catat dalam neraca tetapi di catat dalam buku inventaris barang.



- j) Pengadaan aset tetap tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya tidak memperhatikan besar kecilnya pengeluaran merupakan aset tetap.
- k) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dari pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang diperkirakan meningkatkan kinerja aset tetap dan memperpanjang masa manfaat aset tetap untuk atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja untuk gedung dan bangunan serta jalan/irigasi/jaringan adalah yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 per unit.
- l) Pengakuan aset tetap yang bukan berasal dari belanja modal dilakukan berdasarkan usulan unit kerja setelah melalui penelitian/klarifikasi dan mendapat persetujuan dari Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Amortisasi dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud yang memiliki Masa Manfaat terbatas, meliputi:

- a) *Goodwill*;
- b) Hak Paten atau Hak Cipta;
- c) Royalti;
- d) *Software*;
- e) Lisensi;
- f) Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang;
- g) Aset Tak Berwujud Lainnya; dan
- h) Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Amortisasi tidak dilakukan terhadap:

- a) Aset Tidak Berwujud yang dinyatakan hilang berdasarkan surat pernyataan dari Pengguna Barang dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang oleh Pengguna Barang untuk dilakukan penghapusan; dan
- b) Aset Tidak Berwujud dalam kondisi usang dan/atau rusak berat yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang oleh Pengguna Barang untuk dilakukan penghapusan.

Nilai Aset Tidak Berwujud yang dapat dilakukan Amortisasi pertama kali merupakan Aset Tidak Berwujud yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2016. Untuk Aset Tidak Berwujud yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 2016, nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai taksiran yang merupakan nilai estimasi yang didasarkan pada perhitungan Pengguna Barang.

Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan amortisasi atas Aset Tak Berwujud secara merata setiap tahun masa manfaat.



2) Hutang

Hutang adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Hutang umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Hutang muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain atau lembaga internasional. Hutang pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Pengukuran hutang dicatat sebesar nominal. Hutang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Hutang diklasifikasikan:

- 1) Hutang jangka pendek yaitu hutang yang diharapkan dibayar kembali/jatuh tempo dalam waktu satu periode akuntansi. Hutang jangka pendek meliputi bagian lancar hutang jangka panjang, hutang kepada pihak ketiga, hutang bunga dan hutang perhitungan pihak ketiga.
- 2) Hutang jangka panjang merupakan hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

3) Ekuitas

Ekuitas adalah pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

4) Pendapatan- LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah *nettonya* (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan diakui dalam periode berjalan berdasarkan asas bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah *netto* (setelah dikompensasi dengan pengeluaran) pada akhir periode akuntansi. Pengukuran pendapatan menggunakan uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi atas pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi atas pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi atas pengembalian tersebut.



5) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Bendahara Pengeluaran/Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran atau Rekening Kas Umum Daerah. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

6) Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Magelang dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran sebesar kas yang dikeluarkan. Transfer diukur dengan menggunakan nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang.

7) Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan diakui selama periode berjalan dan akhir periode akuntansi. Pengakuan pembiayaan dalam periode berjalan pada saat kas diterima dari sumber pembiayaan yang berupa pengeluaran daerah. Pengakuan pembiayaan pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah selisih pendapatan dan belanja yang dialokasikan atau ditutup setelah diperhitungkan dengan elemen-elemen pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.

8) Pendapatan- LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO diakui pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
- 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah *nettonya* (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).



9) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat:

a) Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

b) Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:

a) Metode pendekatan Beban

Setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.

b) Metode pendekatan Aset

Setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga.

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.a. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

1) Pendapatan

Anggaran Pendapatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp2.359.822.006.628,00 dan terealisasi sebesar Rp2.380.457.680.604,00.

Tabel 5.1. Realisasi Pendapatan

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	265.502.524.500,00	329.769.193.224,00	124,21	417.178.099.961,00
2	Pendapatan Transfer	1.989.978.882.128,00	1.940.323.473.805,00	97,50	2.063.644.057.920,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	104.340.600.000,00	110.365.013.575,00	105,77	94.617.667.874,00
	Jumlah	2.359.822.006.628,00	2.380.457.680.604,00	100,87	2.575.439.825.755,00

a) Pendapatan Asli Daerah

Tahun 2020		Tahun 2019
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
265.502.524.500,00	329.769.193.224,00	417.178.099.961,00

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun Anggaran 2020 dengan rincian pos dan jumlah PAD sebagai berikut:

Tabel 5.2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1.	Pajak Daerah	91.323.655.000,00	115.530.759.532,00	126,51	156.886.789.644,00
2.	Retribusi Daerah	10.739.521.500,00	27.049.700.014,00	251,87	22.934.190.849,00
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.634.652.000,00	30.637.364.531,00	100,01	23.700.417.768,00
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah	132.804.696.000,00	156.551.369.147,00	117,88	213.656.701.700,00
	Jumlah	265.502.524.500,00	329.769.193.224,00	124,21	417.178.099.961,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(1) Pajak Daerah

	Tahun 2020	Tahun 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	91.323.655.000,00	115.530.759.532,00
		156.886.789.644,00

Dasar pengenaan pajak daerah adalah Perda Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pada Tahun 2020 realisasi penerimaan Pajak Daerah dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.3. Realisasi Pajak Daerah

No	Uraian	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Pajak Hotel	6.415.367.054,00	9.313.371.310,00	145,17	16.136.254.566,00
2	Pajak Restoran	9.659.262.224,00	13.304.010.466,00	137,73	18.938.329.070,00
3	Pajak Hiburan	1.303.381.488,00	1.611.029.293,00	123,60	3.910.873.455,00
4	Pajak Reklame	1.072.417.976,00	1.109.814.945,00	103,49	1.121.265.805,00
5	Pajak Penerangan Jalan	32.589.590.556,00	32.989.571.766,00	101,23	35.517.773.032,00
6	Pajak Parkir	607.130.040,00	785.319.312,00	129,35	1.875.857.572,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	8.965.228.505,00	9.557.585.826,00	106,61	24.892.951.192,00
8	Pajak Air Tanah	410.456.680,00	752.135.620,00	183,24	879.678.828,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan	21.216.710.928,00	31.505.074.451,00	148,49	33.057.309.182,00
10	BPHTB	9.084.109.549,00	14.602.846.543,00	160,75	20.556.496.942,00
	Jumlah	91.323.655.000,00	115.530.759.532,00	126,51	156.886.789.644,00

SKPD pemungut pajak adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan realisasi sebesar Rp115.530.759.532,00. Rincian untuk pendapatan dari pajak adalah sebagai berikut:

(a) Pajak Hotel

Tabel 5.4. Realisasi Pajak Hotel

No	Uraian	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Pajak Hotel Bintang Lima	3.247.545.268,00	3.386.218.810,00	104,27	6.001.991.482,00
2	Pajak Hotel Bintang Tiga	604.053.898,00	1.702.515.424,00	281,85	3.749.130.407,00
3	Pajak Hotel Bintang Satu	2.305.562.816,00	3.883.750.382,00	168,45	5.160.611.100,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
4	Pajak Los-men / Rumah Pengi-napan/ Pe-sanggrahan/Hotel/Ru mah kos	258.205.072,00	340.886.694,00	132,02	1.224.521.577,00
Jumlah		6.415.367.054,00	9.313.371.310,00	145,17	16.136.254.566,00

(b) Pajak Restoran

Tabel 5.5. Realisasi Pajak Restoran

No	Uraian	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Pajak Restoran	6.622.247.900,00	8.416.172.040,00	127,09	12.094.661.075,00
2	Pajak Rumah Makan	321.095.831,00	706.085.599,00	219,90	878.363.334,00
3	Pajak Katering	2.296.422.824,00	3.535.651.601,00	153,96	5.291.924.979,00
4	Pajak Warung	419.495.669,00	646.101.226,00	154,02	673.379.682,00
Jumlah		9.659.262.224,00	13.304.010.466,00	137,73	18.938.329.070,00

(c) Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan BPHTB

Tabel 5.6. Realisasi Pajak Hiburan, Reklame, Penerangan, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Parkir, Air Tanah dan BPHTB

No	Uraian	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Pajak Hiburan dikenakan untuk Rekreasi dan Hiburan Lainnya	1.303.381.488,00	1.611.029.293,00	123,60	3.910.873.455,00
2	Pajak Reklame meliputi Reklame Papan, <i>Billboard</i> , <i>Videotron</i> , dan <i>Megatron</i>	1.072.417.976,00	1.109.814.945,00	103,49	1.121.265.805,00
3	Pajak Penerangan Jalan PLN	32.589.590.556,00	32.989.571.766,00	101,23	35.517.773.032,00
4	Pajak Parkir	607.130.040,00	785.319.312,00	129,35	1.875.857.572,00
5	Pajak Air Tanah	410.456.680,00	752.135.620,00	183,24	879.678.828,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan meliputi Pasir,Batu,Kerikil	8.965.228.505,00	9.557.585.826,00	106,61	24.892.951.192,00
7	BPHTB	9.084.109.549,00	14.602.846.543,00	160,75	20.556.496.942,00
Jumlah		54.032.314.794,00	61.408.303.305,00	113,65	88.754.896.826,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Untuk penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum dari PLN mengalami penurunan dari tahun 2019 disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah untuk melaksanakan subsidi listik industri dan rumah tangga.

(d) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Tabel 5.7. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

No	Uraian	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Kecamatan Salaman	1.033.076.246	1.584.772.917	153,40	1.698.377.490,00
2	Kecamatan Borobudur	1.168.012.931	1.546.005.330	132,36	1.901.189.299,00
3	Kecamatan Ngluwar	570.688.590	895.165.394	156,86	966.537.432,00
4	Kecamatan Salam	1.056.408.214	1.599.576.999	151,42	1.625.865.863,00
5	Kecamatan Srumbung	794.444.102	1.344.617.165	169,25	1.345.937.359,00
6	Kecamatan Dukun	827.908.773	1.389.781.718	167,87	1.404.173.144,00
7	Kecamatan Sawangan	884.011.419	1.525.293.339	172,54	1.419.646.217,00
8	Kecamatan Muntilan	1.389.684.703	2.186.136.873	157,31	2.286.807.128,00
9	Kecamatan Mungkid	1.253.604.444	1.699.409.072	135,56	1.975.617.722,00
10	Kecamatan Mertoyudan	1.902.867.059	2.505.737.992	131,68	2.689.655.302,00
11	Kecamatan Tempuran	1.265.852.591	1.803.918.078	142,51	1.704.323.397,00
12	Kecamatan Kajoran	964.175.686	1.466.493.102	152,10	1.540.749.623,00
13	Kecamatan Kaliangkrik	652.447.195	1.104.693.540	169,32	1.103.464.406,00
14	Kecamatan Bandongan	934.509.848	1.366.697.068	146,25	1.494.460.383,00
15	Kecamatan Candimulyo	869.514.426	1.471.954.284	169,28	1.472.948.653,00
16	Kecamatan Pakis	817.270.350	1.255.149.822	153,58	1.382.367.987,00
17	Kecamatan Ngablak	605.114.155	1.024.149.642	169,25	1.025.784.444,00
18	Kecamatan Grabag	1.325.781.184	1.980.656.298	149,40	1.828.439.804,00
19	Kecamatan Tegalrejo	793.087.161	895.863.883	112,96	1.168.913.521,00
20	Kecamatan Secang	1.446.292.289	1.763.133.359	121,91	1.894.016.775,00
21	Kecamatan Windusari	661.959.562	1.095.868.576	165,55	1.128.033.233,00
	Jumlah	21.216.710.928,00	31.505.074.451,00	148,49	33.057.309.182,00

(2) Retribusi Daerah

Tahun 2020		Tahun 2019
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
10.739.521.500,00	27.049.700.014,00	22.934.190.849,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Retribusi Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 yang terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu dengan rincian sebagai berikut :



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 5.8. Realisasi Retribusi Daerah

No	Uraian	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Retribusi Jasa Umum	6.766.431.000,00	22.146.998.820,00	327,31	12.508.541.664,00
a.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.100.000.000,00	15.821.421.642,00	1.438,31	592.197.000,00
b.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	360.024.000,00	432.881.682,00	120,24	325.141.000,00
c.	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	482.390.500,00	482.246.832,00	99,97	817.211.000,00
d.	Retribusi Pelayanan Pasar	2.814.549.000,00	3.307.434.846,00	117,51	8.364.394.140,00
e.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	805.597.500,00	834.657.500,00	103,61	1.015.680.000,00
f.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	0,00	740.000,00	0,00	1.915.000,00
g.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	137.289.000,00	91.519.500,00	66,66	111.804.500,00
h.	R. Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.000.000.000,00	1.086.213.318,00	108,62	1.152.104.024,00
i.	Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang	66.581.000,00	89.883.500,00	135,00	128.095.000,00
2	Retribusi Jasa Usaha	2.638.323.500,00	3.563.807.554,00	135,08	8.590.956.482,00
a.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	599.571.000,00	666.131.408,00	111,10	1.220.067.622,00
b.	Retribusi Terminal	256.213.500,00	338.374.000,00	132,07	461.724.300,00
c.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	684.523.000,00	700.362.000,00	102,31	920.069.800,00
d.	Retribusi Rumah Potong Hewan	224.400.000,00	198.839.000,00	88,61	215.805.000,00
e.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	873.616.000,00	1.660.101.146,00	190,03	5.773.289.760,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	1.334.767.000,00	1.338.893.640,00	100,31	1.834.692.703,00
a.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.258.590.000,00	1.244.696.640,00	98,90	1.758.277.703,00
b.	Retribusi Izin Trayek	50.480.000,00	55.432.000,00	109,81	65.230.000,00
c.	Retribusi Izin Penempatan Ruko/Kios/Los	25.697.000,00	38.765.000,00	150,85	11.185.000,00
Jumlah		10.739.521.500,00	27.049.700.014,00	251,87	22.934.190.849,00

Pemungutan Retribusi Jasa Umum diatur dengan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sedangkan Retribusi Jasa Usaha diatur dengan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2016, dan Retribusi Perizinan Tertentu diatur dengan Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 14 Tahun 2016.

Rincian Retribusi Daerah per jenis retribusi per SKPD Tahun 2020 dan 2019 dapat dilihat pada **Lampiran 5.1**



(3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Tahun 2020		Tahun 2019
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
30.634.652.000,00	30.637.364.531,00	23.700.417.768,00

Penerimaan PAD yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang PD Bapas 69 Kabupaten Magelang, Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum serta Perda Provinsi Nomor 6 Tahun 2009 tentang PD Bank Jateng, perda provinsi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pembentukan perusahaan perseroan Daerah Bank perkreditan rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa tengah serta perda No 5 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan kredit Kecamatan jumlah tersebut adalah realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2020 dan 2019 yang terdiri dari:

Tabel 5.9. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

No	Uraian	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69	18.406.891.687,00	18.406.891.686,00	100,00	15.884.341.325,00
2	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	3.984.492.600,00	3.984.492.600,00	100,00	3.470.715.600,00
3	Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU)	112.428.318,00	112.427.800,00	100,00	114.103.400,00
4	Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK)	1.234.382.801,00	1.234.382.801,00	100,00	1.000.630.327,00
5	PD Bank Jawa Tengah	6.896.456.594,00	6.896.787.559,00	100,00	3.230.292.657,00
6	PD BKK Tempuran	0,00	0,00	0,00	334.459,00
7	PR.PP Jateng	0,00	2.382.085,00	0,00	0,00
	Jumlah	30.634.652.000,00	30.637.364.531,00	100,01	23.700.417.768,00

(4) Lain-lain PAD yang Sah

Tahun 2020		Tahun 2019
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
132.804.696.000,00	156.551.369.147,00	213.656.701.700,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Lain-lain PAD yang Sah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 yang menampung penerimaan



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

pendapatan asli daerah yang tidak termasuk dalam kategori pajak daerah maupun retribusi daerah yaitu hasil penjualan milik daerah, penerimaan jasa bank, bunga bank, denda retribusi, hasil eksekusi jaminan atas pelaksanaan pekerjaan serta pendapatan dari pengembalian lain-lainnya, pendapatan BLUD dan lain-lainnya pendapatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.10. Realisasi Lain Lain PAD yang Sah

No	Uraian	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	236.025.000,00	244.818.500,00	103,73	125.060.750,00
2	Penerimaan Jasa Giro	3.403.811.701,00	5.947.674.890,00	174,74	12.599.649.926,00
3	Pendapatan Bunga Deposito	9.151.546.310,00	13.458.093.813,00	147,06	64.284.190.831,00
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	449.265.779,00	0,00	5.853.945.930,00
5	Pendapatan Denda Pajak	61.999.028,00	136.362.015,00	219,94	134.800.009,00
6	Pendapatan Denda Retribusi	235.410.500,00	261.856.248,00	111,23	845.980.980,00
7	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	0,00	0,00	146.618.073,00
8	Pendapatan dari pengembalian Lainnya	1.799.128.461,00	2.975.769.760,00	165,40	2.572.096.586,00
9	Lain-Lainnya Pendapatan (BLUD)	117.008.086.000,00	131.655.160.565,00	112,52	125.622.344.591,00
10	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	393.668.000,00	446.558.414,00	113,44	345.721.078,00
11	Kontribusi Air PDAM ke Desa	495.021.000,00	955.309.163,00	192,98	1.107.292.946,00
12	Hasil Penjualan Pertanian	20.000.000,00	20.500.000,00	102,50	19.000.000,00
Jumlah		132.804.696.000,00	156.551.369.147,00	117,88	213.656.701.700,00

Rincian Lain-lain PAD yang Sah dari masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

(a) Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Tabel 5.11. Realisasi Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

No	Uraian	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	BPPKAD	235.800.000,00	207.807.000,00	88,13	81.400.000,00
	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai	0,00	3.519.000,00	0,00	0,00
	Kendaraan roda 2	68.000.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	Kendaraan roda 4	152.500.000,00	0,00	0,00	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
	Bahan bekas bangunan	15.300.000,00	50.128.000,00	327,63	81.000.000,00
	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Lainnya	0,00	154.160.000,00	0,00	0,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	225.000,00	37.011.500,00	16.449,56	43.660.750,00
	Penebangan pohon	0,00	19.766.000,00	0,00	13.782.000,00
	Bahan bekas bangunan	225.000,00	17.245.500,00	7.664,67	29.878.750,00
	Jumlah	236.025.000,00	244.818.500,00	103,73	125.060.750,00

(b) Penerimaan Jasa Giro

Penerimaan jasa giro adalah jasa giro yang masuk di Kasda dan Rekening Dana Cadangan yang dikelola BPPKAD sebagai berikut:

Tabel 5.12. Realisasi Penerimaan Jasa Giro

No	Uraian	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1.	Jasa Giro Kas Daerah	3.318.175.174,00	5.669.415.918,00	170,86	7.499.962.922,00
2.	Jasa Giro Bendahara	85.636.527,00	278.258.972,00	324,93	237.502.916,00
3.	Jasa Giro Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	4.862.184.088,00
	Jumlah	3.403.811.701,00	5.947.674.890,00	174,74	12.599.649.926,00

(c) Pendapatan Bunga Deposito

Pendapatan bunga deposito adalah bunga deposito yang ditempatkan oleh BPPKAD pada bank-bank dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.13. Realisasi Pendapatan Bunga Deposito

No	Uraian	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Rekening Deposito pada Bank Jateng	8.285.606.926,00	12.121.917.774,00	146,30	3.921.643.828,00
2	Rekening Deposito pada BNI	265.753.425,00	407.819.850,00	153,46	3.079.212.327,00
3	Rekening Deposito pada BTN	0,00	0,00	0,00	1.359.041.082,00
4	Rekening Deposito pada BRI	600.185.959,00	928.356.189,00	154,68	11.480.945.511,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
5	Bunga Deposito Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	44.431.022.817,00
6	Rekening Bunga Deposito pada Bank Muamalat	0,00	0,00	0,00	12.325.266,00
	Jumlah	9.151.546.310,00	13.458.093.813,00	147,06	64.284.190.831,00

(d) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Pendapatan dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah penerimaan BPPKAD atas kerusakan atau kehilangan atas aset Kabupaten Magelang realisasi tahun 2020 adalah sebesar Rp0,00 dan tahun 2019 sebesar Rp0.00

(e) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan adalah penerimaan BPPKAD atas denda yang dikenakan pada pihak ketiga yang terlambat menyelesaikan pekerjaannya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.14. Realisasi Pendapatan Denda atas
Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

No	Uraian	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Bidang Pendidikan	0,00	0,00	0,00	43.737.487,00
2	Bidang Kesehatan	0,00	111.060.388,00	0,00	201.789.478,00
3	Bidang Pekerjaan Umum	0,00	319.476.901,00	0,00	5.580.259.822,00
4	Bidang Perumahan Rakyat	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Bidang Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	9.868.656,00
6	Bidang Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Bidang Perencanaan Pembangunan	0,00	16.405.950,00	0,00	1.945.500,00
8	Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Lainnya	0,00	2.322.540,00	0,00	16.344.987,00
	Jumlah	0,00	449.265.779,00	0,00	5.853.945.930,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(f) Pendapatan Denda Pajak

Pendapatan denda pajak meliputi denda atas keterlambatan pembayaran pajak dengan target tahun 2020 Rp61.999.038,00 terealisasi sebesar Rp136.362.015,00 dan realisasi tahun 2019 sebesar Rp134.800.009,00

Tabel 5.15. Realisasi Pendapatan Denda Pajak

No	Uraian	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	6.406.440,00	6.832.792,00	106,66	30.883.182,00
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	6.875.009,00	9.737.764,00	141,64	14.223.368,00
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	108.000,00	184.113,00	170,48	1.561.741,00
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	4.770.188,00	6.710.811,00	140,68	11.829.771,00
5	Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	1.166.702,00	4.420.940,00	378,93	2.936.422,00
6	Pendapatan Denda Pajak Parkir	32.874,00	75.936,00	230,99	65.694,00
7	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	887.238,00	1.929.903,00	217,52	1.873.012,00
8	Pendapatan Denda Pajak PBB	41.752.577,00	106.469.756,00	255,00	71.426.819,00
	Jumlah	61.999.028,00	136.362.015,00	219,94	134.800.009,00

(g) Pendapatan Denda Retribusi

Pendapatan denda retribusi meliputi denda atas keterlambatan pembayaran retribusi dengan target tahun 2020 sebesar Rp235.410.500,00 terealisasi sebesar Rp261.856.248,00 (111,23%) dan realisasi tahun 2019 sebesar Rp845.980.980,00 dengan rincian pada **Lampiran 5.2.**

(h) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan adalah hasil eksekusi dari jaminan atas pelaksanaan pekerjaan dengan target tahun 2020 sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp0,00 dan realisasi tahun 2019 sebesar Rp146.618.073,00.

(i) Pendapatan dari Pengembalian Lainnya

Pendapatan dari pengembalian Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 5.16. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Lainnya

No	Uraian	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	47.000,00
2	BPPKAD	1.799.128.461,00	2.975.769.760,00	165,40	2.572.049.586
	Jumlah	1.799.128.461,00	2.975.769.760,00	165,40	2.572.096.586,00

(j) Lain Lainnya Pendapatan BLUD

Pendapatan BLUD adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat yang terdiri dari BLUD Puskesmas dan BLUD RSUD Muntilan. Pendapatan BLUD Tahun 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebagai berikut:

Tabel 5.17. Realisasi Pendapatan BLUD

No	Uraian	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Dinas Kesehatan	56.008.086.000,00	54.430.713.824,00	97,18	62.178.396.982,00
2	RSUD	61.000.000.000,00	77.224.446.741,00	126,60	63.444.080.709,00
	Jumlah	117.008.086.000,00	131.655.160.565,00	112,52	125.622.344.591,00

Rincian pendapatan BLUD disajikan pada **Lampiran 5.3.**

(k) Lain- Lain PAD Yang Sah Lainnya

Rincian Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.18. Realisasi Lain Lain PAD yang Sah Lainnya

No	Uraian	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.668.000,00	21.240.500,00	277,00	16.825.500,00
2	BPPKAD	386.000.000,00	425.317.914,00	110,19	328.895.578,00
	Jumlah	393.668.000,00	446.558.414,00	113,44	345.721.078,00

(l) Penerimaan Kontribusi Air PDAM ke Desa Sumber Air

Penerimaan kontribusi air PDAM ke Desa Sumber Air dengan target tahun 2020 sebesar Rp495.021.000,00 terealisasi Rp955.309.163,00 (192.98%) dan realisasi tahun 2019 sebesar Rp1.107.292.946,00.



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Penerimaan kontribusi desa lokasi sumber air dari PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang.

(m) Hasil Penjualan Pertanian

Pertanian Hasil penjualan pertanian tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp20.000.000,00 terealisasi sebesar Rp20.500.000,00 (102,5%) dan realisasi tahun 2019 sebesar Rp19.000.000,00

b) Pendapatan Transfer

Tahun 2020		Tahun 2019
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1.989.978.882.128,00	1.940.323.473.805,00	2.063.644.057.920,00

Merupakan realisasi Pendapatan Transfer periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 dengan rincian:

Tabel 5.19. Realisasi Pendapatan Transfer

No	Uraian	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.354.331.370.128,00	1.331.514.071.778,00	98,32	1.452.804.059.102,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	450.209.571.000,00	450.209.569.982,00	100,00	430.853.304.000,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	170.720.941.000,00	147.910.429.045,00	86,64	167.256.161.818,00
4	Bantuan Keuangan	14.717.000.000,00	10.689.403.000,00	72,63	12.730.533.020,00
	Jumlah	1.989.978.882.128,00	1.940.323.473.805,00	97,50	2.063.644.057.920,00

1) Transfer Pemerintah Pusat

Tahun 2020		Tahun 2019
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1.354.331.370.128,00	1.331.514.071.778,00	1.452.804.059.102,00

Transfer dari Pemerintah Pusat Tahun 2020 dan 2019 terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana tabel berikut :



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 5.20. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat

No	Uraian	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	32.345.372.000,00	32.547.800.849,00	100,63	26.872.678.200,00
2	DBH Bukan Pajak/SDA	1.965.628.000,00	1.816.492.146,00	92,41	1.375.208.237,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	997.304.689.000,00	987.675.947.000,00	99,03	1.097.366.974.000,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	322.715.681.128,00	309.473.831.783,00	95,90	327.189.198.665,00
	Jumlah	1.354.331.370.128,00	1.331.514.071.778,00	98,32	1.452.804.059.102,00

Data Transfer Pemerintah Pusat secara rinci disajikan pada **Lampiran 5.4**.

2) Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Tahun 2020		Tahun 2019
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
450.209.571.000,00	450.209.569.982,00	430.853.304.000,00

Transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya untuk tahun 2020 terealisasi Rp450.209.569.982,00, sedangkan pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp430.853.304.000,00 yang merupakan Dana Insentif Daerah dan Penerimaan Dana Desa yang akan disalurkan ke desa-desa di wilayah Kabupaten Magelang terdiri dari:

Tabel 5.21. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

No	Uraian	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan	13.089.569.000,00	13.089.569.000,00	100,00	14.474.551.000,00
2	Kesejahteraan	0,00	0,00	0,00	11.691.322.000,00
3	Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan	8.664.579.000,00	8.664.579.000,00	100,00	10.537.181.000,00
4	Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur	9.236.501.000,00	9.236.501.000,00	100,00	11.078.473.000,00
5	Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan	21.534.574.000,00	21.534.574.000,00	100,00	0,00
6	Pelayanan Umum Pemerintah	6.640.239.000,00	6.640.239.000,00	100,00	0,00
7	Kinerja Penanganan Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dana Desa	391.044.109.000,00	391.044.107.982,00	100,00	383.071.777.000,00
	Jumlah	450.209.571.000,00	450.209.569.982,00	100,00	430.853.304.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengolaan Dana Desa, mekanisme penyaluran Dana Desa adalah sebagai berikut:

- Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD
- Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/Kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD
- Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/Kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati/Walikota

3) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Tahun 2020		Tahun 2019
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
170.720.941.000,00	147.910.429.045,00	167.256.161.818,00

Transfer dari Pemerintah Daerah Lainnya seluruhnya berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak:

Tabel 5.22. Realisasi Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

No	Uraian	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Pajak Kendaraan Bermotor	40.374.223.000,00	33.198.302.424,00	82,23	39.305.491.181,00
2	BBNKB	26.533.110.000,00	17.663.939.474,00	66,57	28.510.922.534,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	48.551.897.000,00	32.680.054.062,00	67,31	50.752.610.199,00
4	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	257.206.000,00	285.300.007,00	110,92	267.824.987,00
5	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	55.004.505.000,00	64.082.833.078,00	116,50	48.419.312.917,00
	Jumlah	170.720.941.000,00	147.910.429.045,00	86,64	167.256.161.818,00

4) Bantuan Keuangan

Tahun 2020		Tahun 2019
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
14.717.000.000,00	10.689.403.000,00	12.730.533.000,00

Pendapatan Bantuan Keuangan merupakan transfer dari Pemerintah Pusat/Daerah lainnya untuk pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah penerimanya. Pendapatan Bantuan Keuangan



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

terdiri dari bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Pendapatan Bantuan Keuangan Tahun 2020 dan 2019 terdiri dari:

Tabel 5.23. Realisasi Bantuan Keuangan

No	Uraian	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	14.717.000.000,00	10.689.403.000,00	72,63	12.730.533.000,00
	Jumlah	14.717.000.000,00	10.689.403.000,00	72,63	12.730.533.000,00

c) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Tahun 2020		Tahun 2019
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
104.340.600.000,00	110.365.013.575,00	94.617.667.874,00

Pendapatan Lain-lain yang sah terdiri dari:

Tabel 5.24. Realisasi Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

No	Uraian	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	104.340.600.000,00	109.475.852.475,00	104,92	94.617.667.874,00
2	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LRA	0,00	889.161.100,00	0,00	0,00
	Jumlah	104.340.600.000,00	110.365.013.575,00	104,92	94.617.667.874,00

1. Pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Magelang mendapatkan hibah dari pemerintah pusat dengan alokasi sebesar Rp7.657.600.000,00 berdasarkan surat dari Menteri Keuangan Nomor : S-244/MK.7/2020 Tanggal 12 Oktober 2020 perihal Penetapan hibah pariwisata TA.2020. Adapun realisasi pendapatan hibah pariwisata adalah Rp7.458.912.475,00 Hibah tersebut dalam rangka penanganan dampak pandemic Corona Virus disease 2019 (Covid -19) dan untuk dialokasikan pada kegiatan pemulihan ekonomi sector pariwisata.
2. Pendapatan Hibah Bos SD dan SMP merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Magelang Berdasarkan Naskah Perjanjian hibah bantuan operasional sekolah (BOS) reguler antara Gubernur Jawa Tengah dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Nomor:422.7/21789/04/2020 Tanggal 4 Desember 2020 tentang penyaluran Dana Bantuan operasional



sekolah (BOS) yang terdiri dari BOS Reguler, BOS Afirmasi dan BOS kinerja yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk SD dan SMP Tahun 2020. Dalam rangka meringankan beban masyarakat terhadap pembayaran pendidikan dalam rangka Wajib belajar sembilan Tahun Alokasi Pendapatan Hibah BOS SD dan SMP Tahun 2020 sebesar Rp102.016.940.000,00

3. Hibah dari kelompok masyarakat kepada SD Kebonrejo 1 dan di belanjakan sebagai belanja BOS senilai Rp540.000,00

2) BELANJA

Belanja Daerah termasuk di dalamnya adalah belanja BLUD RSUD Muntilan, UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan serta belanja BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Realisasi belanja yang dikeluarkan dari rekening BLUD RSUD Muntilan sebesar Rp61.798.074.452,00 dan realisasi belanja BLUD yang dicairkan dari rekening BLUD UPTD Puskesmas di Dinas Kesehatan sebesar Rp52.637.862.882,00 sehingga realisasi belanja keseluruhan BLUD sebesar Rp114.435.937.334,00. Sementara belanja BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp103.052.763.455,00. Belanja daerah tahun 2020 dengan anggaran dan realisasi sebesar Rp2.571.445.204.287,00 terealisasi sebesar Rp2.304.375.917.161,00 (89,61%) dan realisasi tahun 2019 sebesar Rp2.568.593.603.007,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.25. Realisasi Belanja Daerah

No	Belanja	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Belanja Operasi	1.507.400.564.137,00	1.357.596.932.757,00	90,06	1.498.077.962.197,00
2	Belanja Modal	257.930.375.571,00	214.407.058.402,00	83,13	386.529.995.844,00
3	Belanja Tak Terduga	138.279.351.079,00	64.637.965.303,00	46,74	73.755.000,00
4	Transfer	667.834.913.500,00	667.733.960.699,00	99,98	683.911.889.966,00
Jumlah		2.571.445.204.287,00	2.304.375.917.161,00	89,61	2.568.593.603.007,00

a) Belanja Operasi

Tahun 2020		Tahun 2019
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1.507.400.564.137,00	1.357.596.932.757,00	1.498.077.962.197,00

Belanja Operasi tahun 2020 dengan target dan realisasi sebesar Rp1.507.400.564.137,00 terealisasi sebesar Rp1.357.596.932.757,00 (90,06%) dan realisasi tahun 2019 sebesar Rp1.498.077.962.197,00 dengan rincian sebagai berikut :



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 5.26. Realisasi Belanja Operasi

No	Uraian	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Belanja Pegawai	862.493.624.630,00	795.312.940.429,00	92,21	842.384.330.471,00
2	Belanja Barang dan Jasa	575.354.617.007,00	495.959.581.668,00	86,20	579.430.825.726,00
3	Belanja Hibah	58.495.187.500,00	55.687.000.660,00	95,20	46.064.197.000,00
4	Belanja Bantuan Sosial	11.057.135.000,00	10.637.410.000,00	96,20	30.198.609.000,00
Jumlah		1.507.400.564.137,00	1.357.596.932.757,00	90,06	1.498.077.962.197,00

(1) Belanja Pegawai

Tahun 2020		Tahun 2019
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
862.493.624.630,00	795.312.940.429,00	842.384.330.471,00

Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

Belanja Pegawai Tahun 2020 dan Tahun 2019 pada Belanja Operasi adalah:

Tabel 5.27. Realisasi Belanja Pegawai

No	Belanja	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	808.754.406.730,00	748.446.923.705,00	92,54	789.482.091.968,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	35.174.993.900,00	29.822.932.749,00	84,78	34.961.110.122,00
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	9.429.132.000,00	9.323.200.000,00	98,88	9.482.000.000,00
4	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	955.177.750,00	786.070.626,00	82,30	5.933.633.221,00
5	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	148.475.727,00	29.401.120,00	19,80	512.220.100,00
6	Tambahan Penghasilan Berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	6.447.692.423,00	5.330.061.429,00	82,67	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Belanja	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
7	Belanja Uang Lembur	1.583.746.100,00	1.574.350.800,00	99,41	2.013.275.060,00
Jumlah		862.493.624.630,00	795.312.940.429,00	92,21	842.384.330.471,00

Rincian Belanja Pegawai Tahun 2020 dan 2019 per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.5**.

(2) **Belanja Barang dan Jasa**

Tahun 2020		Tahun 2019
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
575.354.617.007,00	495.959.581.668,00	579.430.825.726,00

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Rincian belanja barang dan jasa tahun 2020 dan 2019 menurut obyek belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.28. Realisasi Belanja Menurut Objek Belanja

No	Belanja	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Belanja Bahan Pakai Habis	25.113.174.630,00	22.334.379.285,00	88,93	13.383.741.723,00
2	Belanja Bahan/Material	15.199.686.087,50	13.388.532.916,00	88,08	13.060.229.658,00
3	Belanja Jasa Kantor	148.225.375.841,00	134.389.876.032,00	90,67	128.790.027.959,00
4	Belanja Premi Asuransi	32.577.152.795,00	18.581.901.878,00	57,04	20.344.402.841,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.294.601.042,00	8.889.561.647,00	78,71	11.779.483.896,00
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.790.278.084,50	5.886.845.637,00	86,70	9.474.799.492,00
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	883.314.000,00	375.225.000,00	42,48	1.043.673.000,00
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	220.821.000,00	192.067.000,00	86,98	1.230.538.600,00
9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.042.122.950,00	877.123.645,00	84,17	1.838.269.660,00
10	Belanja Makanan dan Minuman	22.458.267.400,16	15.979.629.162,00	71,15	34.770.420.180,00
11	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	324.325.000,00	319.830.000,00	98,61	353.228.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Belanja	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
12	Belanja Pakaian Kerja	1.517.579.751,00	1.496.153.075,00	98,59	1.094.729.269,00
13	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	287.328.950,00	283.184.855,00	98,56	827.135.280,00
14	Belanja Perjalanan Dinas	30.279.970.837,84	21.314.294.279,00	70,39	45.462.451.742,00
15	Belanja Pemeliharaan	18.357.406.154,00	17.182.805.530,00	93,60	28.365.736.824,00
16	Belanja Jasa Konsultansi	3.900.511.500,00	3.084.984.000,00	79,09	10.830.418.095,00
17	Belanja Hibah barang atau jasa yang akan diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat	19.512.558.507,00	18.138.942.613,00	92,96	27.978.719.223,00
18	Belanja bantuan sosial barang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat	0,00	431.505.800,00	0,00	1.427.250.000,00
19	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	91.350.000,00	80.550.000,00	88,18	69.600.000,00
20	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.576.708.000,00	2.204.008.873,00	85,54	5.380.213.843,00
21	Belanja Honorarium PNS	18.269.082.350,00	16.808.894.100,00	92,01	27.866.429.495,00
22	Belanja Honorarium Non PNS	4.034.126.752,00	3.985.756.002,00	98,80	10.809.365.478,00
23	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	82.290.144.221,00	79.227.983.201,00	96,28	66.394.880.873,00
24	Belanja Pajak / Retribusi	257.707.363,00	239.938.992,00	93,11	199.668.864,00
25	Belanja Pegawai BLUD	35.721.317.047,00	33.072.435.670,00	92,58	36.081.511.582,00
26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	86.224.023.247,00	70.768.388.351,00	82,08	72.181.880.229,00
27	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber /Instruktur	3.724.561.535,00	2.682.637.500,00	72,03	7.591.777.000,00
28	Belanja Pegawai BOS	1.153.621.962,00	714.646.625,00	61,95	800.242.920,00
29	Belanja Uang Untuk diberikan Kepada Masyarakat	3.027.500.000,00	3.027.500.000,00	100,00	0,00
Jumlah		575.354.617.007,00	495.959.581.668,00	86,20	579.430.825.726,00

Sedangkan belanja barang dan jasa per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.6.**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Operasi Tahun 2020 dan 2019 tersebut termasuk Belanja Barang dan Jasa yang sumber dananya dari BLUD RSU Muntilan dan BLUD UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan sebagai berikut.

Tabel 5.29. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD

NO.	PUSKESMAS	PERSEDIAAN	JASA	PEMELIHARAAN	PERJALANAN	JUMLAH
1	SALAMAN I	479.890.722,00	693.839.740,00	34.270.000,00	13.030.000,00	1.221.030.462,00
2	SALAMAN II	149.216.840,00	253.177.555,00	24.624.760,00	3.930.000,00	430.949.155,00
3	BOROBUDUR	316.877.594,00	677.942.054,00	35.547.000,00	2.210.000,00	1.032.576.648,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

NO.	PUSKESMAS	PERSEDIAAN	JASA	PEMELIHARAAN	PERJALANAN	JUMLAH
4	NGLUWAR	54.463.575,00	168.107.101,00	22.248.246,00	750.000,00	245.568.922,00
5	SALAM	193.973.515,00	198.133.194,00	73.154.435,00	3.900.000,00	469.161.144,00
6	SRUMBUNG	121.676.729,00	230.348.829,00	154.798.200,00	5.300.000,00	512.123.758,00
7	DUKUN	159.157.470,00	342.141.684,00	58.508.080,00	730.000,00	560.537.234,00
8	SAWANGAN I	126.928.697,00	222.088.531,00	161.860.795,00	3.060.000,00	513.938.023,00
9	SAWANGAN II	166.733.370,00	219.236.046,00	19.837.500,00	6.460.000,00	412.266.916,00
10	MUNTILAN I	88.267.860,00	276.270.326,00	15.869.364,00	3.150.000,00	383.557.550,00
11	MUNTILAN II	168.416.878,00	251.542.908,00	8.924.105,00	2.170.000,00	431.053.891,00
12	MUNGKID	348.393.414,00	426.941.507,00	44.855.500,00	47.920.000,00	868.110.421,00
13	MERTOYUDAN I	158.311.725,00	331.750.856,00	6.279.042,00	16.350.000,00	512.691.623,00
14	MERTOYUDAN II	111.303.939,00	215.449.817,00	21.450.000,00	11.070.000,00	359.273.756,00
15	TEMPURAN	207.424.984,00	350.530.620,00	76.439.544,00	73.070.000,00	707.465.148,00
16	KAJORAN I	117.163.447,00	298.744.051,00	8.814.500,00	2.230.000,00	426.951.998,00
17	KAJORAN II	123.103.288,00	236.597.873,00	12.307.000,00	9.980.000,00	381.988.161,00
18	KALIANGKRIK	250.773.289,00	567.139.088,00	13.104.500,00	730.000,00	831.746.877,00
19	BANDONGAN	314.135.789,00	522.636.346,00	84.612.369,00	8.730.000,00	930.114.504,00
20	CANDIMULYO	166.590.297,00	346.963.049,00	55.443.000,00	28.290.000,00	597.286.346,00
21	PAKIS	248.841.938,00	406.597.744,00	50.708.295,00	6.070.000,00	712.217.977,00
22	NGABLAK	185.929.517,00	230.472.617,00	66.333.625,00	7.400.000,00	490.135.759,00
23	GRABAG I	396.220.995,00	659.945.620,00	112.516.416,00	39.100.000,00	1.207.783.031,00
24	GRABAG II	62.441.458,00	178.834.243,00	17.772.000,00	9.000.000,00	268.047.701,00
25	TEGALREJO	124.830.693,00	159.366.027,00	94.349.688,00	3.150.000,00	381.696.408,00
26	SECANG I	141.465.752,00	330.586.200,00	74.351.600,00	55.730.000,00	602.133.552,00
27	SECANG II	91.472.198,00	419.908.683,00	16.231.950,00	4.240.000,00	531.852.831,00
28	WINDUSARI	137.504.509,00	614.369.437,00	27.055.500,00	11.630.000,00	790.559.446,00
29	KOTA MUNGKID	62.691.760,00	106.257.277,00	17.165.200,00	0,00	186.114.237,00
	JUMLAH BLUD PUSKESMAS	5.274.202.242,00	9.935.919.023,00	1.409.432.214,00	379.380.000,00	16.998.933.479,00
30	RSU	22.899.714.659,00	22.259.887.708,00	2.284.019.506,00	28.948.040,00	53.769.454.872,00
	JUMLAH BLUD	28.173.916.901,00	32.195.806.731,00	3.693.451.720,00	408.328.040,00	70.768.388.351,00

Realisasi Belanja Hibah di SKPD digunakan untuk pemberian hibah dalam bentuk barang kepada pihak ketiga/masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Realisasi Belanja Hibah Barang Tahun 2020 di SKPKD sebesar Rp18.138.942.613,00. Hibah Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.7.**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2020 pada SKPD sebesar Rp431.505.800,00. Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan kepada Pihak ketiga/masyarakat per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.8.**



(3) Belanja Hibah

	Tahun 2020	Tahun 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	58.495.187.500,00	46.064.197.000,00

Realisasi Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2020 sebesar Rp55.687.000.660,00. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2020 digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.30. Realisasi Belanja Hibah

No	Uraian	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	58.495.187.500,00	55.647.760.660,00	95,02	46.064.197.000,00
2	Belanja Hibah Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	0,00	39.240.000,00	0,00	0,00
Jumlah		58.495.187.500,00	55.687.000.660,00	95,02	46.064.197.000,00

Atas realisasi Belanja Hibah selama tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- (a) Realisasi Belanja Hibah di PPKD digunakan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2020 di PPKD sebesar Rp55.647.760.660,00 dengan rincian tabel sebagai berikut :

Tabel 5.31. Realisasi Belanja Hibah Verifikasi SKPD

No	SKPD pemverifikasi	Jumlah hibah	Setor kembali	hibah per 31 Des 2020
1	KESRA	14.655.800.000,00	0,00	14.655.800.000,00
2	TAPEM	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00
3	DISDIKBUD			
	- Umum	0,00	0,00	0,00
	- BOP PAUD	16.680.000.000,00	0,00	16.680.000.000,00
	- Pendidik PAUD	0,00	0,00	0,00
	- BOSDA SMP	1.335.150.000,00	0,00	1.335.150.000,00
	- BOSDA SD	1.340.700.000,00	0,00	1.340.700.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD pemverifikasi	Jumlah hibah	Setor kembali	hibah per 31 Des 2020
	- GTT	5.808.000.000,00	0,00	5.808.000.000,00
	- BOP Kesetaraan :	3.851.300.000,00	0,00	3.851.300.000,00
	- Pemb. PAUD	3.817.987.500,00	0,00	3.817.987.500,00
	- Umum	95.000.000,00	0,00	95.000.000,00
	- KSBN	0,00	0,00	0,00
4	KESBANGPOL	290.000.000,00	0,00	290.000.000,00
5	DPUPR	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
6	DISPARPORA (Umum)			
	- Umum	2.707.270.000,00	0,00	2.707.270.000,00
	- Hotel dan Resto	4.906.553.160,00	0,00	4.906.553.160,00
	Jumlah	55.647.760.660,00	0,00	55.647.760.660,00

(b) Belanja hibah dari CSR uang pada BPBD sebesar Rp39.240.000,00.

(4) Belanja Bantuan Sosial

Tahun 2020		Tahun 2019
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
11.057.135.000,00	10.637.410.000,00	30.198.609.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2020 sebesar Rp10.637.410.000,00 ada pada PPKD dan digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.32. Realisasi Belanja Bantuan Sosial

No	Uraian	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Belanja Bantuan Kepada Anggota Masyarakat	11.057.135.000,00	10.637.410.000,00	96,20	30.198.609.000,00
	Jumlah	11.057.135.000,00	10.637.410.000,00	96,20	30.198.609.000,00

b) Belanja Modal

Tahun 2020		Tahun 2019
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
257.930.375.571,00	214.407.058.402,00	386.529.995.844,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Belanja Modal Tahun 2020 dan 2019 terdiri dari:

Tabel 5.33. Realisasi Belanja Modal

No	Uraian	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Tanah	25.504.338.000,00	5.507.345.948,00	21,59	14.038.662.136,00
2	Peralatan dan Mesin	127.043.001.245,00	119.261.429.185,00	93,87	131.750.646.976,00
3	Gedung dan Bangunan	57.293.134.218,00	50.299.523.649,00	87,79	131.649.038.676,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	40.670.730.325,00	32.195.982.259,00	79,16	91.473.924.357,00
5	Aset Tetap Lainnya	6.587.702.863,00	6.365.747.356,00	96,63	15.782.598.699,00
6	Aset Lainnya (Aset tak berwujud)	831.468.920,00	777.030.005,00	93,45	1.835.125.000,00
	Jumlah	257.930.375.571,00	214.407.058.402,00	83,13	386.529.995.844,00

Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 dan 2019 tersebut termasuk Belanja Modal yang sumber dananya dari BLUD RSUD Muntilan, BLUD UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan

Tabel 5.34. Realisasi Belanja Modal BLUD dan BOS

No	Uraian	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	UPTD Puskesmas	10.942.973.589,00	7.444.102.744,00	68,03	11.374.901.300,00
2	BLUD RSU Muntilan	3.523.151.100,00	3.151.010.569,00	89,44	5.785.421.602,00
3	BOS	21.693.501.916,00	23.110.133.629,00	106,53	24.093.956.807,00
	Subtotal	36.159.626.605,00	33.705.246.942,00	93,21	41.254.279.709,00

Rincian Belanja Modal per SKPD Tahun 2020 dan 2019 secara rinci pada **Lampiran 5.9.**

(1) Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Tahun 2020 dan 2019 terdiri dari:

Tabel 5.35. Realisasi Belanja Modal Tanah

No	Belanja	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	25.504.338.000,00	5.507.345.948,00	21,59	3.321.879.980,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Belanja	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
2	Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	0,00	0,00	0,00	10.716.782.156,00
	Jumlah	25.504.338.000,00	5.507.345.948,00	21,59	14.038.662.136,00

Rincian belanja modal tanah per SKPD Tahun 2020 dan 2019 secara rinci pada **Lampiran 5.10**.

(2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2020 dan 2019 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5.36. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Belanja	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	100.913.600,00	100.650.000,00	99,74	654.098.740,00
2	Pengadaan Alat-alat Bantu	1.903.159.142,00	1.647.619.550,00	86,57	1.026.353.950,00
3	Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	9.729.727.205,00	8.090.790.341,00	83,16	9.396.965.295,00
4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	321.553.550,00
5	Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	249.145.190,00	247.093.000,00	99,18	591.446.400,00
6	Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	2.590.880,00	7.418.000,00	286,31	0,00
7	Pengadaan Alat Ukur	169.550.860,00	164.639.818,00	97,10	1.002.350.166,00
8	Pengadaan Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	167.885.000,00
9	Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	197.645.000,00	242.607.600,00	122,75	189.845.000,00
10	Pengadaan Alat Kantor	517.048.885,00	479.923.399,00	92,82	1.495.748.143,00
11	Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.565.816.870,00	8.143.731.229,00	95,07	11.860.249.410,00
12	Pengadaan Komputer	11.220.444.729,00	9.982.210.515,00	88,96	15.888.546.570,00
13	Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	110.994.800,00	93.313.500,00	84,07	41.360.000,00
14	Pengadaan Alat Studio	1.938.891.000,00	1.863.951.000,00	96,13	5.439.466.242,00
15	Pengadaan Alat Komunikasi	705.558.000,00	696.637.500,00	98,74	182.891.920,00
16	Pengadaan Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	63.936.000,00
17	Pengadaan Alat Kedokteran	2.411.070.975,00	1.989.545.081,00	82,52	8.281.695.109,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Belanja	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
18	Pengadaan Alat Kesehatan	57.039.735.105,00	55.518.022.848,00	97,33	52.159.843.706,00
19	Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	1.298.779.000,00	1.093.126.200,00	84,17	21.152.726,00
20	Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	3.540.000.000,00	2.961.029.393,00	83,64	1.745.493.026,00
21	Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
22	Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	170.150.000,00	169.350.000,00	99,52	0,00
23	Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	0,00	0,00	89.251.500,00
24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	11.279.046.488,00	8.145.157.110,00	72,21	9.613.395.175,00
25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BOS	15.892.733.516,00	17.624.613.101,00	110,90	11.507.619.348,00
	Jumlah	127.043.001.245,00	119.261.429.185,00	93,87	131.750.646.976,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2020 dan 2019 tiap-tiap SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.11**.

(3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2020 dan 2019 tiap-tiap SKPD adalah sebagaimana tabel berikut.:

Tabel 5.37. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Belanja	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tempat Kerja	53.277.744.770,00	47.095.916.396,00	88,40	123.548.211.259,00
2	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	71.634.800,00	68.499.800,00	95,62	227.009.900,00
3	Pengadaan Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00	190.460.000,00
4	Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	0,00	0,00	0,00	150.092.790,00
5	Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	199.900.000,00	199.523.000,00	99,81	304.309.950,00
6	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	3.047.969.998,00	2.376.975.503,00	77,99	6.896.027.127,00
7	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dana BOS	695.884.650,00	558.608.950,00	80,27	332.927.650,00
	Jumlah	57.293.134.218,00	50.299.523.649,00	87,79	131.649.038.676,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2020 dan 2019 tiap-tiap SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.12**.

(4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020 dan 2019 terdiri dari:

Tabel 5.38. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Belanja	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Pengadaan Jalan	28.616.091.989,00	24.440.389.284,00	85,41	37.833.806.124,00
2	Pengadaan Jembatan	995.055.711,00	973.913.940,00	97,88	37.592.606.410,00
3	Pengadaan Bangunan Air Irigasi	7.997.068.100,00	5.376.968.470,00	67,24	14.182.711.633,00
4	Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	5.528.000,00	2.997.470,00	54,22	1.163.339.590,00
5	Pengadaan Bangunan Air Kotor	656.000.000,00	653.258.000,00	99,58	66.387.500,00
6	Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	10.421.520,00	10.420.000,00	99,99	0,00
7	Pengadaan Instalasi Air Kotor	146.165.290,00	146.145.265,00	99,99	0,00
8	Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	1.932.404.050,00	367.467.930,00	19,02	0,00
9	Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
10	Pengadaan Instalasi Pengaman	203.923.000,00	177.586.200,00	87,08	0,00
11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLUD	98.072.665,00	36.835.700,00	37,56	635.073.100,00
	Jumlah	40.670.730.325,00	32.195.982.259,00	79,16	91.473.924.357,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020 dan 2019 tiap SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.13**.

(5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2020 dan 2019 terdiri dari:

Tabel 5.39. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Belanja	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Pengadaan Buku	1.139.159.000,00	1.123.506.528,00	98,63	2.814.459.390,00
2	Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	7.485.000,00
3	Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	124.887.575,00	101.910.000,00	81,60	6.500.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Belanja	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
4	Pengadaan Tanaman	54.450.000,00	54.450.000,00	100,00	198.940.000,00
5	Pengadaan Aset Tetap Renovasi	123.287.000,00	122.824.250,00	99,62	485.977.000,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BLUD	41.035.538,00	36.145.000,00	88,08	15.827.500,00
7	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Dana BOS	5.104.883.750,00	4.926.911.578,00	96,51	12.253.409.809,00
	Jumlah	6.587.702.863,00	6.365.747.356,00	96,63	15.782.598.699,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2020 dan 2019 tiap SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.14**.

(6) Belanja Modal Aset Tak Berwujud

Belanja Modal Aset Tak Berwujud Tahun 2020 dan 2019 terdiri dari:

Tabel 5.40. Realisasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud

No	Uraian	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Aset Tak Berwujud Lainnya	831.468.920,00	777.030.005,00	93,45	1.835.125.000,00
	Jumlah	831.468.920,00	777.030.005,00	93,45	1.835.125.000,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud Tahun 2020 sebesar Rp777.030.005,00 berupa software dan Kajian untuk Realisasi Tahun 2019 sebesar Rp1.835.125.000,00. Realisasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud tiap SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.15**.

c) Belanja Tak Terduga

Tahun 2020		Tahun 2019
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
138.279.351.079,00	64.637.965.303,00	73.755.000,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Tak Terduga periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Rincian dari realisasi belanja tak terduga sebesar Rp64.637.965.303,00 sebagaimana tabel berikut berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 5.41. Realisasi Belanja Tak Terduga

No	Uraian	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Belanja Tak Terduga	138.279.351.079,00	64.637.965.303,00	46,74	73.755.000,00
	Jumlah	138.279.351.079,00	64.637.965.303,00	46,74	73.755.000,00

Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp64.637.965.303,00 sebagai berikut:

Tabel 5.42. Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga

No.	Uraian	Realisasi
1	BTT penanganan sementara bencana banjir bandang di Desa Salam Kanci	61.270.000,00
2	Pengembalian kelebihan setor pembayaran retribusi IMTA	10.430.000,00
3	Penanganan tanggap darurat Gunung Merapi	1.777.728.123,00
4	Penanganan Covid-19	62.788.537.180,00
	Jumlah	64.637.965.303,00

Rincian Realisasi belanja Tak Terduga untuk Penanganan Covid-19 sebesar Rp62.788.537.180,00 sebagai berikut:

Tabel 5.43. Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga Penanganan Covid-19

No.	Uraian	Jumlah
1	Belanja Tidak Terduga Penanganan COVID-19 Tahap I TA 2020	584.811.692,00
2	Belanja Tidak Terduga Penanganan COVID-19 Tahap II TA 2020	148.175.000,00
3	Belanja Tidak Terduga Penanganan COVID-19 Tahap III TA 2020	4.691.488.040,00
4	Belanja Tidak Terduga Penanganan COVID-19 Tahap IV TA 2020	1.932.882.017,00
5	Belanja Tidak Terduga Penanganan COVID-19 Tahap V TA 2020	552.800.000,00
6	Belanja Tidak Terduga Penanganan COVID-19 Tahap VI TA 2020	5.405.727.031,00
7	Belanja Tidak Terduga Penanganan COVID-19 Tahap VII TA 2020	3.697.738.511,00
8	Belanja Tidak Terduga Penanganan COVID-19 Tahap VIII TA 2020	87.887.500,00
9	Belanja Tidak Terduga Penanganan COVID-19 Tahap IX TA 2020	918.067.507,00
10	Belanja Tidak Terduga Penanganan COVID-19 Tahap X TA 2020	16.732.843.275,00
11	Belanja Tidak Terduga Penanganan COVID-19 Tahap XII TA 2020	56.348.600,00
12	Belanja Tidak Terduga Penanganan COVID-19 Tahap XIII TA 2020	499.963.809,00
13	Belanja Tidak Terduga Penanganan COVID-19 Tahap XIV TA 2020	23.976.600.000,00
14	Belanja Tidak Terduga Penanganan COVID-19 Tahap XV TA 2020	184.244.250,00
15	Belanja Tidak Terduga Penanganan COVID-19 Tahap XVI TA 2020	493.732.223,00
16	Belanja Tidak Terduga Penanganan COVID-19 Tahap XVII TA 2020	187.059.091,00
17	Belanja Tidak Terduga Penanganan COVID-19 Tahap XVIII TA 2020	19.500.000,00
18	Belanja Tidak Terduga Yang Digunakan Untuk Pembelian Masker N95 1860 (Dinas Kesehatan) Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Magelang.	325.000.000,00
19	Belanja Tidak Terduga Yang Digunakan untuk Pembelian VTM (Virus Transport Media) oleh Dinas Kesehatan Dalam Rangka Penanganan Covid-19 di Kabupaten Magelang.	300.000.000,00
20	Belanja Tidak Terduga Yang Digunakan Untuk Pembelian VTM (Virus Transport Media) oleh Dinas Kesehatan Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Magelang	349.800.000,00
21	Belanja Tidak Terduga Yang Digunakan Untuk Pengadaan Alkes Virus Transport Media (VTM) oleh Dinas Kesehatan Kab. Magelang Dalam Rangka Penanganan Covid-19	657.828.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Uraian	Jumlah
22	Belanja Tidak Terduga Yang Digunakan Untuk Penanganan Covid-19 (Pembelian Masker N-95 oleh Dinas Kesehatan Kab. Magelang)	293.750.000,00
23	Belanja Tidak Terduga Yang Digunakan Untuk Pembelian Masker Bedah (oleh Dinas Kesehatan) Dalam Rangka Penanganan Covid-19 di Wilayah Kab. Magelang.	49.920.000,00
24	Belanja Tidak Terduga Yang Digunakan Untuk Pembelian Masker N-95 Oleh Dinas Kesehatan Dalam Rangka Penanganan Covid-19 di Wilayah Kab. Magelang	621.000.000,00
25	Penambahan belanja atas PPh yang setor ke Kas Negara namun terjadi kesalahan setor ke RKUD dan dilakukan pemindahbukuan atas S3TU /00035/4.04.05.02/2020	445.634,00
26	Pengembalian PPh Pasal 22 Kepada Penyedia (Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Kepatuhan Penanganan Pandemi Covid-19 Pada Pemerintah Kabupaten Magelang TA 2020).	20.925.000,00
	Total	62.788.537.180,00

Rincian realisasi Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Covid- 19 per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.44. Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga Penanganan Covid-19 per SKPD

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	15.923.500,00
2	Dinas Kesehatan	5.680.626.712,00
3	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	6.555.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran	54.849.750,00
5	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	48.898931.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	4.320.164.137,00
7	Dinas Pertanian Dan Pangan	20.071.000,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	950.000,00
9	Dinas Perhubungan	64.635.000,00
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika	362.668.200,00
11	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	180.637.600,00
12	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.832.500,00
13	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga	283.098.400,00
14	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	7.538.732,00
15	Dinas Peternakan Dan Perikanan	54.433.500,00
16	Sekretariat Daerah	136.075.000,00
17	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	30.545.000,00
18	Kecamatan Salaman	117.053.650,00
19	Kecamatan Borobudur	85.412.400,00
20	Kecamatan Ngluwar	113.410.650,00
21	Kecamatan Salam	112.018.150,00
22	Kecamatan Srumbung	115.363.650,00
23	Kecamatan Dukun	115.303.650,00
24	Kecamatan Sawangan	113.761.650,00
25	Kecamatan Muntilan	170.094.650,00
26	Kecamatan Mungkid	226.744.150,00
27	Kecamatan Mertoyudan	168.715.600,00
28	Kecamatan Tempuran	114.462.150,00
29	Kecamatan Kajoran	115.723.650,00
30	Kecamatan Kaliangkrik	115.453.650,00
31	Kecamatan Bandongan	115.273.650,00
32	Kecamatan Candimulyo	115.037.100,00
33	Kecamatan Pakis	113.915.050,00
34	Kecamatan Ngablak	114.933.650,00
35	Kecamatan Grabag	115.693.650,00
36	Kecamatan Tegalrejo	113.801.250,00
37	Kecamatan Secang	169.628.900,00
38	Kecamatan Windusari	112.352.249,00
39	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	10.325.000,00
40	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah	3.524.000,00
	Jumlah	62.788.537.180,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Penggunaan Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Covid-19 per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.16**.

Realisasi Belanja Tak Terduga Penanganan Tanggap Darurat Gunung Merapi sebesar Rp1.777.728.123,00 terdapat pada 3 (tiga) SKPD yaitu:

- 1) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan realisasi belanja sebesar Rp899.229.023,00
- 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan realisasi belanja sebesar Rp806.071.500,00
- 3) Dinas Peternakan Dan Perikanan, dengan realisasi belanja sebesar Rp72.427.600,00

Penggunaan Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Tanggap Darurat Gunung Merapi per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.17**.

3) Transfer

	Tahun 2020	Tahun 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	667.834.913.500,00	667.733.960.699,00
		683.911.889.966,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Transfer periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Rincian dari realisasi transfer sebesar Rp667.733.960.699,00 sebagai berikut:

Tabel 5.45. Realisasi Transfer

No	Uraian	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
A	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	21.637.545.500,00	21.634.541.500,00	99,99	18.900.059.265,00
1	Bagi Hasil Pajak	15.686.759.000,00	15.683.755.000,00	99,98	14.130.217.300,00
2	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya (Retribusi)	5.950.786.500,00	5.950.786.500,00	100,00	4.769.841.965,00
B	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	646.197.368.000,00	646.099.419.199,00	99,98	665.011.830.701,00
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	643.897.637.000,00	643.799.688.199,00	99,98	663.934.864.201,00
2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	2.299.731.000,00	2.299.731.000,00	100,00	1.076.966.500,00
	Jumlah	667.834.913.500,00	667.733.960.699,00	99,98	683.911.889.966,00



a) Transfer Bagi Hasil Pendapatan

(1) Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

	Tahun 2020	Tahun 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	15.686.759.000,00	14.130.217.300,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Transfer – Bagi Hasil Pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Rincian Belanja Transfer - Bagi Hasil Pajak sebesar Rp15.683.755.000.00 berdasarkan pada Surat Keputusan Penetapan Bupati Nomor 180.182/98/KEP/13/2020 diubah dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 180.182/362/KEP/2020 sebagai berikut:

Tabel 5.46. Realisasi Bagi Hasil Pajak

No	Belanja	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Kecamatan Salaman	735.747.000,00	732.968.000,00	99,62	651.904.000,00
2	Kecamatan Borobudur	1.542.018.000,00	1.541.793.000,00	99,99	1.373.393.800,00
3	Kecamatan Ngluwar	401.669.000,00	401.669.000,00	100,00	364.445.000,00
4	Kecamatan Salam	628.521.000,00	628.521.000,00	100,00	578.121.000,00
5	Kecamatan Srumbung	831.790.000,00	831.790.000,00	100,00	739.765.000,00
6	Kecamatan Dukun	686.428.000,00	686.428.000,00	100,00	612.696.000,00
7	Kecamatan Sawangan	651.658.000,00	651.658.000,00	100,00	592.984.000,00
8	Kecamatan Muntilan	719.222.000,00	719.222.000,00	100,00	669.783.000,00
9	Kecamatan Mungkid	680.158.000,00	680.158.000,00	100,00	622.634.000,00
10	Kecamatan Mertoyudan	1.168.233.000,00	1.168.233.000,00	100,00	1.069.202.500,00
11	Kecamatan Tempuran	591.942.000,00	591.942.000,00	100,00	540.131.000,00
12	Kecamatan Kajoran	912.836.000,00	912.836.000,00	100,00	824.130.000,00
13	Kecamatan Kaliangkrik	674.030.000,00	674.030.000,00	100,00	599.320.000,00
14	Kecamatan Bandongan	524.678.000,00	524.678.000,00	100,00	479.762.000,00
15	Kecamatan Candimulyo	662.657.000,00	662.657.000,00	100,00	581.019.000,00
16	Kecamatan Pakis	690.434.000,00	690.434.000,00	100,00	607.597.000,00
17	Kecamatan Ngablak	548.691.000,00	548.691.000,00	100,00	484.443.000,00
18	Kecamatan Grabag	987.163.000,00	987.163.000,00	100,00	895.356.000,00
19	Kecamatan Tegajrejo	705.924.000,00	705.924.000,00	100,00	640.008.000,00
20	Kecamatan Secang	712.414.000,00	712.414.000,00	100,00	624.238.000,00
21	Kecamatan Windusari	630.546.000,00	630.546.000,00	100,00	579.285.000,00
	Jumlah	15.686.759.000,00	15.683.755.000,00	99,98	14.130.217.300,00



Rincian Transfer Bagi Hasil Pajak per Desa sebagaimana **Lampiran 5.18.**

(2) Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

	Tahun 2020	Tahun 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	5.950.786.500,00	5.950.786.500,00
		4.769.841.965,00

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya (Retribusi) Tahun 2020 dan 2019 terdiri dari transfer kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Magelang. Bagi hasil retribusi kepada Pemerintah Provinsi adalah sehubungan dengan pengelolaan Objek Wisata Ketep Pass yang merupakan *sharing* antara Pemerintah Kabupaten Magelang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan pembagian 50:50 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.47. Realisasi Bagi Hasil Pendapatan lainnya (Retribusi)

No	Belanja	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Provinsi, Kabupaten/Kota	1.102.159.000,00	1.102.159.000,00	100,00	1.390.419.865,00
1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Provinsi Jawa Tengah	1.102.159.000,00	1.102.159.000,00	100,00	1.390.419.865,00
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.848.627.500,00	4.848.627.500,00	100,00	3.379.422.100,00
1	Kecamatan Salaman	223.074.030,00	223.074.030,00	100,00	179.809.000,00
2	Kecamatan Borobudur	229.464.793,00	229.464.793,00	100,00	159.856.000,00
3	Kecamatan Ngluwar	70.560.022,00	70.560.022,00	100,00	46.438.000,00
4	Kecamatan Salam	111.808.724,00	111.808.724,00	100,00	94.910.000,00
5	Kecamatan Srumbung	143.436.056,00	143.436.056,00	100,00	96.023.000,00
6	Kecamatan Dukun	125.261.801,00	125.261.801,00	100,00	105.022.000,00
7	Kecamatan Sawangan	1.323.777.441,00	1.323.777.441,00	100,00	507.397.025,00
8	Kecamatan Muntilan	235.300.933,00	235.300.933,00	100,00	435.579.075,00
9	Kecamatan Mungkid	174.338.228,00	174.338.228,00	100,00	112.326.000,00
10	Kecamatan Mertoyudan	176.964.937,00	176.964.937,00	100,00	90.652.000,00
11	Kecamatan Tempuran	141.690.798,00	141.690.798,00	100,00	98.960.000,00
12	Kecamatan Kajoran	235.304.563,00	235.304.563,00	100,00	155.334.000,00
13	Kecamatan Kaliangkrik	165.435.062,00	165.435.062,00	100,00	141.370.000,00
14	Kecamatan Bandongan	129.743.546,00	129.743.546,00	100,00	88.007.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Belanja	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
15	Kecamatan Candimulyo	163.940.175,00	163.940.175,00	100,00	107.209.000,00
16	Kecamatan Pakis	166.762.940,00	166.762.940,00	100,00	125.477.000,00
17	Kecamatan Ngablak	133.159.228,00	133.159.228,00	100,00	114.808.000,00
18	Kecamatan Grabag	373.531.674,00	373.531.674,00	100,00	380.906.000,00
19	Kecamatan Tegalrejo	186.822.787,00	186.822.787,00	100,00	122.101.000,00
20	Kecamatan Secang	175.598.916,00	175.598.916,00	100,00	107.386.000,00
21	Kecamatan Windusari	162.650.846,00	162.650.846,00	100,00	109.852.000,00
Jumlah		5.950.786.500,00	5.950.786.500,00	100,00	4.769.841.965,00

Rincian Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya per Desa adalah sebagaimana **Lampiran 5.19**.

b) Transfer Bantuan Keuangan

(1) Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa merupakan Bantuan Keuangan yang diberikan ke Pemerintahan Desa yaitu terdiri dari Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten Magelang, Dana Desa yang disalurkan Pemerintah Pusat melalui Kas Daerah Kabupaten Magelang, dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Magelang terdiri dari:

Tabel 5.48. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa

No	Belanja	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Bantuan Keuangan kepada Desa / kelurahan Penghasil Sumber Daya Air	838.750.000,00	815.803.019,00	97,26	834.468.391,00
2	Bantuan Keuangan Kepada Desa	391.044.109.000,00	391.044.107.982,00	100,00	383.071.777.000,00
3	Bantuan Keuangan (ADD) ke Desa	204.104.778.000,00	204.104.777.198,00	100,00	198.161.157.416,00
4	Bantuan Keuangan Khusus ke Desa	47.910.000.000,00	47.835.000.000,00	99,84	81.867.461.394,00
Total		643.897.637.000,00	643.799.688.199,00	99,98	663.934.864.201,00

Rincian Transfer Bantuan Keuangan ke Desa per Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 5.49. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa Per Kecamatan

No	Belanja	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Kecamatan Salaman	21.253.812.000,00	21.253.812.000,00	100,00	20.632.388.000,00
2	Kecamatan Borobudur	19.465.606.000,00	19.465.606.000,00	100,00	19.447.049.000,00
3	Kecamatan Ngluwar	7.883.708.000,00	7.883.708.000,00	100,00	7.756.948.000,00
4	Kecamatan Salam	11.724.783.000,00	11.724.783.000,00	100,00	11.217.839.000,00
5	Kecamatan Srumbung	17.035.108.000,00	17.035.108.000,00	100,00	16.504.217.000,00
6	Kecamatan Dukun	15.474.940.000,00	15.474.938.982,00	100,00	14.987.258.000,00
7	Kecamatan Sawangan	17.047.668.000,00	17.047.668.000,00	100,00	16.263.917.000,00
8	Kecamatan Muntilan	13.441.833.000,00	13.441.833.000,00	100,00	12.916.348.000,00
9	Kecamatan Mungkid	14.217.389.000,00	14.217.389.000,00	100,00	13.745.453.000,00
10	Kecamatan Mertoyudan	13.131.842.000,00	13.131.842.000,00	100,00	12.902.025.000,00
11	Kecamatan Tempuran	16.136.990.000,00	16.136.990.000,00	100,00	15.947.053.000,00
12	Kecamatan Kajoran	30.053.326.000,00	30.053.326.000,00	100,00	29.816.020.000,00
13	Kecamatan Kaliangkrik	23.925.127.000,00	23.925.127.000,00	100,00	23.077.162.000,00
14	Kecamatan Bandongan	15.492.467.000,00	15.492.467.000,00	100,00	15.195.070.000,00
15	Kecamatan Candimulyo	19.575.350.000,00	19.575.350.000,00	100,00	19.750.631.000,00
16	Kecamatan Pakis	23.242.633.000,00	23.242.633.000,00	100,00	23.170.162.000,00
17	Kecamatan Ngablak	17.630.156.000,00	17.630.156.000,00	100,00	16.600.632.000,00
18	Kecamatan Grabag	31.487.358.000,00	31.487.358.000,00	100,00	31.313.428.000,00
19	Kecamatan Tegalrejo	20.377.608.000,00	20.377.608.000,00	100,00	20.237.389.000,00
20	Kecamatan Secang	20.091.329.000,00	20.091.329.000,00	100,00	20.257.888.000,00
21	Kecamatan Windusari	22.355.076.000,00	22.355.076.000,00	100,00	21.332.900.000,00
	Jumlah	391.044.109.000,00	391.044.107.982,00	100,00	383.071.777.000,00

Rincian Transfer Dana Desa per Desa dapat dilihat pada **Lampiran 5.20**.

Rincian Transfer Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) ke Desa per Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.50. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Per Kecamatan

No	Belanja	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Kecamatan Salaman	11.314.343.800,00	11.314.343.800,00	100,00	10.936.646.200,00
2	Kecamatan Borobudur	10.975.366.600,00	10.975.366.600,00	100,00	10.393.930.467,00
3	Kecamatan Ngluwar	4.688.363.800,00	4.688.363.800,00	100,00	4.424.172.200,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Belanja	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
4	Kecamatan Salam	6.770.206.200,00	6.770.206.200,00	100,00	6.551.657.200,00
5	Kecamatan Sumbing	9.553.922.600,00	9.553.922.600,00	100,00	9.345.533.600,00
6	Kecamatan Dukun	9.118.661.300,00	9.118.661.300,00	100,00	8.951.161.400,00
7	Kecamatan Sawangan	9.637.265.500,00	9.637.265.500,00	100,00	9.479.433.200,00
8	Kecamatan Muntilan	7.887.446.300,00	7.887.446.300,00	100,00	7.692.892.600,00
9	Kecamatan Mungkid	8.444.445.400,00	8.444.445.400,00	100,00	8.149.311.200,00
10	Kecamatan Mertoyudan	7.512.745.100,00	7.512.745.100,00	100,00	7.465.532.200,00
11	Kecamatan Tempuran	8.093.588.500,00	8.093.588.500,00	100,00	7.807.118.600,00
12	Kecamatan Kajoran	14.354.157.500,00	14.354.156.698,00	100,00	14.056.055.000,00
13	Kecamatan Kaliangkrik	10.510.041.600,00	10.510.041.600,00	100,00	10.321.617.000,00
14	Kecamatan Bandongan	8.133.286.000,00	8.133.286.000,00	100,00	7.893.665.660,00
15	Kecamatan Candimulyo	10.188.859.600,00	10.188.859.600,00	100,00	9.891.227.200,00
16	Kecamatan Pakis	11.488.792.800,00	11.488.792.800,00	100,00	11.106.082.000,00
17	Kecamatan Ngablak	8.376.052.700,00	8.376.052.700,00	100,00	8.029.987.417,00
18	Kecamatan Grabag	15.381.587.600,00	15.381.587.600,00	100,00	15.217.887.400,00
19	Kecamatan Tegalrejo	10.998.980.800,00	10.998.980.800,00	100,00	10.609.951.200,00
20	Kecamatan Secang	10.285.387.400,00	10.285.387.400,00	100,00	9.834.317.872,00
21	Kecamatan Windusari	10.391.276.900,00	10.391.276.900,00	100,00	10.002.977.800,00
	Jumlah	204.104.778.000,00	204.104.777.198,00	100,00	198.161.157.416,00

Rincian Transfer Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa dapat dilihat pada **Lampiran 5.21**.

Rincian Transfer Bantuan Keuangan Khusus per Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.51. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan khusus

No	Belanja	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Kecamatan Salaman	3.562.500.000,00	3.562.500.000,00	100,00	5.592.906.000,00
2	Kecamatan Borobudur	4.481.500.000,00	4.481.500.000,00	100,00	3.416.304.000,00
3	Kecamatan Ngluwar	1.754.000.000,00	1.754.000.000,00	100,00	3.704.197.000,00
4	Kecamatan Salam	863.500.000,00	863.500.000,00	100,00	2.922.676.000,00
5	Kecamatan Sumbing	1.695.000.000,00	1.670.000.000,00	98,53	1.697.300.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Belanja	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
6	Kecamatan Dukun	1.637.000.000,00	1.637.000.000,00	100,00	3.662.866.000,00
7	Kecamatan Sawangan	1.740.500.000,00	1.740.500.000,00	100,00	5.448.726.000,00
8	Kecamatan Muntilan	769.000.000,00	769.000.000,00	100,00	1.886.758.207,00
9	Kecamatan Mungkid	1.011.000.000,00	1.011.000.000,00	100,00	7.239.593.677,00
10	Kecamatan Mertoyudan	2.837.500.000,00	2.837.500.000,00	100,00	6.722.869.210,00
11	Kecamatan Tempuran	2.802.000.000,00	2.752.000.000,00	98,22	3.123.315.800,00
12	Kecamatan Kajoran	3.658.000.000,00	3.658.000.000,00	100,00	3.300.000.000,00
13	Kecamatan Kaliangkrik	2.698.000.000,00	2.698.000.000,00	100,00	3.544.700.000,00
14	Kecamatan Bandongan	1.939.500.000,00	1.939.500.000,00	100,00	1.075.000.000,00
15	Kecamatan Candimulyo	1.437.500.000,00	1.437.500.000,00	100,00	2.162.212.000,00
16	Kecamatan Pakis	3.825.000.000,00	3.825.000.000,00	100,00	9.783.037.500,00
17	Kecamatan Ngablak	2.338.000.000,00	2.338.000.000,00	100,00	3.189.000.000,00
18	Kecamatan Grabag	2.859.000.000,00	2.859.000.000,00	100,00	4.118.000.000,00
19	Kecamatan Tegalrejo	1.586.000.000,00	1.586.000.000,00	100,00	3.219.000.000,00
20	Kecamatan Secang	1.942.500.000,00	1.942.500.000,00	100,00	1.801.000.000,00
21	Kecamatan Windusari	2.473.000.000,00	2.473.000.000,00	100,00	4.258.000.000,00
Jumlah		47.910.000.000,00	47.835.000.000,00	99,84	81.867.461.394,00

Rincian Transfer Bantuan Keuangan Khusus per Desa dapat dilihat pada **Lampiran 5.22.**

(2) Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Tahun 2020		Tahun 2019
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
2.299.731.000,00	2.299.731.000,00	1.076.966.500,00

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Tahun 2020 adalah bantuan keuangan kepada Partai Politik berdasar SK Bupati Nomor: 180.082/138/KEP/47/2020 Tanggal 11 Juni 2020 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Magelang Tahun 2020 sebagaimana pada tabel berikut :



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 5.52. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

No	Belanja	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	548.334.000,00	548.334.000,00	100,00	252.164.000,00
2	Partai Kebangkitan Bangsa	469.272.000,00	469.272.000,00	100,00	218.847.000,00
3	Partai Gerindra	323.268.000,00	323.268.000,00	100,00	181.005.000,00
4	Partai Golongan Karya	232.701.000,00	232.701.000,00	100,00	112.830.500,00
5	Partai Amanat Nasional	152.430.000,00	152.430.000,00	100,00	88.787.000,00
6	Partai Persatuan Pembangunan	215.070.000,00	215.070.000,00	100,00	98.794.000,00
7	Partai Keadilan Sejahtera	175.092.000,00	175.092.000,00	100,00	73.495.000,00
8	Partai Demokrat	91.476.000,00	91.476.000,00	100,00	51.044.000,00
9	Partai Nasional Demokrat	92.088.000,00	92.088.000,00	100,00	0,00
Jumlah		2.299.731.000,00	2.299.731.000,00	100,00	1.076.966.500,00

4) PEMBIAYAAN

Struktur APBD TA 2020 terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan. Anggaran pembiayaan adalah semua transaksi keuangan daerah yang merupakan hak dan kewajiban daerah yang belum terpenuhi pada tahun sebelumnya, termasuk transaksi untuk menutup atau memanfaatkan selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Sumber pembiayaan daerah antara lain:

- Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, transfer dari Dana Cadangan, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali Pembayaran Pajak.
- Pengeluaran Pembiayaan antara lain pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, transfer ke Dana Cadangan, penyertaan modal, pemberian Pinjaman Daerah, dan Pembayaran Pengembalian Pajak.
- Anggaran Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp218.827.197.659,00 dan anggaran Pengeluaran Pembiayaan tahun anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp7.204.000.000,00
- Adapun realisasi pembiayaan Tahun Anggaran 2020 untuk Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp218.814.092.659,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp7.204.000.000,00.

Realisasi Pembiayaan TA 2020 dan 2019 dapat digambarkan dalam tabel berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 5.53. Realisasi Pembiayaan

No	Belanja	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	218.827.197.659,00	218.814.092.659,00	100,00	222.184.974.911,00
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	218.827.197.659,00	218.814.092.659,00	99,99	222.173.574.911,00
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	7.204.000.000,00	7.204.000.000,00	100,00	10.204.000.000,00
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda pada BUMD	7.204.000.000,00	7.204.000.000,00	100,00	10.204.000.000,00
	JUMLAH	211.623.197.659,00	211.610.092.659,00	100,00	211.980.974.911,00

a) Penerimaan Pembiayaan

(1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Pada tahun 2020, penerimaan pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) adalah Rp218.814.092.859,00 atau 99,99% dari anggarannya sebesar Rp218.827.197.659,00.

(2) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp0,00.

(3) Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun 2020 adalah Rp0,00 dan 2019 adalah Rp0,00

(4) Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya

Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya merupakan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah tahun 2020 sebesar Rp0,00 dan tahun 2019 sebesar Rp11.400.000,00

b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

(1) Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan tahun 2020 sebesar Rp0,00 dan tahun 2019 sebesar Rp0,00.



(2) Penyertaan Modal (Investasi) Pemda pada BUMD

Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemda pada BUMD sebesar Rp7.204.000.000,00 secara lebih rinci dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.54. Realisasi Penyertaan Modal (Investasi)

No	Uraian	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	PDAM Tirta Gemilang	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	4.500.000.000,00
2	PT Bank Jawa Tengah	5.704.000.000,00	5.704.000.000,00	100,00	5.704.000.000,00
	Jumlah	7.204.000.000,00	7.204.000.000,00	100,00	10.204.000.000,00

5) SISA ANGGARAN LEBIH (SILPA)

Secara keseluruhan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.55. Sisa Anggaran Lebih (SILPA)

No	Uraian	Realisasi 2020 (Audited) (Rp)	Realisasi 2019 (Audited) (Rp)
a.	Realisasi Pendapatan	2.380.457.680.604,00	2.575.439.825.755,00
b.	Realisasi Belanja dan Transfer	2.304.375.917.161,00	2.568.593.603.007,00
c.	Surplus/Sisa Lebih tahun Berjalan (a-b)	76.081.763.443,00	6.846.222.748,00
d.	Realisasi Pembiayaan		
	1) Penerimaan	218.814.092.659,00	222.184.974.911,00
	2) Pengeluaran	7.204.000.000,00	10.204.000.000,00
	3) Pembiayaan Netto (1 – 2)	211.610.092.659,00	218.827.197.659,00
e.	Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2020	287.691.856.102,00	218.827.197.659,00

Sisa Lebih Perhitungan APBD (SiLPA) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp287.691.856.102,00 yang terdiri atas SiLPA mengikat sebesar Rp80.300.704.337,00 dan SiLPA tidak mengikat sebesar Rp207.391.151.765,00. Rincian SiLPA mengikat Tahun 2020 dijelaskan pada **Lampiran 5.23**.

5.b. PENJELASAN PERUBAHAN SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam proses pelaksanaan APBD Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.56. Penjelasan Perubahan SAL

Uraian	Tahun 2020 (Audited) (Rp)	Tahun 2019 (Audited) (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal	218.827.197.659,00	222.336.981.082,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Tahun 2020 (Audited) (Rp)	Tahun 2019 (Audited) (Rp)
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	218.814.092.659,00	222.173.574.911,00
Sub Total	13.105.000,00	163.406.171,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	287.691.856.102,00	218.827.197.659,00
Sub Total	287.704.961.102,00	218.990.603.830,00
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(13.105.000,00)	(163.406.171,00)
Lain-lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	287.691.856.102,00	218.827.197.659,00

Saldo Anggaran Lebih awal tahun 2020 sebesar Rp218.827.197.659,00 dan tahun 2019 sebesar Rp222.336.981.082,00

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan tahun 2020 sebesar Rp218.814.092.659,00 dan tahun 2019 sebesar Rp222.173.574.911,00 merupakan nilai Penggunaan SILPA pada Laporan Realisasi Anggaran pada tahun berjalan.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2020 sebesar Rp287.691.856.102,00 dan Tahun 2019 sebesar Rp218.827.197.659,00

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar (Rp13.105.000,00) yang merupakan koreksi Silpa Bos terdiri dari:

Saldo Awal Kas BOS	Rp2.933.231.617,00
Koreksi Pencatatan Kelebihan salur tahun 2019	(Rp13.280.000,00)
Koreksi pencatatan SILPA tahun 2019 (kurang catat)	<u>Rp175.000,00</u>
Saldo Awal kas BOS setelah koreksi	Rp2.920.126.617,00

Saldo Anggaran Lebih akhir tahun 2020 sebesar Rp287.691.856.102,00 dan tahun 2019 sebesar Rp218.827.197.659,00 merupakan Saldo Anggaran Lebih akhir pada tahun berjalan.

5.c. PENJELASAN POS – POS NERACA

1) ASET LANCAR

31 Desember 2020

31 Desember 2019

Rp368.852.667.274,60

Rp294.824.172.624,21

Aset Lancar meliputi Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, Beban Dibayar Dimuka dan Persediaan. Rincian aset lancar per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 5.57. Aset Lancar

Aset Lancar	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)	31 Desember 2019 (Audited) (Rp)
Kas di Kas Daerah	243.633.990.241,00	196.367.954.777,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.273.326.030,00	124.504.800,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	49.617.182,00	0,00
Kas di BLUD	36.624.484.899,00	19.457.692.305,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Kas BOS	2.175.397.305,00	2.943.171.436,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	63.349.903.363,48	46.593.739.033,48
Piutang Lainnya	15.887.390.463,50	28.961.609.618,50
Penyisihan Piutang	(25.218.911.053,79)	(21.283.715.218,95)
Beban Dibayar Dimuka	200.637.083,00	248.030.000,00
Persediaan	26.876.831.761,41	21.411.185.873,18
Jumlah	368.852.667.274,60	294.824.172.624,21

Kas dan Setara Kas

31 Desember 2020

Rp287.756.815.657,00

31 Desember 2019

Rp218.893.323.318,00

Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Badan Layanan Umum Daerah, Setara Kas, dan Kas BOS sebagai berikut

Tabel 5.58. Kas dan Setara Kas

No.	Kas dan Setara Kas	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)	31 Desember 2019 (Audited) (Rp)
1.	Kas di Kas Daerah	243.633.990.241,00	196.367.954.777,00
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	5.273.326.030,00	124.504.800,00
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	49.617.182,00	0,00
4.	Kas di BLUD	36.624.484.899,00	19.457.692.305,00
5.	Setara Kas	0,00	0,00
6.	Kas BOS	2.175.397.305,00	2.943.171.436,00
	Jumlah	287.756.815.657,00	218.893.323.318,00

a) Kas di Kas Daerah

31 Desember 2020

Rp243.633.990.241,00

31 Desember 2019

Rp196.367.954.777,00

Adalah saldo kas yang ada pada Bendahara Umum Daerah /Pemegang Kas Daerah per 31 Desember 2020 pada rekening giro Bank Jateng 1.005.02340.1 Sebesar Rp. 243.633.990.241,00.



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

b) Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2020

31 Desember 2019

Rp5.273.326.030,00

Rp124.504.800,00

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah saldo kas yang masih ada di Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa pendapatan yang belum disetorkan ke Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.59. Kas di Bendahara Penerimaan

No	SKPD	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)	31 Desember 2019 (Audited) (Rp)	Tanggal Penyetoran ke RKUD
1.	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	72.500,00	60.850.600,00	5 Januari 2021
2.	Dinas Perhubungan	15.715.200,00	63.654.200,00	4 dan 8 Januari 2021
3.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	2.309.000,00	0,00	4 Januari 2021
4.	Dinas Kesehatan	5.255.229.330,00	0,00	14 Januari 2021
Kas Bendahara Penerimaan		5.273.326.030,00	124.504.800,00	

c) Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2020

31 Desember 2019

Rp49.617.182,00

Rp0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah saldo kas yang masih ada di Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.60. Kas di Bendahara Pengeluaran

No.	Uraian	SKPD	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)	31 Desember 2019 (Audited) (Rp)	Tanggal Penyetoran ke RKUD
1.	Sisa Belanja	1.Kecamatan Sawangan	153.500,00	0,00	22 Januari 2021
2.	Pendapatan Jasa giro yang belum disetor ke RKUD	1. Dinas Kesehatan	49.463.682,00	0,00	1 Februari 2021
Kas Bendahara Pengeluaran			49.617.182,00	0,00	



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

d) Kas di BLUD

31 Desember 2020

31 Desember 2019

Rp36.624.484.899,00

Rp19.457.692.305,00

Adalah saldo kas yang masih ada di BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas Tahun 2020 sebesar Rp36.624.484.899,00 adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.61. Kas Bendahara BLUD

No.	Uraian	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)	31 Desember 2019 (Audited) (Rp)
	Kas di BLUD RSU Muntilan		
1.	Kas Bendahara Penerimaan	7.663.125,00	36.523.585,00
	1. Pendapatan Tunai	7.663.125,00	36.523.585,00
	2. Titipan Pasien	0,00	0,00
2.	Kas Bendahara Pengeluaran	24.692.234.587,00	9.276.341.448,00
	1. Kas Bendahara Pengeluaran BLUD	24.692.234.587,00	9.276.341.448,00
	JUMLAH KAS BLUD RSU Muntilan	24.699.897.712,00	9.312.865.033,00
	Kas di BLUD Puskesmas		
1.	Puskesmas Salaman I	115.753.320,00	277.378.186,00
2.	Puskesmas Salaman II	110.303.115,00	100.093.727,00
3.	Puskesmas Borobudur	608.954.817,00	747.128.746,00
4.	Puskesmas Ngluwar	358.124.000,00	209.367.953,00
5.	Puskesmas Salam	212.645.038,00	59.231.708,00
6.	Puskesmas Srumbung	145.741.525,00	135.285.066,00
7.	Puskesmas Dukun	251.530.189,00	366.099.310,00
8.	Puskesmas Sawangan I	108.998.855,00	169.702.198,00
9.	Puskesmas Sawangan II	203.388.646,00	181.815.526,00
10.	Puskesmas Muntilan I	229.872.543,00	190.015.087,00
11.	Puskesmas Muntilan II	268.658.614,00	175.151.183,00
12.	Puskesmas Mungkid	856.341.670,00	607.464.025,00
13.	Puskesmas Mertoyudan I	161.608.712,00	5.684.594,00
14.	Puskesmas Mertoyudan II	799.627.023,00	516.555.745,00
15.	Puskesmas Tempuran	375.933.695,00	111.706.100,00
16.	Puskesmas Kajoran I	486.742.604,00	288.609.367,00
17.	Puskesmas Kajoran II	155.208.789,00	108.225.973,00
18.	Puskesmas Kaliangkrik	715.754.371,00	534.953.701,00
19.	Puskesmas Bandongan	703.047.981,00	435.639.462,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Uraian	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)	31 Desember 2019 (Audited) (Rp)
20.	Puskesmas Candimulyo	365.417.737,00	18.321.007,00
21.	Puskesmas Pakis	845.547.835,00	784.167.192,00
22.	Puskesmas Ngablak	242.726.443,00	314.992.437,00
23.	Puskesmas Grabag I	957.853.169,00	1.408.640.047,00
24.	Puskesmas Grabag II	183.890.629,00	122.086.638,00
25.	Puskesmas Tegalrejo	186.309.707,00	259.980.841,00
26.	Puskesmas Secang I	1.518.963.964,00	1.333.097.659,00
27.	Puskesmas Secang II	69.756.547,00	202.598.326,00
28.	Puskesmas Windusari	514.845.155,00	396.493.012,00
29.	Puskesmas Kota Mungkid	171.040.494,00	84.342.456,00
	Jumlah Kas BLUD Puskesmas	11.924.587.187,00	10.144.827.272,00
	JUMLAH KAS BLUD	36.624.484.899,00	19.457.692.305,00

e) **Setara Kas**

31 Desember 2020

31 Desember 2019

Rp0,00

Rp0,00

Setara kas (*cash equivalent*) merupakan bagian dari aset lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 s.d 3 bulan tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan persediaan. Setara kas berupa deposito berjangka kurang dari 3 bulan. Saldo kas per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00

e) **Kas BOS**

31 Desember 2020

31 Desember 2019

Rp2.175.397.305,00

Rp2.943.171.436,00

Kas BOS merupakan bagian dari aset lancar yang merupakan sisa penggunaan dana BOS dari 554 SD Negeri dan 59 SMP Negeri yaitu sebesar Rp2.175.397.305,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.62. Kas BOS

No	Nama Sekolah	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)			Jumlah
		SILPA	Utang PFK	Bunga yang harus disetor ke Kasda	
1.	Sekolah Dasar (SD)	683.452.288,00	52.155.777,00	83.714,00	735.691.779,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Nama Sekolah	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)			
		SILPA	Utang PFK	Bunga yang harus disetor ke Kasda	Jumlah
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1.430.656.475,00	9.049.051,00	0,00	1.439.705.526,00
	Kas BOS	2.114.108.763,00	61.204.828,00	83.714,00	2.175.397.305,00

Rincian Kas BOS dapat dilihat pada **Lampiran 5.24**.

f) Investasi Jangka Pendek

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp0,00	Rp0,00

Investasi Jangka Pendek berupa deposito yang jangka waktunya lebih dari 3 bulan. Saldo investasi jangka pendek per 31 Desember 2020 berjumlah Rp0,00

g) Piutang Pendapatan

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp 63.349.903.363,48	Rp46.593.739.033,48

Piutang Pendapatan per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:

Tabel 5.63. Piutang Pendapatan

No.	Jenis Piutang	Nilai tagihan per 31 Desember 2019 (Audited) (Rp)	Penambahan Tahun 2020 (Rp)	Pengurangan Tahun 2020 (Rp)	Nilai tagihan per 31 Desember 2020 (Audited) (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Piutang Pajak	31.761.119.634,48	104.974.752.852,00	100.927.912.989,00	35.807.959.497,48
2	Piutang Retribusi	3.888.172.754,00	256.108.308,00	314.675.288,00	3.829.605.774,00
3	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	32.376.313,00	0,00	32.376.313,00
4	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	6.533.669.015,00	5.300.436.426,00	6.533.669.015,00	5.300.436.426,00
5	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	3.741.444.830,00	17.710.292.553,00	3.741.444.830,00	17.710.292.553,00
6	Piutang pendapatan lainnya	669.332.800,00	0,00	0,00	669.332.800,00
	Jumlah Piutang Pendapatan	46.593.739.033,48	128.273.866.452,00	111.517.702.122,00	63.349.903.363,48

Piutang Pendapatan sejumlah Rp63.349.903.363,48 dapat dikategorikan menjadi piutang lancar, kurang lancar, diragukan tertagih dan macet sebagaimana tabel dalam **Lampiran 5.25**.



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Pencatatan Piutang Transfer dari Pemerintah Pusat berdasarkan pada PMK nomor 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar dan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021.

h) Piutang Lainnya

31 Desember 2020

31 Desember 2019

Rp15.887.390.463,50

Rp28.961.609.618,50

Piutang Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:

Tabel 5.64. Piutang Lainnya

No	Jenis Piutang	Nilai tagihan per 31 Desember 2019 (Audited) (Rp)	Penambahan Tahun 2020 (Rp)	Pengurangan Tahun 2020 (Rp)	Nilai tagihan per 31 Desember 2020 (Audited) (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1.	RSUD Muntian				
1	Retribusi Rawat Inap	1.638.876.667,50	461.582.035,00	282.647.527,00	1.817.811.175,50
	a. Piutang Pasien Umum Tahun 2020	0,00	461.582.035,00	258.985.612,00	202.596.423,00
	b. Piutang Pasien Umum Tahun 2019	212.984.927,00	0,00	18.579.508,00	194.405.419,00
	c. Piutang Pasien Umum Tahun 2018	186.795.805	0,00	1.583.376,00	185.212.429,00
	d. Piutang Pasien Umum Tahun 2017	166.112.071,00	0,00	0,00	166.112.071,00
	e. Piutang Pasien Umum Tahun 2016	163.818.546,00	0,00	3.499.031,00	160.319.515,00
	f. Piutang Pasien Umum Tahun 2015	162.656.226,00	0,00	0,00	162.656.226,00
	g. Piutang Pasien Umum Tahun 2014	81.243.014,50	0,00	0,00	81.243.014,50
	h. Piutang Pasien Umum Th 2013	315.375.636,00	0,00	0,00	315.375.636,00
	i. Piutang Pasien Umum Th 2012	211.840.847,00	0,00	0,00	211.840.847,00
	j. Piutang Pasien Umum Th 2011	77.765.070,00	0,00	0,00	77.765.070,00
	k. Piutang Pasien Umum Th 2007	1.757.875,00	0,00	0,00	1.757.875,00
	l. Piutang Pasien Umum Th 2006	2.177.025,00	0,00	0,00	2.177.025,00
	m. Piutang Pasien Umum Tahun 2005	56.349.625,00	0,00	0,00	56.349.625,00
2	Piutang Jamkesmas/ JKN	27.169.836.183,00	11.374.994.853,00	27.169.836.183,00	11.374.994.853,00
	a. Piutang JKN	26.316.726.569,00	11.374.994.853,00	26.316.726.569,00	11.374.994.853,00
	b. Piutang Jamkesda	853.109.614,00	0,00	853.109.614,00	0,00
3.	Piutang Jamkes Lainnya	0,00	2.435.064.000,00	0,00	2.435.064.000,00
	a. Piutang Jasa Raharja 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. Piutang Covid	0,00	2.435.064.000,00	0,00	2.435.064.000,00
4	Piutang Pemeriksaan laborat parsial	0,00	2.033.000,00	0,00	2.033.000,00
5	Piutang pajak	0,00	2.816.025,00	0,00	2.816.025,00
	Jumlah	28.808.712.850,50	14.276.489.913,00	27.452.483.710,00	15.632.719.053,50
	Dinas Kesehatan				



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Jenis Piutang	Nilai tagihan per 31 Desember 2019 (Audited) (Rp)	Penambahan Tahun 2020 (Rp)	Pengurangan Tahun 2020 (Rp)	Nilai tagihan per 31 Desember 2020 (Audited) (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
3.	Piutang Puskesmas BLUD - BPJS				
	a. BPJS	102.450.768,00	254.671.410,00	102.450.768,00	254.671.410,00
	b. Jamkesda	46.246.000,00	0,00	46.246.000,00	0,00
	c. Jampersal	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00
	Jumlah	152.896.768,00	254.671.410,00	152.896.768,00	254.671.410,00
	Jumlah	28.961.609.618,50	14.531.161.323,00	27.605.380.478,00	15.887.390.463,50

Rincian piutang lainnya di lampiran 5.26.

Rincian piutang per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.65. Piutang per SKPD

No	Jenis Piutang	Nilai tagihan per 31 Desember 2019 (Audited) (Rp)	Penambahan Tahun 2020 (Rp)	Pengurangan Tahun 2020 (Rp)	Nilai tagihan per 31 Desember 2020 (Audited) (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
A	BPPKAD				
	Piutang Pajak	31.761.119.634,48	104.974.752.852,00	100.927.912.989,00	35.807.959.497,48
1	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	310.449.053,00	9.878.864.543,00	9.557.585.826,00	631.727.770,00
2	Pajak Restoran	959.856.600,00	13.569.447.728,00	13.304.010.466,00	1.225.293.862,00
3	Pajak Reklame	317.909.581,48	1.166.078.749,00	1.109.814.945,00	374.173.385,48
4	Pajak Hiburan	36.206.000,00	1.614.629.505,00	1.611.029.293,00	39.806.212,00
5	Pajak Air Tanah	68.021.749,00	773.038.840,00	752.135.620,00	88.924.969,00
6	Pajak Hotel	921.035.937,00	8.736.823.678,00	9.313.371.310,00	344.488.305,00
7	Pajak Parkir	13.492.315,00	790.617.213,00	785.319.312,00	18.790.216,00
8	Piutang PBB	26.020.324.561,00	35.909.070.573,00	31.505.074.451,00	30.424.320.683,00
9	Piutang PPJU	3.113.823.838,00	32.536.182.023,00	32.989.571.766,00	2.660.434.095,00
	Lain-lain PAD yang syah	0,00	32.376.313,00	0,00	32.376.313,00
	Piutang pendapatan bunga deposito	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	31.761.119.634,48	105.007.029.165,00	100.927.912.989,00	35.840.235.810,48
B	RSUD Muntilan				
1.	Retribusi Rawat Inap	1.638.876.667,50	461.582.035,00	282.647.527,00	1.817.811.175,50
	a. Piutang Pasien umum 2020	0,00	461.582.035,00	258.985.612,00	202.596.423,00
	b. Piutang umum tahun 2019	212.984.927,00	0,00	18.579.508,00	194.405.419,00
	c. Piutang Pasien Umum Tahun 2018	186.795.805,00	0,00	1.583.376,00	185.212.429,00
	d. Piutang Pasien Umum Tahun 2017	166.112.071,00	0,00	0,00	166.112.071,00
	e. Piutang Pasien Umum Tahun 2016	163.818.546,00	0,00	3.499.031,00	160.319.515,00
	f. Piutang Pasien Umum Tahun 2015	162.656.226,00	0,00	0,00	162.656.226,00
	g. Piutang Pasien Umum Tahun 2014	81.243.014,50	0,00	0,00	81.243.014,50
	h. Piutang Pasien Umum Th 2013	315.375.636,00	0,00	0,00	315.375.636,00
	i. Piutang Pasien Umum Th 2012	211.840.847,00	0,00	0,00	211.840.847,00
	j. Piutang Pasien Umum Th 2011	77.765.070,00	0,00	0,00	77.765.070,00
	k. Piutang Pasien	1.757.875,00	0,00	0,00	1.757.875,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Jenis Piutang	Nilai tagihan per 31 Desember 2019 (Audited) (Rp)	Penambahan Tahun 2020 (Rp)	Pengurangan Tahun 2020 (Rp)	Nilai tagihan per 31 Desember 2020 (Audited) (Rp)
	Umum Th 2007				
	j. Piutang Pasien Umum Th 2006	2.177.025,00	0,00	0,00	2.177.025,00
	k. Piutang Pasien Umum Tahun 2005	56.349.625,00	0,00	0,00	56.349.625,00
2.	Piutang Jamkesmas/ JKN	27.169.836.183,00	11.374.994.853,00	27.169.836.183,00	11.374.994.853,00
	a. Piutang JKN	26.316.726.569,00	11.374.994.853,00	26.316.726.569,00	11.374.994.853,00
	b. Piutang Jamkesda	853.109.614,00		853.109.614,00	0,00
3.	Piutang Jamkes Lainnya	0,00	2.435.064.000,00	0,00	2.435.064.000,00
	a. Piutang Jasa Raharja 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. Piutang Covid	0,00	2.435.064.000,00	0,00	2.435.064.000,00
4	Piutang Pemeriksaan laborat parsial	0,00	2.033.000,00	0,00	2.033.000,00
5	Piutang pajak	0,00	2.816.025,00	0,00	2.816.025,00
	Jumlah	28.808.712.850,50	14.276.489.913,00	27.452.483.710,00	15.632.719.053,50
C	Dinas Perhubungan				
1	Tunggakan Retribusi Terminal	174.505.600,00	35.062.900,00	7.936.050,00	201.632.450,00
2	Tunggakan Retribusi Parkir	18.810.000,00	0,00	12.520.000,00	6.290.000,00
	Tunggakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.706.000,00	5.043.000,00	4.706.000,00	5.043.000,00
	Jumlah	198.021.600,00	40.105.900,00	25.162.050,00	212.965.450,00
D	Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM				
1	Retribusi Bulanan	491.461.201,00	94.487.428,00	275.075.082,00	310.873.547,00
2	Penempatan pertama	3.045.973.336,00	97.308.111,00	3.225.000,00	3.140.056.447,00
3	Perpanjangan	17.630.000,00	9.460.000,00		27.090.000,00
4	kurang catat pengakuan piutang				-
5	Piutang Retribusi (tagihan sewa dibelakang metro square)	106.958.000,00	0,00		106.958.000,00
	Jumlah	3.662.022.537,00	201.255.539,00	278.300.082,00	3.584.977.994,00
E	Dinas Komunikasi dan Informatika				
1	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	7.284.265,00	0,00	0,00	7.284.265,00
	Jumlah	7.284.265,00	0,00	0,00	7.284.265,00
F	PPKD				
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat lainnya	6.533.669.015,00	5.300.436.426,00	6.533.669.015,00	5.300.436.426,00
1	Piutang bagi hasil pajak	5.972.729.699,00	4.910.917.676,00	5.972.729.699,00	4.910.917.676,00
	Pph 21	3.063.005.467,00	2.853.004.600,00	3.063.005.467,00	2.853.004.600,00
	Pph 25/29	669.820.315,00	275.610.400,00	669.820.315,00	275.610.400,00
	PBB bagi rata	782.615.269,00	265.689.700,00	782.615.269,00	265.689.700,00
	PBB bagian daerah/perkebunan	12.984.972,00	9.188.400,00	12.984.972,00	9.188.400,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Jenis Piutang	Nilai tagihan per 31 Desember 2019 (Audited) (Rp)	Penambahan Tahun 2020 (Rp)	Pengurangan Tahun 2020 (Rp)	Nilai tagihan per 31 Desember 2020 (Audited) (Rp)
	PBB bagian daerah/perhutanan	552.809.345,00	88.143.000,00	552.809.345,00	88.143.000,00
	PBB Sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi	313.564.186,00	440.809.773,00	313.564.186,00	440.809.773,00
	PBB bagian daerah/sector lainnya	60.902.246,00	8.604.300,00	60.902.246,00	8.604.300,00
	PBB biaya pemungutan pajak sektor perkebunan	601.168,00	425.400,00	601.168,00	425.400,00
	PBB biaya pemungutan Pajak sektor perhutanan	21.498.188,00	3.427.500,00	21.498.188,00	3.427.500,00
	PBB biaya pemungutan sektor migas	10.452.000,00	6.035.700,00	10.452.000,00	6.035.700,00
	PBB biaya pemungutan pajak sektor lainnya	2.030.129,00	286.800,00	2.030.129,00	286.800,00
	DBCHT	482.446.414,00	959.692.103,00	482.446.414,00	959.692.103,00
2	Piutang bagi hasil SDA	560.939.316,00	389.518.750,00	560.939.316,00	389.518.750,00
	SDA minyak bumi dan Gas Bumi	308.545.367,00	1.667.400,00	308.545.367,00	1.667.400,00
	SDA Mineral Batubara	448.098,00	45.925,00	448.098,00	45.925,00
	SDA Panas Bumi	17.638.555,00	9.067.150,00	17.638.555,00	9.067.150,00
	SDA kehutanan	60.002.104,00	61.857.275,00	60.002.104,00	61.857.275,00
	SDA perikanan	174.305.192,00	316.881.000,00	174.305.192,00	316.881.000,00
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	3.741.444.830,00	17.710.292.553,00	3.741.444.830,00	17.710.292.553,00
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	2.149.836.934,00	7.357.620.768,00	2.149.836.934,00	7.357.620.768,00
2.	Pajak BBNKB	1.567.620.179,00	3.388.440.269,00	1.567.620.179,00	3.388.440.269,00
3.	Pajak Bahan Bakar KB	4.052.248,00	6.910.010.779,00	4.052.248,00	6.910.010.779,00
4.	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	19.935.469,00	54.220.737,00	19.935.469,00	54.220.737,00
5.	Pajak Rokok	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	10.275.113.845,00	23.010.728.979,00	10.275.113.845,00	23.010.728.979,00
G	Dinas Kesehatan				
1	Piutang Pendapatan (RSD Merah Putih)	0,00	2.470.869,00	0,00	2.470.869,00
2	Piutang Puskesmas BLUD	152.896.768,00	254.671.410,00	152.896.768,00	254.671.410,00
a	BPJS	102.450.768,00	254.671.410,00	102.450.768,00	254.671.410,00
b	Jamkesda	46.246.000,00	0,00	46.246.000,00	0,00
c	Jampersal	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00
	Jumlah	152.896.768,00	257.142.279,00	152.896.768,00	257.142.279,00
H	DPUPR				
	Piutang pendapatan lainnya				
1	Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Excavator) 2003	669.332.800,00	0,00	0,00	669.332.800,00
	Jumlah	669.332.800,00	0,00	0,00	669.332.800,00
I	Dispeterikan				
1	Retribusi pelayanan pasar hewan muntlan	19.764.352,00	3.960.000,00	2.804.156,00	20.920.196,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Jenis Piutang	Nilai tagihan per 31 Desember 2019 (Audited) (Rp)	Penambahan Tahun 2020 (Rp)	Pengurangan Tahun 2020 (Rp)	Nilai tagihan per 31 Desember 2020 (Audited) (Rp)
2	Retribusi pelayanan pasar hewan grabag	1.080.000,00	8.316.000,00	8.409.000,00	987.000,00
	Jumlah	20.844.352,00	12.276.000,00	11.213.156,00	21.907.196,00

i) **Penyisihan Piutang**

31 Desember 2020

31 Desember 2019

(Rp25.218.911.053,79)

(Rp21.283.715.218,95)

Pemerintah Kabupaten Magelang telah menyusun Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang yang diantaranya mengatur tentang kebijakan akuntansi piutang. Piutang daerah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.

Penyisihan kerugian piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang. Umur piutang dihitung sejak timbulnya piutang sampai dengan akhir periode pelaporan. Untuk menentukan besarnya penyisihan pada tiap akhir tahun, SKPD yang memiliki piutang melakukan penatausahaan piutang menurut umur (*aging schedule*) sebagai dasar perhitungan.

Saldo piutang di atas merupakan saldo piutang bersih per 31 Desember 2020 yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah dikurangi dengan penyisihan piutang dengan rincian sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.66. Penyisihan Piutang

NO.	Jenis Piutang	Nilai Tagihan per 31 Desember 2020 (Audited) (Rp)	Penyisihan Piutang	NRV Piutang
1	2	3	4	5
A	Piutang Pendapatan			
1.	Piutang Pajak	35.807.959.497,48	20.595.138.970,44	15.212.820.527,04
2.	Piutang Retribusi	3.829.605.774,00	2.849.500.930,45	980.104.843,55
3.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
4.	Piutang Lain- lain PAD yang Sah	32.276.313,00	0,00	32.276.313,00
5.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.300.436.426,00	0,00	5.300.436.426,00
6.	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	17.710.292.553,00	0,00	17.710.292.553,00
7	Piutang pendapatan lainnya	669.332.800,00	669.332.800,00	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

NO.	Jenis Piutang	Nilai Tagihan per 31 Desember 2020 (Audited) (Rp)	Penyisihan Piutang	NRV Piutang
1	2	3	4	5
	Jumlah Piutang Pendapatan	63.349.903.363,48	24.113.972.700,89	39.235.930.662,59
B	Piutang Lainnya			
1	RSUD Muntian			
1.a	Retribusi Rawat Inap			
	Piutang Pasien Umum tahun 2020	202.596.423,00	0,00	202.596.423,00
	Piutang Pasien Umum Tahun 2019	194.405.419,00	58.321.625,70	136.083.793,30
	Piutang Pasien Umum Tahun 2018	185.212.429,00	55.563.728,70	129.648.700,30
	Piutang Pasien Umum Tahun 2017	166.112.071,00	83.056.035,50	83.056.035,50
	Piutang Pasien Umum Tahun 2016	160.319.515,00	80.159.757,50	80.159.757,50
	Piutang Pasien Umum Tahun 2015	162.656.226,00	81.328.113,00	81.328.113,00
	Piutang Pasien Umum Tahun 2014	81.243.014,50	81.243.014,50	0,00
	Piutang Pasien Umum Th 2013	315.375.636,00	315.375.636,00	0,00
	Piutang Pasien Umum Th 2012	211.840.847,00	211.840.847,00	0,00
	Piutang Pasien Umum Th 2011	77.765.070,00	77.765.070,00	0,00
	Piutang Pasien Umum Th 2007	1.757.875,00	1.757.875,00	0,00
	Piutang Pasien Umum Th 2006	2.177.025,00	2.177.025,00	0,00
	Piutang Pasien Umum Tahun 2005	56.349.625,00	56.349.625,00	0,00
	Jumlah	1.817.811.175,50	1.104.938.352,90	712.872.822,60
1.b	Piutang Jamkesmas/ JKN - Piutang JKN	11.374.994.853,00	0,00	11.374.994.853,00
1.c	Piutang Jamkes Lainnya	2.435.064.000,00	0,00	0,00
	Piutang Jasa Raharja 2020	0,00	0,00	0,00
	Piutang Covid	2.435.064.000,00	0,00	0,00
1.d	Piutang Pemeriksaan Laborat Parsial	2.033.000,00	0,00	0,00
1.e	Piutang Pajak	2.816.025,00	0,00	0,00
	Jumlah	15.632.719.053,50	1.104.938.352,90	14.527.780.700,60
2	Piutang Puskesmas BLUD- BPJS			
	a. BPJS	254.671.410,00	0,00	254.671.410,00
	b. Jamkesda	0,00	0,00	0,00
	c. Jampersal	0,00	0,00	0,00
		254.671.410,00		254.671.410,00
	Jumlah Piutang Lainnya	15.887.390.463,50	1.104.938.352,90	14.782.452.110,60
	Jumlah per 31 Desember 2020	79.237.293.826,98	25.218.911.053,79	54.018.382.773,19

Selanjutnya *Aging schedule* Penyisihan Piutang dapat dilihat pada **Lampiran 5.27.**



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

j) Beban Dibayar di Muka

31 Desember 2020

31 Desember 2019

Rp200.637.083,00

Rp248.030.000,00

Saldo Beban Dibayar di Muka Tahun 2020 sebesar Rp200.637.083,00 terdiri dari:

Tabel 5.67. Beban Dibayar Dimuka

NO	SKPD	Uraian	Periode	Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019 (Audited) (Rp)	Penambahan Tahun 2020 (Rp)	Pengurangan Tahun 2020 (Rp)	Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 (Audited) (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7
1.	DPU &ESDM	Pembayaran sewa tanah periode 2018 sd 2020	5 Tahun	91.910.000,00	181.203.750,00	91.910.000,00	181.203.750,00
2.	Disdagkopukm	Pembayaran sewa tanah PKL Bambu Runcing September 2019 sd Agustus 2024	5 Tahun	138.620.000,00	0,00	119.186.667,00	19.433.333,00
3	Kec., Borobudur	Sewa gedung kecamatan	1 tahun	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	0,00
	Jumlah			248.030.000,00	181.203.750,00	228.596.667,00	200.637.083,00

k) Persediaan

31 Desember 2020

31 Desember 2019

Rp26.876.831.761,41

Rp21.411.185.873,18

Nilai persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 senilai Rp26.876.831.761,41 dan Rp21.411.185.873,18 terdiri atas :

Tabel 5.68. Persediaan

c	Jenis Persediaan	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)	31 Desember 2019 (Audited) (Rp)
1	ATK	1.151.200.055,00	952.415.371,00
2	Cetakan	1.884.026.980,00	1.891.491.148,00
3	Alat Kebersihan	693.494.395,00	256.261.141,00
4	BBM	670.000,00	578.000,00
5	Benda Pos	25.175.950,00	17.601.750,00
6	Alat Listrik	177.410.043,00	154.944.754,00
7	Obat-Obatan	9.121.020.114,21	10.501.678.691,18
8	Alat dan Bahan Lab	1.247.203.680,94	1.333.903.728,00
9	Isi tabung pemadam	4.922.000,00	29.895.000,00
10	Alat Kesehatan	484.679.843,00	0,00
11	Vaksin	305.118.344,00	281.339.782,00
12	Pakan Ternak/ikan	6.100.000,00	3.000.000,00
13	Barang yang akan diserahkan kepada pihak keriga	614.569.000,00	2.508.943.603,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

c	Jenis Persediaan	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)	31 Desember 2019 (Audited) (Rp)
14	Radiologi	180.215.049,00	82.856.230,00
15	Alat Kedokteran	2.391.442.571,26	320.408.503,00
16	Plat Uji/Plaket	142.500.000,00	85.925.000,00
17	Bahan makan pasien	195.797.850,00	1.283.955.473,00
18	Logistik	940.115.731,00	905.692.580,00
19	Sisa Karcis	15.413.200,00	2.027.400,00
20	Bahan Praktek	38.418.900,00	1.346.600,00
21	Sisa Karcis adanya Perda Baru	73.674.594,00	73.674.594,00
22	ATK Penyedia/pengendali keuangan	0,00	442.900,00
23	Barang lainnya	2.659.135.143,00	722.803.625,00
24	Dana BTT COVID 19	3.735.992.950,00	0,00
25	Dana BTT Merapi	776.887.100,00	0,00
26	DAN CSR COVID 19	11.648.268,00	0,00
	JUMLAH	26.876.831.761,41	21.411.185.873,18

Persediaan Merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Dalam system pencatatannya dilakukan dengan menggunakan metode perpetual dan metode periodik.

Nilai persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp26.876.831.761,41. Dengan rincian persediaan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.28.A** dan **Lampiran 5.28.B**

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Adapun barang persediaan rusak/kadaluarsa sudah dikeluarkan dari laporan persediaan senilai Rp251.772.796,34. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 5.29**.

2) INVESTASI JANGKA PANJANG

31 Desember 2020

31 Desember 2019

Rp283.363.261.640,94

Rp277.196.942.571,74

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari Investasi Permanen dan Investasi Non Permanen.

a) Investasi Non Permanen

31 Desember 2020

31 Desember 2019

Rp0,00

Rp0,00

Saldo Investasi non permanen tahun 2020 disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nilai investasi non permanen sampai dengan 31



Desember 2020 sebesar Rp0,00. Nilai tagihan investasi permanen beserta penyisihannya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 5.69. Tagihan Non Investasi Permanen

SKPD	Saldo per 31 Des 2020 (Audited) (Rp)	Saldo per 31 Des 2019 (Audited) (Rp)
Distanpangan	0,00	0,00
Dispeterikan	0,00	0,00
Disdagkop UMKM	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Sedangkan tabel mutasi dari investasi permanen serta keterangan lebih rinci perihal penyisihan masing –masing investasi non permanen dapat dilihat pada **Lampiran 5.30.A** dan **Lampiran 5.30.B**

b) Investasi Permanen

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp283.363.261.640,94	Rp277.196.942.571,74

Termasuk dalam Investasi Permanen adalah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah dan Investasi Permanen Lainnya. Berikut rincian saldo investasi permanen sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Tabel 5.70. Investasi Permanen

No	Nama BUMD	Saldo per 31 Desember 2020 (Audited) (Rp)	Saldo per 31 Desember 2019 (Audited) (Rp)
1	Penyertaan Modal ke BUMD	283.363.261.640,94	277.196.942.571,74
2	Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	283.363.261.640,94	277.196.942.571,74

Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Magelang dijelaskan bahwa:

- (1) Penilaian investasi permanen menggunakan metode biaya (*cost method*) untuk investasi permanen pada perusahaan daerah yang kepemilikannya dibawah 20%;
- (2) Penilaian investasi permanen menggunakan metode ekuitas (*equity method*) untuk investasi permanen pada perusahaan daerah yang kepemilikannya diatas 20%

Penilaian Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Magelang menggunakan metode ekuitas diberlakukan mulai tahun 2011

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp283.363.261.640,94 dan Rp277.196.942.571,74 dengan rincian sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 5.71. Penyertaan Modal ke BUMD

Nama BUMD	Saldo 2019 (Audited) (Rp)	Prosentase kepemilikan per 31 Desember 2020	Penyertaan modal 2020	Saldo 31 Des 2020 (Audited) (Rp)
1	2	3	4	5
Bapas 69	151.087.498.630,00	100,00	0,00	150.011.754.743,00
PDAU	3.343.544.231	100,00	0,00	3.113.434.828,00
PDAM	69.444.071.291,00	100,00	1.500.000.000,00	71.446.741.961,00
Bank Jateng	33.592.000.000,00	1,02	5.704.000.000,00	39.296.000.000,00
BKK Muntilan	14.549.828.419,74	49,00	0,00	14.315.330.108,94
BKK Jateng	4.900.000.000,00	1,42	0,00	4.900.000.000,00
PRPP	280.000.000,00	0,56	0,00	280.000.000,00
Jumlah	277.196.942.571,74		7.204.000.000,00	283.363.261.640,94

Sedangkan rincian kertas kerja Investasi Permanen Penyertaan Modal ke BUMD dapat dilihat pada **Lampiran 5.31**.

(2) Investasi Permanen Lainnya

Nilai Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp0,00

3) ASET TETAP

31 Desember 2020

31 Desember 2019

Rp2.742.546.446.841,50

Rp2.666.869.597.674,68

Aset tetap tahun 2019 sebesar Rp2.666.869.597.674,68 dan tahun 2020 sebesar Rp2.742.546.446.841,50 Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5.72. Daftar Aset Tetap Per Kelompok Barang

No	Uraian Jenis Barang	31 Desember 2019 (Audited) (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
A.	Tanah	636.123.001.364,00	22.795.218.953,00	4.044.078.671,00	654.874.141.646,00
B.	Peralatan Dan Mesin	678.220.691.293,00	129.072.047.252,00	1.225.637.968,00	806.067.100.577,00
C.	Gedung Dan Bangunan	1.454.609.233.748,00	322.608.590.566,00	281.316.659.652,00	1.495.901.164.662,00
D.	Jalan Irigasi & Jaringan	1.491.832.021.332,00	329.395.337.318,00	277.183.507.935,00	1.544.043.850.715,00
E.	Aset Tetap Lainnya	127.910.661.545,00	8.808.845.371,00	0,00	136.719.506.916,00
F.	Konstruksi Dlm Pengerjaan	147.240.191.986,00	3.231.283.380,00	10.889.179.500,00	139.582.295.866,00
G.	Akumulasi Penyusutan	(1.869.066.203.593,32)	(529.148.305.736,23)	(363.572.895.789,05)	(2.034.641.613.540,50)
	Total Nilai	2.666.869.597.674,68	286.763.017.103,77	211.086.167.936,95	2.742.546.446.841,50



a) Tanah

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp654.874.141.646,00	Rp636.123.001.364,00

Tanah senilai Rp636.123.001.364,00 dan Rp654.874.141.646,00 merupakan nilai tanah per 31 Desember 2019 dan 2020.

Ada kenaikan nilai sebesar Rp18.751.140.282,00 pada akun tanah di Kabupaten Magelang diakibatkan oleh akumulasi penambahan dan pengurangan nilai tanah diantaranya adalah:

1. Penambahan dari pembelian pada SKPD DPUPR senilai RP 5.412.004.448,00 dan BPBD senilai Rp40.406.000,00
2. Penambahan atas reklas masuk pada BPPKAD senilai Rp187.840.000,00 dan hibah dari masyarakat di Dinas Pendidikan senilai Rp264.700.000,00
3. Penambahan atas biaya pensertifikatan tanah senilai Rp269.233.980,00 pada SKPD Kel. Sawitan 18 bidang tanah, Kel. Mendut 1 bidang tanah, Kel. Sumberrejo 15 bidang tanah, DISDIKBUD I bidang tanah, DPRKP 1 bidang tanah dan DPU PR 31 ruas jalan.
4. Penambahan atas dua tanah jalan Kabupaten Magelang pada SKPD DPUPR senilai Rp995.000.000,00
5. Penambahan atas data tanah jalan komplek Kelurahan senilai Rp15.356.800.545,00 pada SKPD Kel. Sawitan 37 bidang tanah, Kel. Mendut 24 bidang tanah, Kel. Sumberrejo 65 bidang tanah, Kel. Muntilan 32 bidang tanah dan Kel. Secang 52 bidang tanah.
6. Berkurangnya nilai tanah sebesar 3.774.844.691,00 pada neraca karena ada penghapusan tanah di Kabupaten Magelang yaitu tanah Hunian tetap yang dihibahkan ke masyarakat terdampak bencana di Margoyoso Kec. Salaman dan Kec. Windusari.

Di tahun 2020, ada satu bidang tanah yang berlokasi di Jalan Kartini Magelang yang informasinya juga dicatat sebagai Aset Pemerintah Kota Magelang. Pada lahan tersebut digunakan untuk kantor Pemerintahan Kabupaten yaitu Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang.

Saldo Aset Tanah per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.32**.

b) Peralatan dan Mesin

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp806.067.100.577,00	Rp678.220.691.293,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing senilai Rp806.067.100.577,00 dan Rp678.220.691.293,00 dan terdiri dari:

Tabel 5.73. Daftar Peralatan dan Mesin Tahun 2020 dan 2019

No	Objek Barang	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)	31 Desember 2019 (Audited) (Rp)
1	Alat Besar	32.850.889.075,00	30.172.696.824,00
2	Alat Angkutan	121.143.125.998,00	112.696.147.468,00
3	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	8.779.909.212,00	7.604.334.844,00
4	Alat Pertanian	3.658.419.445,00	3.433.685.373,00
5	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	220.783.403.479,00	199.039.283.194,00
6	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar	30.860.771.917,00	26.885.215.236,00
7	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan	201.266.471.427,00	143.446.379.272,00
8	Alat Laboratorium	41.614.220.407,00	36.951.509.463,00
9	Alat Persenjataan	922.996.570,00	917.397.118,00
10	Alat Komputer	138.686.764.314,00	117.074.042.501,00
11	Alat Eksplorasi	3.503.500,00	0,00
12	Alat Pengeboran	0,00	0,00
13	Alat Produksi, Pengelolaan Dan Pemurnian	0,00	0,00
14	Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00
15	Alat Keselamatan Kerja	23.918.903,00	0,00
16	Alat Peraga	0,00	0,00
17	Peralatan Proses/Produksi	9.014.500,00	0,00
18	Rambu Rambu	5.356.609.830,00	0,00
19	Peralatan Olah Raga	107.082.000,00	0,00
	Jumlah	806.067.100.577,00	678.220.691.293,00

- Penambahan atas Belanja APBD untuk Peralatan dan Mesin sebesar Rp119.829.159.710,00 berasal pada 34 SKPD.
- Penambahan berupa Hibah Peralatan dan Mesin sebesar Rp755.688.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial serta Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pendidikan dan Budaya.
- Penambahan karena reklas masuk Peralatan dan Mesin Rp2.804.744.412,00 pada DPUPR, BPPKAD, Dinas Peternakan dan Perikanan serta Dinas Perhubungan.
- Pengurangan karena reklas keluar atas barang dihibahkan di BPPKAD senilai Rp311.200.000,00 dan pembelian barang pakai habis dengan anggaran belanja modal di Dinas Perhubungan senilai Rp914.437.968,00
- Penambahan karena reklas koreksi kode barang masuk di Peralatan Mesin dari gedung dan bangunan senilai Rp5.509.253.896,00 pada DISDIKBUD, DPUPR, BPBD, DISHUB, DISPARPORA dan penambahan dari Jalan Irigasi Jaringan senilai Rp. 72.701.234,00 pada DLH, DISKOMINFO, DPMPTSP, DISPARPORA, Kecamatan Mertoyudan.
- Penambahan berupa Hibah dari Pusat di Peralatan Mesin sebesar Rp100.500.000,00 pada RSUD MUNTILAN

bahwa di Kabupaten Magelang pada tahun 2019 mendapat bantuan barang berupa BUS sejumlah 4 buah. Bantuan berasal dari Kementerian Perhubungan. Sesuai dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan nomor KU.003/56/I/BASTO-AO/BS/SATKER-DAMM/2019 barang tersebut masih



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

harus dicatat di daftar Barang Milik Negara, dan karena sampai dengan saat ini belum ada hibah resmi dari Kementerian Perhubungan maka Kabupaten Magelang belum mencatat sebagai Barang Milik Daerah

Saldo Aset Peralatan dan Mesin per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.33.**

c) Gedung dan Bangunan

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp1.495.901.164.662,00	Rp1.454.609.233.748,00

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing senilai Rp1.495.901.164.662,00 dan Rp1.454.609.233.748,00 terdiri dari:

Tabel 5.74. Daftar Gedung dan Bangunan Tahun 2020 dan 2019

No	Objek Barang	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)	31 Desember 2019 (Audited) (Rp)
1	Bangunan Gedung	1.480.018.099.370,00	1.442.828.383.635,00
2	Monumen	3.504.779.621,00	10.214.651.459,00
3	Bangunan Menara	473.836.518,00	120.624.530,00
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	11.904.449.153,00	1.445.574.124,00
	Jumlah	1.495.901.164.662,00	1.454.609.233.748,00

Kenaikan nilai pada Gedung dan Bangunan sebesar Rp48.676.880.149,00 selama tahun 2020 karena ada penambahan dan pengurangan yang berasal dari:

1. Penambahan dari pembelian pada:
 - a. DISDIKBUD senilai Rp31.931.333.384,00
 - b. DINKES senilai Rp10.959.483.361,00
 - c. DPUPR senilai Rp1.081.701.384,00
 - d. BPBD senilai Rp18.000.000,00
 - e. DISPERINAKER senilai Rp825.894.646,00
 - f. DISTANPANGAN senilai Rp1.644.717.790,00
 - g. DLH senilai Rp889.199.711,00
 - h. DISHUB senilai Rp251.441.000,00
 - i. DISKOMINFO senilai Rp64.770.000,00
 - j. DISDAGKOP senilai Rp221.108.973,00
 - k. DPMPPTSP senilai Rp43.890.000,00
 - l. DISPARPORA senilai Rp267.356.000,00
 - m. SETDPRD senilai Rp40.443.250,00
 - n. Kecamatan Srumbung senilai Rp19.650.000,00
 - o. Kecamatan Mungkid senilai Rp50.883.400,00
 - p. Kecamatan Mertoyudan senilai Rp63.145.000,00
 - q. Kecamatan Tempuran senilai Rp19.000.000,00
 - r. BAPPEDA senilai Rp122.824.250,00
 - s. BPPKAD senilai Rp162.038.000,00
2. Penambahan Hibah di DISDIKBUD Rp171.661.000,00 dan DISDAGKOP Rp815.918.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

3. Penambahan atas reklas masuk koreksi kode barang dan split anggaran senilai Rp272.994.131.417,00 pada 30 SKPD
4. Penambahan atas reklas keluar koreksi kode barang dan split anggaran senilai Rp281.316.659.652,00 pada 29 SKPD
5. Penambahan atas mutasi masuk senilai Rp80.749.876.768,00 pada 15 SKPD
6. Pengurangan atas mutasi keluar senilai Rp80.749.876.768,00 pada DISDIKBUD, DPUPR, BPPKAD

Saat ini di wilayah Kabupaten Magelang sedang di lakukan pembangunan jalan dan bangunan pendukung akibat dari kebijakan pemerintah pusat terkait dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Informasi yang didapat bahwa nilai bangunan sebesar Rp39.510.218.074 terdiri atas bangunan jalan, Saluran U 50, Pasang Batu, Bronjong, Jembatan, pedestrian serta Lampu Penerangan Jalan Umum.

Pembangunan telah dilaksanakan mulai tahun 2017 sampai dengan saat ini. Dikarenakan sampai saat ini belum ada hibah resmi dari pusat sehingga Kabupaten Magelang belum mencatat bangunan tersebut ke dalam Barang Milik Daerah

Saldo Aset Gedung Bangunan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.34**.

d) Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp1.544.043.850.715,00	Rp1.491.832.021.332,00

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing senilai Rp1.544.043.850.715,00 dan Rp1.491.832.021.332,00 terdiri dari:

Tabel 5.75. Daftar Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2019 dan 2020

No	Objek Barang	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)	31 Desember 2019 (Audited) (Rp)
1	Jalan Dan Jembatan	1.074.282.020.870,00	1.058.364.772.674,00
2	Bangunan Air	439.291.205.660,00	392.102.296.785,00
3	Instalasi	19.593.460.417,00	13.708.191.609,00
4	Jaringan	10.877.163.768,00	27.656.760.264,00
	Jumlah	1.544.043.850.715,00	1.491.832.021.332,00

Kenaikan nilai pada Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp52.211.829.383,00 selama tahun 2020 karena ada penambahan sebagai berikut:

1. Berasal dari belanja APBD sebesar Rp32.786.017.211,00 pada:
 - a. Dinas Pendidikan senilai Rp132.977.000,00
 - b. Dinas Kesehatan senilai Rp1.247.031.110,00
 - c. DPU & PR senilai Rp24.503.773.419,00
 - d. Distanpangan senilai Rp232.391.855,00
 - e. Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp293.482.100,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

- f. Disdagkop senilai Rp47.454.027,00
- g. Sekretariat Daerah senilai Rp177.586.200,00
- h. Kecamatan Muntiran senilai Rp1.171.479.100,00
- i. Kecamatan Mungkid senilai Rp2.169.943.400,00
- j. Kecamatan Mertoyudan senilai Rp1.139.714.000,00
- k. Kecamatan Secang senilai Rp1.660.185.000,00
- l. Inspektorat senilai Rp100.000.000,00
2. Hibah kementerian PUPR senilai Rp3.358.554.394,00
3. Reklas masuk dari KDP yang jadi aset tetap senilai Rp10.081.265.556,00
4. Reklas Masuk Atas Jalan lingkungan sebesar Rp6.417.073.000,00 pada :
 - a. Kec. Mungkid yang berada pada Kelurahan Mendut senilai Rp68.273.000,00 dan pada kelurahan Sawitan senilai Rp1.324.178.000,00
 - b. Kec. Mertoyudan yang berada pada Kel. Sumberejo senilai Rp3.664.947.000,00
 - c. Kec. Secang yang berada pada Kel. Secang senilai Rp1.100.589.000,00
 - d. Kec. Muntiran yang berada pada Kel. Muntiran senilai Rp259.086.000,00
5. Reklas Masuk atas ruas jalan kabupaten yang belum tercatat pada DPUPR Senilai Rp199.210.000,00
6. Reklas keluar karena kode barang lain-lain Senilai Rp630.290.778,000.

Saldo Aset Jalan Jaringan dan Irigasi per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.35.**

e) Aset Tetap Lainnya

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp136.719.506.916,00	Rp127.910.661.545,00

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2020 masing-masing senilai Rp127.910.661.545,00 dan Rp136.719.506.916,00 terdiri dari:

Tabel 5.76. Daftar Aset Tetap Lainnya Tahun 2020 dan 2019

No	Objek Barang	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)	31 Desember 2019 (Audited) (Rp)
1	Bahan Perpustakaan	116.900.426.199,00	109.336.749.664,00
2	Barang Bercorak Keseniaan/Kebudayaan/Olah Raga	18.076.581.826,00	16.911.512.990,00
3	Hewan	0,00	0,00
4	Biota Perairan	0,00	0,00
5	Tanaman	1.742.498.891,00	1.662.398.891,00
6	Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00
7	Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00
	Jumlah	136.719.506.916,00	127.910.661.545,00

Kenaikan nilai pada Aset tetap lainnya sebesar Rp8.808.845.371.00,00 selama tahun 2020 karena ada penambahan yang berasal dari belanja APBD sebesar Rp8.789.834.971,00, hibah masuk senilai Rp200.400,00 serta reklas masuk senilai Rp18.810.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Saldo Aset Tetap Lainnya per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.36**.

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp139.582.295.866,00	Rp147.240.191.986,00

Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp147.240.191.986,00 dan Rp139.582.295.866,00 merupakan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2019 dan 2020.

Ada penurunan nilai sebesar Rp7.657.896.120,00 yang berasal dari akumulasi penambahan dan pengurangan pada Konstruksi Dalam Pengerjaan diantaranya adalah:

1. Penambahan atas Belanja Modal senilai Rp991.943.180,00
2. Penambahan atas Belanja Jasa Konsultasi senilai Rp970.290.500,00 pada SKPD DINKES, DISDAGKOP, dan SETDA
3. Penambahan atas biaya sertifikasi tanah senilai Rp1.269.049.700,00 pada SKPD BPBD, DPU PR dan BPPKAD
4. Pengurangan karena reklas ke aset tetap senilai Rp10.889.179.500,00 pada SKPD DPUPR dan DISPARPORA.

Tabel 5.77. Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	SKPD	31 Desember 2019 (Audited) (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	DISDIKBUD	0,00	119.680.000,00	0,00	119.680.000,00
2	DINKES	0,00	255.843.400,00	0,00	255.843.400,00
3	DPUPR	145.536.368.561,00	619.693.000,00	9.999.724.101,00	136.056.337.460,00
4	DPRKP	0,00	239.449.780,00	0,00	239.449.780,00
5	DISPERINAKER	17.036.000,00	27.310.000,00	0,00	44.346.000,00
6	DLH	106.043.186,00	0,00	0,00	106.043.186,00
7	DISHUB	99.672.000,00	0,00	0,00	99.672.000,00
8	DISDAGKOP	205.482.000,00	777.348.500,00	0,00	982.830.500,00
9	DISPARPORA	1.275.590.239,00	0,00	889.455.399,00	386.134.840,00
10	SETDA	0,00	22.909.000,00	0,00	22.909.000,00
11	BPBD	0,00	103.355.520,00	0,00	103.355.520,00
12	BPPKAD	0,00	1.065.694.180,00	0,00	1.919.077.000,00
	JUMLAH	147.240.191.986,00	3.231.283.380,00	10.889.179.500	139.582.295.866,00

Saldo Aset Jalan Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.37.A** dan **Lampiran 5.37.B**.



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

- e. Beban penyusutan Peralatan dan Mesin tahun berjalan sebesar Rp94.362.938.458,74 pada 48 SKPD.
Pengurangan Akumulasi Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.141.290.989,09 berasal dari :
 - f. Mutasi keluar berkurang sebesar Rp3.028.790.989,09 pada 16 SKPD.
 - g. Usulan penghapusan kendaraan sebesar Rp112.500.000,00 pada SKPD BPPKAD.
2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
- Penambahan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp117.751.781.529,28 berasal dari :
- a. Mutasi masuk bertambah sebesar Rp3.701.502.615,28 pada 13 SKPD yaitu: DISDIKBUD, DINKES, DINSOS, DISPERMADES, DISDAGKOP, DPMPTSP, DISPAPORA, DISPUSPA, Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Kaliangkrik, Kecamatan Bandongan, BAPPEDA, dan BPPKAD.
 - b. Reklas masuk karena koreksi kode barang lain-lain sebesar Rp79.592.166.558,55 pada 29 SKPD.
 - c. Koreksi tambah sebesar Rp1.213.506.448,94 hasil dari split nilai Bangunan Gedung Pasar Kaliangkrik pada SKPD DPU PR.
 - d. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun berjalan sebesar Rp33.244.605.906,51 pada 48 SKPD.
Pengurangan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp137.139.483.292,79 berasal dari :
 - e. Mutasi keluar berkurang sebesar Rp3.701.502.615,28 pada 3 SKPD yaitu: DISDIKBUD sebesar Rp888.222.761,14, DPU PR sebesar Rp2.150.287.045,50 dan BPPKAD sebesar Rp662.992.808,64.
 - f. Usulan Penghapusan Bangunan gedung sebesar Rp595.235.667,14 pada SKPD BPPKAD.
 - g. Reklas keluar karena koreksi kode barang lain-lain sebesar Rp131.537.446.987,69 pada 29 SKPD.
 - h. Koreksi kurang untuk split nilai Bangunan gedung Pasar Kaliangkrik sebesar Rp1.305.298.022,68 pada SKPD DPU PR
3. Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan
- Penambahan Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp310.524.622.123,83 berasal dari :
- a. Mutasi masuk bertambah sebesar Rp712.404.308,01 pada 5 SKPD yaitu: DISDAGKOP, DPMPTSP, DISPAPORA, DISPUSPA, Kecamatan Kaliangkrik.
 - b. Koreksi tambah atau Inventaris Jalan di Kelurahan sebesar Rp4.271.721.100,00 yaitu pada Kecamatan Muntilan senilai Rp151.437.900,00, Kecamatan Mungkid senilai Rp148.931.000,00, Kecamatan Mertoyudan senilai Rp3.014.030.600,00, dan Kecamatan Secang senilai Rp957.321.600,00.



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

- c. Koreksi tambah atau inventaris Jalan Kabupaten (Ruas Jalan Bledar-Tirto) yang belum tercatat sebesar Rp99.605.000,00 pada SKPD DPU PR.
 - d. Reklas masuk karena koreksi kode barang lain-lain sebesar Rp158.208.279.828,07 pada 26 SKPD.
 - e. Hibah dari Kementerian PUPR sebesar Rp306.340.086,60 berupa Sumur Bor dan kelengkapannya dengan tahun perolehan 2015, 2016, 2018 pada SKPD DPU PR.
 - f. Koreksi tambah hasil split nilai Bangunan gedung pasar kaliangkrik sebesar Rp2.721.776.091,88 pada SKPD DPU PR.
 - g. Koreksi tambah hasil dari kapitalisasi peningkatan jalan yang masih berdiri sendiri sebesar Rp60.657.746.220,90 pada SKPD DPU PR.
 - h. Beban penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan tahun berjalan sebesar Rp83.546.749.488,37 pada 31 SKPD.
Pengurangan Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp223.292.121.507,17 berasal dari :
 - i. Mutasi keluar berkurang sebesar Rp2.770.210.705,51 pada SKPD DPU PR.
 - j. Reklas keluar karena koreksi kode barang lain-lain sebesar Rp162.418.422.211,70 pada 27 SKPD.
- Koreksi kurang (-) Jalan dan Peningkatan Jalan yang masih berdiri sendiri untuk di kapitalisasi sebesar Rp. 58.103.488.589,96 pada SKPD DPU PR

4) DANA CADANGAN

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp0,00	Rp0,00

Dana Cadangan merupakan dana yang dicadangkan untuk tujuan tertentu. Tahun 2020 saldo dana cadangan Rp0,00

5) ASET LAINNYA

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp34.815.462.131,41	Rp31.738.727.701,39

Tabel 5.79 Daftar Aset Lainnya

No	Jenis	Saldo 31 Desember 2020 (Audited) (Rp)	Saldo 31 Desember 2019 (Audited) (Rp)
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.964.640.000,00	1.964.640.000,00
2	Aset Tak Berwujud	15.844.033.482,00	14.204.015.977,00
3	Aset Lain-lain	29.441.364.065,66	26.222.777.179,39
4	Akumulasi Amortisasi	(12.434.575.416,25)	(10.652.705.455,00)
ASET LAINYA		34.815.462.131,41	31.738.727.701,39



a) **Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

31 Desember 2020

31 Desember 2019

Rp1.964.640.000,00

Rp1.964.640.000,00

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Bangun Guna Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

Metode kemitraan pemerintah daerah dengan pihak ketiga berdasarkan perjanjian atau *Build Operating Transfer (BOT)*. Kemitraan dengan pihak ketiga dicatat berdasarkan nilai aset milik Pemerintah Kabupaten Magelang yang diserahkan atau dikerjasamakan kepada pihak ketiga dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5.80. Kemitraan dengan Pihak Ketiga (BOT)

Jenis	Luas	Dokumen	Nilai 31 Desember 2020 (Audited) (Rp)
SPBU Terpadu dan Sarana pendukungnya (Eks Kawedanan Salam)	7.550 m ²	Akta Notaris Retno Rochmani. SH No. 04 tgl. 11 Februari 2002	1.017.600.000,00
Metro Square. Mertoyudan	2.120 m ²	Perjanjian Kerjasama No.21 tgl. 28 Nov 2005 No 28 tgl 30 Juni 2006	271.360.000,00
Metro Square. Sumberrejo	6.560 m ²	Perjanjian Kerjasama No.21 tgl. 28 Nov 2005 No 28 tgl 30 Juni 2006	675.680.000,00
Obyek Wisata Taman Rekreasi Kalibening	28.570 m ²	Kontrak Perjanjian No.415.4/44/31/2012. No.235/TIWUMGL/MO/ IX/2012	0,00
Jumlah			1.964.640.000,00

b) **Aset Tak Berwujud**

31 Desember 2020

31 Desember 2019

Rp15.844.033.482,00

Rp14.204.015.977,00

Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersebut merupakan nilai perolehan sebelum dikurangi dengan akumulasi amortisasi Aset Tak Berwujud. Rincian nilai Aset Tak Berwujud tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.81. Aset Tak Berwujud

No	Uraian	31 Desember 2019 (Audited) (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)
1	Software	8.173.080.272,00	861.785.005,00	0,00	9.034.865.277,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	31 Desember 2019 (Audited) (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)
2	Hasil Kajian/penelitian	6.030.935.705,00	778.232.500,00	0,00	6.809.168.205,00
	Jumlah	14.204.015.977,00	1.640.017.505,00	0,00	15.844.033.482,00

Perubahan Nilai Aset Tak Berwujud senilai Rp1.640.017.505,00 berasal dari pembelian/pengembangan aset software senilai Rp861.785.005,00 dan Penambahan Aset Tak Berwujud Kajian dari pembelian senilai Rp778.232.500,00. Rincian Aset tak berwujud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.82. Penambahan Aset Tak Berwujud

No	Nama SKPD	Nama Barang	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Ket
Software				861.785.005,00	
1	DINKES	Sim Rs Mp	2020	602.650.005,00	
2	DINKES	Aplikasi Antrian Bpjs	2020	66.480.000,00	
3	DISDIKBUD	Software Aplikasi Ppdb Sd-Smp	2020	92.900.000,00	
4	DISTANPANGAN	Aplikasi Arcgis	2020	34.980.000,00	
5	DISDUKCAPIL	Sicepat Sistem Informasi Cerdas Kependudukan	2020	15.000.000,00	
6	BPPKAD	SIPKD	2020	49.775.000,00	
Hasil Kajian/Penelitian				778.232.500,00	
1	BAPPEDA	Kajian Penyusunan Profil Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2020	44.825.000,00	
2	BAPPEDA	Kajian Masterplant Pengembangan Kawasan Wisata Simpang Mendut	2020	86.680.000,00	
3	BAPPEDA	Kajian Dampak Pandemi Covid	2020	74.888.000,00	
4	BAPPEDA	Kajian Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid	2020	74.910.000,00	
5	BAPPEDA	Kajian Identifikasi kawasan Perkotaan	2020	29.749.000,00	
6	DPUPR	Desain Irigasi	2020	49.329.000,00	
7	DPUPR	Desain Irigasi	2020	59.139.000,00	
8	DPUPR	Desain Irigasi	2020	53.036.000,00	
9	DPUPR	Desain Jaringan Irigasi	2020	54.461.000,00	
10	DPUPR	Desain Irigasi	2020	54.923.000,00	
11	DLH	Kajian Profiling Mata Air	2020	48.372.500,00	
12	DLH	Kajian Sempadan Sungai Kabupaten Magelang	2020	49.800.000,00	
13	DISPARPORA	Master Plan Sport Centre Stadion	2020	98.120.000,00	
TOTAL PENAMBAHAN ASET TAK BERWUJUD				1.640.017.505,00	

Rincian Aset Tak Berwujud per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.38**.



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Pada tahun 2020 terdapat 8 Aset Tak Berwujud berupa Aplikasi yang sudah tidak dipergunakan pada 7 SKPD dan masih tercatat pada Neraca senilai Rp404.406.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.83 Rincian Aplikasi yang Sudah Tidak Dipergunakan

No.	SKPD	Nama	Tahun Pengadaan	Nilai Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5
1	DPU dan PR	SIM DPU ESDM	2010	2.008.750,00
2	BPPKAD	SIM Keuangan Daerah	2006	40.000.000,00
3	BPPKAD	sim Aplikasi Pengelolaan Kendaraan Dinas	2015	42.655.000,00
4	Inspektorat	Sistem Informasi Pengawasan	2011	24.100.000,00
5	Disdagkop UKM	SIM Pasar	2013	200.908.000,00
6	DLH	SIM Lingkungan Hidup	2001	28.435.000,00
7	BPBD	Website BPBD	2014	17.899.250,00
8	DISDUKCAPIL	SIM Pencatatan Sipil	2011	48.400.000,00
Jumlah				404.406.000,00

Dari nilai aset lainnya per 31 Desember 2020 terdapat penambahan akumulasi amortisasi senilai Rp1.781.869.961,25 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.84 Akumulasi Amortisasi

No.	Uraian Kelompok Barang	Akumulasi Penyusutan 2019 (Audited) (Rp)	Beban Penyusutan 2020 (Rp)	Akumulasi Penyusutan 2020 (Audited) (Rp)
	ASET TAK BERWUJUD			
1	Software	6.215.094.607,00	1.090.644.266,25	7.305.738.873,25
2	Hasil Kajian/penelitian	4.437.610.848,00	691.225.695,00	5.128.836.543,00
	TOTAL NILAI	10.652.705.455,00	1.781.869.961,25	12.434.575.416,25

c) Aset Lain-lain

31 Desember 2020

31 Desember 2019

Rp29.441.364.065,66

Rp26.222.777.179,39

Tabel 5.85. Aset Lain-lain

No	Uraian	31 Desember 2019 (Audited) (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)
1	Nilai Perolehan Aset Lain-lain	49.150.939.035,73	5.082.383.516,00	1.751.296.629,73	52.482.025.922,00
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(22.928.161.856,34)	(192.207.106,00)	(79.707.106,00)	(23.040.661.856,34)
	Nilai Buku Aset Lain-lain (1-2)	26.222.777.179,39	4.890.176.410,00	1.671.589.523,73	29.441.364.065,66

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2020 dan 2019 yang terdiri dari aset yang rusak berat dan barang hilang.

Nilai Aset Lain-Lain per 31 Desember 2020 merupakan nilai buku, yaitu nilai perolehan sebesar Rp52.482.025.922,00 dikurangi akumulasi penyusutan aset lain-lain yang sebelumnya merupakan aset tetap sebesar Rp23.040.661.856,34



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

berada di Dinas Pendidikan dan kebudayaan, Sekretariat Daerah, Inspektorat, DPMPTSP, Distanpangan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dispeterikan, Disperinnaker, Disparpora, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinkes, Satpol PP, Set DPRD, DPU & PR, DLH, DPRKP, Kecamatan Bandongan, Kecamatan Windusari, Kecamatan Kajoran, Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Pakis, Kecamatan Ngablak, Kecamatan Mungkid, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Diskominfo.

Perubahan nilai Aset lain lain dengan nilai buku Rp3.218.586.886,27 diantaranya disebabkan oleh:

1. Penambahan sebesar nilai buku Rp4.890.176.410,00 yang berasal dari :
 - Tanah yang dihibahkan Reklas dari Aset Tetap nilai buku Rp3.774.844.691,00
 - Gedung yang dihibahkan Reklas dari Aset Tetap nilai buku Rp916.631.719,00
 - Peralatan Mesin yang dihibahkan Reklas dari Aset Tetap nilai buku Rp198.700.000,00
- Rp4.890.176.410,00

Adapun perincian penambahan aset lainnya antara lain :

a. Tanah

Tabel 5.86. Penambahan Aset Lainnya Tanah

No	Nama	Alamat	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku (Rp)	SKPD
1	Tanah.Tanah Kampung	Genito Kecamatan Windusari	10.039.006,00	0,00	10.039.006,00	BPPKAD
2	Tanah.Tanah Kampung	Genito Kecamatan Windusari	10.039.006,00	0,00	10.039.006,00	BPPKAD
3	Tanah.Tanah Kampung	Genito Kecamatan Windusari	8.116.644,00	0,00	8.116.644,00	BPPKAD
4	Tanah.Tanah Kampung	Kecamatan Windusari	9.505.017,00	0,00	9.505.017,00	BPPKAD
5	Tanah.Tanah Kampung	Margoyoso Kecamatan Salaman	10.893.390,00	0,00	10.893.390,00	BPPKAD
6	Tanah.Tanah Kampung	Margoyoso Kecamatan Salaman	27.099.979,00	0,00	27.099.979,00	BPPKAD
7	Tanah.Tanah Kampung	Margoyoso Kecamatan Salaman	34.575.835,00	0,00	34.575.835,00	BPPKAD
8	Tanah.Tanah Kampung	Margoyoso Kecamatan Salaman	26.165.497,00	0,00	26.165.497,00	BPPKAD
9	Tanah.Tanah Kampung	Margoyoso Kecamatan Salaman	35.510.317,00	0,00	35.510.317,00	BPPKAD
10	TANAH.LAIN-LAIN (Sawah)	Sumberrejo, Mertoyudan	3.545.500.000,00	0,00	3.545.500.000,00	BPPKAD
11	Tanah. Tanah Usaha (Eks Kel Sumberrejo)	Santan, Sumberrejo	57.400.000,00	0,00	57.400.000,00	BPPKAD
TOTAL			3.774.844.691,00	0,00	3.774.844.691,00	



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

b. Gedung dan Bangunan

Tabel 5.87. Penambahan Aset Lainnya Gedung dan Bangunan

No	Nama	Alamat	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	SKPD
1	Bangunan Gedung.Sarana Pelengkap Permanen	Genito Kecamatan Windusari	107.578.875,00	8.606.310,00	98.972.565,00	BPPKAD
2	Bangunan Gedung.Sarana Pelengkap Permanen	Genito Kecamatan Windusari	107.578.875,00	8.606.310,00	98.972.565,00	BPPKAD
3	Bangunan Gedung.Sarana Pelengkap Permanen	Genito Kecamatan Windusari	107.578.875,00	8.606.310,00	98.972.565,00	BPPKAD
4	Bangunan Gedung.Sarana Pelengkap Permanen	Kecamatan Windusari	107.578.875,00	8.606.310,00	98.972.565,00	BPPKAD
5	Bangunan Gedung.Sarana Pelengkap Permanen	Margoyoso Kecamatan Salaman	113.204.665,00	9.056.373,20	104.148.291,80	BPPKAD
6	Bangunan Gedung.Sarana Pelengkap Permanen	Margoyoso Kecamatan Salaman	113.204.665,00	9.056.373,20	104.148.291,80	BPPKAD
7	Bangunan Gedung.Sarana Pelengkap Permanen	Margoyoso Kecamatan Salaman	113.204.665,00	9.056.373,20	104.148.291,80	BPPKAD
8	Bangunan Gedung.Sarana Pelengkap Permanen	Margoyoso Kecamatan Salaman	113.204.665,00	9.056.373,20	104.148.291,80	BPPKAD
9	Bangunan Gedung.Sarana Pelengkap Permanen	Margoyoso Kecamatan Salaman	113.204.665,00	9.056.373,20	104.148.291,80	BPPKAD
TOTAL			996.338.825,00	79.707.106,00	916.631.719,00	

c. Peralatan Mesin

Tabel 5.88. Penambahan Aset Lainnya Peralatan Mesin

No	Nama	Jenis	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	SKPD
1	Alat Angkutan.Station Wagon L300	Alat Angkutan.Station Wagon L300	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00	BPPKAD
2	Alat Angkutan.Mobil Ambulance Grand Max	Alat Angkutan.Mobil Ambulance Grand Max	198.700.000,00	0,00	198.700.000,00	BPPKAD
TOTAL			311.200.000,00	112.500.000,00	198.700.000,00	

Pengurangan Rp1.671.589.523,73 yang berasal dari :

- (1) Penghapusan aset tanah dengan nilai buku sebesar Rp171.944.691,00 berasal dari SKPD BPPKAD berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor SK Bupati Nomor 180.182/250/KEP/23/2020 Tanggal 7



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Desember 2020 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dan Bangunan Hunian Tetap Di Desa Margoyoso Kecamatan Salaman Dan Desa Genito Kecamatan Windusari Dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.89. Penghapusan Aset Tanah

No	Nama	Alamat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Dasar	SKPD
1	Tanah.Tanah Kampung	Genito Kecamatan Windusari	10.039.006,00	0,00	10.039.006,00	180.182/250/KEP/23/2020 Tgl 30 Desember 2020	BPPKAD
2	Tanah.Tanah Kampung	Genito Kecamatan Windusari	10.039.006,00	0,00	10.039.006,00	180.182/250/KEP/23/2020 Tgl 30 Desember 2020	BPPKAD
3	Tanah.Tanah Kampung	Genito Kecamatan Windusari	8.116.644,00	0,00	8.116.644,00	180.182/250/KEP/23/2020 Tgl 30 Desember 2020	BPPKAD
4	Tanah.Tanah Kampung	Kecamatan Windusari	9.505.017,00	0,00	9.505.017,00	180.182/250/KEP/23/2020 Tgl 30 Desember 2020	BPPKAD
5	Tanah.Tanah Kampung	Margoyoso Kecamatan Salaman	10.893.390,00	0,00	10.893.390,00	180.182/250/KEP/23/2020 Tgl 30 Desember 2020	BPPKAD
6	Tanah.Tanah Kampung	Margoyoso Kecamatan Salaman	27.099.979,00	0,00	27.099.979,00	180.182/250/KEP/23/2020 Tgl 30 Desember 2020	BPPKAD
7	Tanah.Tanah Kampung	Margoyoso Kecamatan Salaman	34.575.835,00	0,00	34.575.835,00	180.182/250/KEP/23/2020 Tgl 30 Desember 2020	BPPKAD
8	Tanah.Tanah Kampung	Margoyoso Kecamatan Salaman	26.165.497,00	0,00	26.165.497,00	180.182/250/KEP/23/2020 Tgl 30 Desember 2020	BPPKAD
9	Tanah.Tanah Kampung	Margoyoso Kecamatan Salaman	35.510.317,00	0,00	35.510.317,00	180.182/250/KEP/23/2020 Tgl 30 Desember 2020	BPPKAD
TOTAL			171.944.691,00	0,00	171.944.691,00		

(2) Penghapusan aset Gedung dan Bangunan dengan nilai buku sebesar Rp916.631.719,00 berasal dari SKPD BPPKAD berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor SK Bupati Nomor 180.182/250/KEP/23/2020 Tanggal 7 Desember 2020 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dan Bangunan



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Hunian Tetap Di Desa Margoyoso Kecamatan Salaman Dan Desa Genito Kecamatan Windusari Dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.90. Penghapusan Aset Gedung dan Bangunan

No	Nama	Alamat	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Dasar	SKPD
1	Bangunan Gedung.Sarana Pelengkap Permanen	Genito Kecamatan Windusari	107.578.875,00	8.606.310,00	98.972.565,00	180.182/250/KEP/23/2020 Tgl 30 Desember 2020	BPPKAD
2	Bangunan Gedung.Sarana Pelengkap Permanen	Genito Kecamatan Windusari	107.578.875,00	8.606.310,00	98.972.565,00	180.182/250/KEP/23/2020 Tgl 30 Desember 2020	BPPKAD
3	Bangunan Gedung.Sarana Pelengkap Permanen	Genito Kecamatan Windusari	107.578.875,00	8.606.310,00	98.972.565,00	180.182/250/KEP/23/2020 Tgl 30 Desember 2020	BPPKAD
4	Bangunan Gedung.Sarana Pelengkap Permanen	Kecamatan Windusari	107.578.875,00	8.606.310,00	98.972.565,00	180.182/250/KEP/23/2020 Tgl 30 Desember 2020	BPPKAD
5	Bangunan Gedung.Sarana Pelengkap Permanen	Margoyoso Kecamatan Salaman	113.204.665,00	9.056.373,20	104.148.291,80	180.182/250/KEP/23/2020 Tgl 30 Desember 2020	BPPKAD
6	Bangunan Gedung.Sarana Pelengkap Permanen	Margoyoso Kecamatan Salaman	113.204.665,00	9.056.373,20	104.148.291,80	180.182/250/KEP/23/2020 Tgl 30 Desember 2020	BPPKAD
7	Bangunan Gedung.Sarana Pelengkap Permanen	Margoyoso Kecamatan Salaman	113.204.665,00	9.056.373,20	104.148.291,80	180.182/250/KEP/23/2020 Tgl 30 Desember 2020	BPPKAD
8	Bangunan Gedung.Sarana Pelengkap Permanen	Margoyoso Kecamatan Salaman	113.204.665,00	9.056.373,20	104.148.291,80	180.182/250/KEP/23/2020 Tgl 30 Desember 2020	BPPKAD
9	Bangunan Gedung.Sarana Pelengkap Permanen	Margoyoso Kecamatan Salaman	113.204.665,00	9.056.373,20	104.148.291,80	180.182/250/KEP/23/2020 Tgl 30 Desember 2020	BPPKAD
TOTAL			996.338.825,00	79.707.106,00	916.631.719,00		



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(3) Pada tahun 2020 terdapat barang persediaan (obat) rusak/kadaluarsa pada dinas kesehatan senilai Rp583.013.113,73 yang sudah dihapuskan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 180.182/445/KEP/23/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penghapusan Obat Rusak/ Obat Kadaluarsa Sampai Tahun 2019 Pada 29 (Dua Puluh Sembilan) Puskesmas dan UPT Instalasi Farmasi dari Daftar Persediaan Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2020.

d) Akumulasi Amortisasi

31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp12.434.575.416,25)	(Rp10.652.705.455,00)

Nilai Akumulasi Amortisasi aset tak berwujud tahun 2020 bertambah Rp1.781.869.961,25 dan amortisasi aset tak berwujud Tahun 2020 menjadi (Rp12.434.575.416,25)

6) KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp21.102.659.627,22	Rp13.672.463.777,19

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Jenis Kewajiban Jangka Pendek antara lain Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Beban, dan Utang Jangka Pendek Lainnya

Tabel 5.91. Rincian Saldo Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	31 Desember 2019 (Audited) (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)
1	Utang PFK	27.729.246,00	325.903.478,00	27.729.246,00	325.903.478,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	1.522.561.528,44	739.822.348,44	1.368.675.277,66	893.708.599,22
3	Utang Beban	3.748.230.281,00	17.318.697.534,00	3.748.230.281,00	17.318.697.534,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	8.373.942.721,75	2.562.477.188,00	8.372.069.893,75	2.564.350.016,00
	Jumlah	13.672.463.777,19	20.946.900.548,44	13.516.704.698,41	21.102.659.627,22

a) Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp325.903.478,00	Rp27.729.246,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Jumlah tersebut merupakan Hutang Perhitungan Pihak Ketiga dari SKPD Disdikbud dan Dinas Kesehatan. Hutang Perhitungan Pihak Ketiga Disdikbud Rp61.204.352,00 dengan rincian Utang Pajak BOS Rp55.140.181,00 dan Titipan Bendahara BOS (Setoran Bendahara ke Bank untuk menghidupkan rekening BOS) Rp6.064.171,00. Hutang Perhitungan Pihak Ketiga Dinas Kesehatan Rp264.699.126,00 dengan rincian Utang Obat RSD Merah Putih Rp105.728.710,00, Bahan Medis Habis Pakai RSD Merah Putih Rp66.949.800,00, Bahan Makanan Pasien RSD Merah Putih Rp50.696.756,00, Kerjasama Rp36.625.460,00, Utang Pajak BLUD Rp110.000,00, Utang Prolanis BLUD Rp4.588.400,00.

Tabel 5.92. Hutang Perhitungan Pihak Ketiga

SKPD	31 Desember 2019 (Audited) (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.939.819,00	61.204.352,00	9.939.819,00	61.204.352,00
Dinas Kesehatan	17.789.427,00	264.699.126,00	17.789.427,00	264.699.126,00
Jumlah	27.729.246,00	325.903.478,00	27.729.246,00	325.903.478,00

b) Pendapatan Diterima Dimuka

31 Desember 2020

31 Desember 2019

Rp893.708.599,22

Rp1.522.561.528,44

Jumlah tersebut terdiri atas Pendapatan Diterima Dimuka dari (8) delapan SKPD yaitu:

Tabel 5.93. Pendapatan Diterima Dimuka

No	SKPD	Pendapatan diterima dimuka Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Penambahan Pendapatan diterima dimuka Tahun 2020 (Rp)	Pengurangan Pendapatan diterima dimuka Tahun 2020 (Rp)	Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2020 (Audited) (Rp)
1	2	4	5	6	7=(4+5-6)
1	RSU Muntian - Pendapatan BLUD	88.078.976,00	0,00	42.821.269,00	45.257.707,00
	Sewa Tanah dan Bangunan	88.078.976,00	0,00	42.821.269,00	45.257.707,00
2	Dinas Perhubungan	89.345.538,00	41.106.991,00	73.508.171,00	56.944.358,00
	a. Retribusi Terminal (Tempat Kegiatan Usaha)	2.684.618,00	31.554.155,00	2.684.618,00	31.554.155,00
	b. Retribusi Izin Trayek (Orang Pribadi)	86.660.920,00	9.552.836,00	70.823.553,00	25.390.203,00
3	BPPKAD	437.700.650,42	362.918.748,56	464.062.066,22	336.557.332,76
	a. Pajak Reklame	362.543.046,36	362.918.748,56	405.933.049,53	319.528.745,39
	b. Retribusi	75.157.604,06	0,00	58.129.016,69	17.028.587,37



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	Pendapatan diterima dimuka Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Penambahan Pendapatan diterima dimuka Tahun 2020 (Rp)	Pengurangan Pendapatan diterima dimuka Tahun 2020 (Rp)	Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2020 (Audited) (Rp)
1	2	4	5	6	7=(4+5-6)
	Pemakaian Kekayaan Daerah				
4	DISPARPORA	10.833.333,33	0,00	10.833.333,33	0,00
	Lain-lain PAD (periode 2/11/2015 sd 2/11/2020)	10.833.333,33	0,00	10.833.333,33	0,00
5	DISDAGKOP UMKM	805.815.135,37	329.537.105,31	742.992.105,11	392.360.135,57
	Retribusi Pelayanan Pasar	805.815.135,37	329.537.105,31	742.992.105,11	392.360.135,57
6	DISPERINAHER	21.000.000,00	0,00	7.000.000,00	14.000.000,00
	Penyewaan Tanah dan Bangunan (periode 01-01-2018 sd 31-12-2022)	21.000.000,00	0,00	7.000.000,00	14.000.000,00
7	DISTANPANGAN	57.541.667,00	0,00	27.458.333,00	30.083.334,00
	Penyewaan Tanah dan Bangunan (periode 2017 sd 2022)	57.541.667,00	0,00	27.458.333,00	30.083.334,00
8	DISPETERIKAN	12.246.228,32	6.259.503,57	0,00	18.505.731,89
	Fasilitasi Pasar atau Pertokoan	12.246.228,32	6.259.503,57	0,00	18.505.731,89
	Jumlah	1.522.561.528,44	739.822.348,44	1.368.675.277,66	893.708.599,22

c) Utang Beban

31 Desember 2020

31 Desember 2019

Rp17.318.697.534,00

Rp3.748.230.281,00

Merupakan jumlah Utang Beban yang sampai tanggal 31 Desember 2020 belum terbayar. Rincian Utang Beban per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.94. Utang Beban

No	Uraian Utang Beban	31 Desember 2019 (Audited) (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Beban Telepon	27.460.000,00	48.395.150,00	27.460.000,00	48.395.150,00
2	Beban Air	57.609.636,00	49.439.000,00	57.609.636,00	49.439.000,00
3	Beban Listrik	238.992.788,00	313.139.155,00	238.992.788,00	313.139.155,00
4	Beban Surat Kabat/Majalah	3.422.500,00	2.470.000,00	3.422.500,00	2.470.000,00
5	Beban Kawat/Faksimili/Internet	37.569.426,00	28.639.849,00	37.569.426,00	28.639.849,00
6	Beban Jasa Adm. Pungutan PPJU	1.452.105.446,00	1.437.405.090,00	1.452.105.446,00	1.437.405.090,00
7	Beban Jasa Transaksi	27.200,00	65.100,00	27.200,00	65.100,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian Utang Beban	31 Desember 2019 (Audited) (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
	Keuangan				
8	Beban Transfer	1.102.158.762,00	12.269.762,00	1.102.158.762,00	12.269.762,00
9	Beban Jasa Pelayanan	0,00	6.165.171.200,00	0,00	6.165.171.200,00
10	Beban Barang dan Jasa BLUD	492.049.306,00	8.961.404.175,00	492.049.306,00	8.961.404.175,00
11	Beban Barang dan Jasa BOS	326.387.698,00	289.718.519,00	326.387.698,00	289.718.519,00
12	Beban Premi Asuransi Kesehatan	0,00	999.888,00	0,00	999.888,00
13	Beban Pegawai	10.447.519,00	9.580.646,00	10.447.519,00	9.580.646,00
	JUMLAH	3.748.230.281,00	17.318.697.534,00	3.748.230.281,00	17.318.697.534,00

Rincian Utang Beban per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.39** dan **Lampiran 5.40**.

d) Utang Jangka Pendek Lainnya

31 Desember 2020

31 Desember 2019

Rp2.564.350.016,00

Rp8.373.942.721,75

Merupakan kewajiban pemda kepada pihak ketiga yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran.

Utang pada pihak ketiga per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.95. Hutang Jangka Pendek Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2019 (Audited) (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2020 (Audited) (Rp)
	Dinas Kesehatan	536.059.815,00	0,00	536.059.815,00	0,00
1	Utang Jamkesda Dinkes ke RSUD Muntilan	536.059.815,00	0,00	536.059.815,00	0,00
	RSUD Muntilan	7.836.010.078,75	0,00	7.836.010.078,75	0,00
1	Utang jasa pelayanan kepada pegawai RSUD Muntilan	7.836.010.078,75	0,00	7.836.010.078,75	0,00
	PPKD	1.872.828,00	2.562.477.188,00	0,00	2.564.350.016,00
1	Utang RSUD Muntilan Ke GAKIN	1.872.828,00	0,00	0,00	1.872.828,00
2	Utang kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	0,00	2.562.477.188,00	0,00	2.562.477.188,00
	Jumlah	8.373.942.721,75	2.562.477.188,00	8.372.069.893,75	2.564.350.016,00



7) KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

31 Desember 2020

31 Desember 2019

Rp0,00

Rp0,00

Pemerintah Kabupaten Magelang pada Tahun 2020 tidak memiliki kewajiban jangka panjang.

8) EKUITAS

31 Desember 2020

31 Desember 2019

Rp3.408.475.178.261,23

Rp3.256.956.976.794,83

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

5.d. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode laporan.

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam:

1. Pendapatan – LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
2. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
3. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
4. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional ;
5. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan
6. Surplus/defisit-LO

Berikut Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Magelang pada Tahun 2020:

Tabel 5.96. Penjelasan Laporan Operasional

Uraian	Realisasi Tahun 2020 (Audited) (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	320.263.897.653,42	395.283.754.991,41	(75.019.857.337,99)	(18,98)
Pendapatan Transfer - LO	1.562.014.980.957,00	1.682.859.163.238,00	(120.844.182.281,00)	(7,18)



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi Tahun 2020 (Audited) (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	118.068.828.201,00	100.723.984.677,75	17.344.843.523,25	17,22
Beban	1.936.965.983.395,68	2.029.224.812.797,57	(92.258.829.401,89)	(4,55)
Surplus/Defisit dari Operasi	63.381.723.415,74	149.642.090.109,59	(86.260.366.693,85)	(57,64)
Surplus / Defisit Non Operasional - LO	(583.013.113,73)	(64.901.499,78)	(518.111.613,95)	798,30
Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa	62.798.710.302,01	149.577.188.609,81	(86.778.478.307,80)	(58,02)
Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	
Beban Luar Biasa - LO	71.700.000,00	73.755.000,00	(2.055.000,00)	(2,79)
Surplus/Defisit Pos Luar Biasa	(71.700.000,00)	(73.755.000,00)	2.055.000,00	(2,79)
Surplus/ Defisit - LO	62.727.010.302 ,01	149.503.433.609,81	(86.776.423.307,80)	(58,04)

Penjelasan atas Laporan Operasional Kabupaten Magelang disajikan sebagai berikut:

1) Pendapatan-LO

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Magelang dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, pada Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5.97. Pendapatan LO

Uraian	Realisasi Tahun 2020 (Audited) (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	320.263.897.653,42	395.283.754.991,41	(75.019.857.337,99)	(18,98)
Pendapatan Transfer - LO	1.562.014.980.957,00	1.682.859.163.238,00	(120.844.182.281,00)	(7,18)
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	118.068.828.201,00	100.723.984.677,75	17.344.843.523,25	17,22
Realisasi Pendapatan - LO	2.000.347.706.811,42	2.178.866.902.907,16	(178.519.196.095,74)	(8,19)

Realisasi Pendapatan LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.000.347.706.811,42 dan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.178.866.902.907,16 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp178.519.196.095,74 atau sebesar (8,19)%.

Masing - masing akun Pendapatan LO dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

PAD-LO ini pada tahun 2020 sebesar Rp320.263.897.653,42 dan tahun 2019 sebesar Rp395.283.754.991,41 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp75.019.857.337,99 atau sebesar (18,98)% dengan rincian sebagai berikut



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 5.98. PAD – LO

Uraian	Realisasi Tahun 2020 (Audited) (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Pendapatan Pajak Daerah - LO	119.664.003.699,14	160.354.333.532,47	(40.690.329.833,33)	(25,38)
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	27.490.760.390,08	23.464.707.091,13	4.026.053.298,95	17,16
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	29.599.683.600,20	36.104.651.432,81	(6.504.967.832,61)	(18,02)
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	143.509.449.964,00	175.360.062.935,00	(31.850.612.971,00)	(18,16)
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	320.263.897.653,42	395.283.754.991,41	(75.019.857.337,99)	(18,98)

Masing-masing nilai jenis PAD-LO Tahun Anggaran 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2020, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada Tahun 2020 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan Tahun 2020. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA.

Pendapatan Pajak Daerah - LO pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp119.664.003.699,14 dan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp160.354.333.532,47 terdapat penurunan sebesar Rp40.690.329.833,33 atau sebesar (25,38)% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.99. Pajak Daerah – LO

Uraian	Realisasi Tahun 2020 (Audited) (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Pajak Hotel - LO	8.736.823.678,00	16.177.110.872,00	(7.440.287.194,00)	(45,99)
Pajak Restoran - LO	13.569.447.728,00	19.408.844.926,00	(5.839.397.198,00)	(30,09)
Pajak Hiburan - LO	1.614.629.505,00	3.938.997.955,00	(2.324.368.450,00)	(59,01)
Pajak Reklame - LO	1.252.483.053,14	1.022.876.419,47	229.606.633,67	22,45
Pajak Penerangan Jalan - LO	32.536.182.023,00	35.696.988.605,00	(3.160.806.582,00)	(8,85)



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi Tahun 2020 (Audited) (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Pajak Parkir - LO	790.617.213,00	1.884.848.283,00	(1.094.231.070,00)	(58,05)
Pajak Air Tanah - LO	773.038.840,00	914.261.052,00	(141.222.212,00)	(15,45)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	9.878.864.543,00	25.050.649.281,00	(15.171.784.738,00)	(60,56)
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	35.909.070.573,00	35.703.259.197,00	205.811.376,00	0,58
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	14.602.846.543,00	20.556.496.942,00	(5.953.650.399,00)	(28,96)
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LO	119.664.003.699,14	160.354.333.532,47	(40.690.329.833,33)	(25,38)

(2) Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Retribusi Daerah - LO terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Magelang didasarkan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besarnya retribusi daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Berikut perda tentang retribusi di Kabupaten Magelang:

- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Pendapatan Retribusi Daerah - LO pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp27.490.760.390,08 dan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp23.464.707.091,13 terdapat kenaikan Rp4.026.053.298,95 atau sebesar 17,16% dengan rincian per obyek sebagai berikut:

Tabel 5.100. Retribusi Daerah – LO

Uraian	Realisasi Tahun 2020 (Audited) (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	15.823.892.511,00	592.197.000,00	15.231.695.511,00	2.572,07
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	432.881.682,00	325.141.000,00	107.740.682,00	33,14
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	469.726.832,00	820.889.500,00	(351.162.668,00)	(42,78)
Retribusi Pelayanan Pasar- LO	3.644.908.146,80	8.839.153.753,16	(5.194.245.606,36)	(58,76)



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi Tahun 2020 (Audited) (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	834.657.500,00	1.013.687.500,00	(179.030.000,00)	(17,66)
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO	740.000,00	1.915.000,00	(1.175.000,00)	(61,36)
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	89.883.500,00	128.095.000,00	(38.211.500,00)	(29,83)
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	1.086.213.318,00	1.152.104.024,00	(65.890.706,00)	(5,72)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	726.499.087,85	1.292.520.284,50	(566.021.196,65)	(43,79)
Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO	28.029.996,43	28.487.105,71	(457.109,28)	(1,60)
Retribusi Terminal - LO	341.106.813,00	483.627.543,57	(142.520.730,57)	(29,47)
Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	700.362.000,00	910.723.800,00	(210.361.800,00)	(23,10)
Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	198.839.000,00	215.805.000,00	(16.966.000,00)	(7,86)
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	1.660.101.146,00	5.690.177.230,00	(4.030.076.084,00)	(70,83)
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	91.519.500,00	111.804.500,00	(20.285.000,00)	(18,14)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	1.244.696.640,00	1.758.277.703,00	(513.581.063,00)	(29,21)
Retribusi Izin Trayek - LO	116.702.717,00	75.276.671,00	41.426.046,00	55,03
Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LO	0,00	24.824.476,19	(24.824.476,19)	(100,00)
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah - LO	27.490.760.390,08	23.464.707.091,13	4.026.053.298,95	17,16

Rincian per obyek dan per SKPD terdapat dalam **Lampiran 5.41**.

**(3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-
LO**

Pendapatan ini adalah PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp29.599.683.600,20 dan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp36.104.651.432,81 sehingga terdapat penurunan Rp6.504.967.832,61 atau sebesar (18,02)% dengan rincian sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 5.101. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Nama BUMD	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA (Rp)	Penyesuaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Rp)	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO (Rp)
Bapas 69	18.406.891.686,00	(1.075.743.887,00)	17.331.147.799,00
PDAU	112.427.800,00	(230.109.403,00)	(117.681.603,00)
PDAM	3.984.492.600,00	502.670.670,00	4.487.163.270,00
Bank Jateng	6.896.787.559,00	0,00	6.896.787.559,00
BKK Muntilan	1.234.382.801,00	(234.498.310,80)	999.884.490,20
PRPP	2.382.085,00	0,00	2.382.085,00
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	30.637.364.531,00	(1.037.680.930,80)	29.599.683.600,20

Rincian perhitungan per BUMD terdapat dalam **Lampiran 5.42**.

(4) Lain-Lain PAD yang Sah -LO

Pendapatan tersebut merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-Lain PAD Yang Sah - LO untuk periode Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp143.509.449.964,00 dan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp175.360.062.935,00 sehingga terdapat penurunan Rp31.850.612.971,00 atau sebesar (18,16)% dengan rincian per obyek sebagai berikut:

Tabel 5.102. Lain-Lain PAD Yang Sah – LO

Uraian	Realisasi Tahun 2020 (Audited) (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	244.818.500,00	125.060.750,00	119.757.750,00	95,76
Penerimaan Jasa Giro - LO	5.947.674.890,00	10.866.974.348,00	(4.919.299.458,00)	(45,27)
Pendapatan Bunga - LO	13.458.093.813,00	19.853.168.014,00	(6.395.074.201,00)	(32,21)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	449.265.779,00	5.853.945.930,00	(5.404.680.151,00)	(92,33)
Pendapatan Denda Pajak - LO	136.362.015,00	134.800.009,00	1.562.006,00	1,16
Pendapatan Denda Retribusi - LO	261.856.248,00	842.755.980,00	(580.899.732,00)	(68,93)
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO	0,00	146.618.073,00	(146.618.073,00)	(100,00)
Pendapatan dari Pengembalian - LO	2.975.769.760,00	2.572.049.586,00	403.720.174,00	15,70
Pendapatan BLUD - LO	118.586.673.069,00	133.496.100.691,00	(14.909.427.622,00)	(11,17)



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi Tahun 2020 (Audited) (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	473.126.727,00	342.296.608,00	130.830.119,00	38,22
Penerimaan Kontribusi Air PDAM ke Desa Sumber Air- LO	955.309.163,00	1.107.292.946,00	(151.983.783,00)	(13,73)
Hasil Penjualan Pertanian- LO	20.500.000,00	19.000.000,00	1.500.000,00	7,89
Realisasi Lain -Lain PAD Yang Sah -LO	143.509.449.964,00	175.360.062.935,00	(31.850.612.971,00)	(18,16)

Rincian Lain-Lain PAD yang Sah – LO per obyek per SKPD terdapat dalam **Lampiran 5.43**.

b) Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan ini merupakan pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi yang diterima dan dikelola oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang. Adapun Pendapatan Transfer – LO untuk periode Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.562.014.980.957,00 dan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.682.859.163.238,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp120.844.182.281,00 atau (7,18)% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.103. Pendapatan Transfer – LO

Uraian	Realisasi Tahun 2020 (Audited) (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	1.330.280.839.189,00	1.459.337.728.117,00	(129.056.888.928,00)	(8,84)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya -LO	59.165.462.000,00	47.781.527.000,00	11.383.935.000,00	23,82
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	161.879.276.768,00	163.009.375.121,00	(1.130.098.353,00)	(0,69)
Bantuan Keuangan - LO	10.689.403.000,00	12.730.533.000,00	(2.041.130.000,00)	(16,03)
Realisasi Pendapatan Pendapatan Transfer - LO	1.562.014.980.957,00	1.682.859.163.238,00	(120.844.182.281,00)	(7,18)

(1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Pemerintah Kabupaten Magelang untuk periode Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp1.330.280.839.189,00 dan Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp1.459.337.728.117,00 mengalami penurunan sebesar Rp129.056.888.928,00 atau sebesar (8,84)%.



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 5.104. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

Uraian	Realisasi Tahun 2020 (Audited) (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Bagi Hasil Pajak - LO	31.485.988.826,00	32.845.407.899,00	(1.359.419.073,00)	(4,14)
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	1.645.071.580,00	1.936.147.553,00	(291.075.973,00)	(15,03)
Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	987.675.947.000,00	1.097.366.974.000,00	(109.691.027.000,00)	(10,00)
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	309.473.831.783,00	327.189.198.665,00	(17.715.366.882,00)	(5,41)
Realisasi Pendapatan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	1.330.280.839.189,00	1.459.337.728.117,00	(129.056.888.928,00)	(8,84)

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LO untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp59.165.462,00 dan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp47.781.527.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp11.383.935.000,00 atau sebesar 23,82%.

Tabel 5.105. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO

Uraian	Realisasi Tahun 2020 (Audited) (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Dana Penyesuaian - LO	59.165.462.000,00	47.781.527.000,00	11.383.935.000,00	23,82
Dana Insentif Daerah	59.165.462.000,00	47.781.527.000,00	11.383.935.000,00	23,82
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	59.165.462.000,00	47.781.527.000,00	11.383.935.000,00	23,82

(3) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya–LO untuk periode Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp161.879.276.768,00 dan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp163.009.375.121,00 terdapat penurunan sebesar Rp1.130.098.353,00 atau sebesar (0,69) %.

Tabel 5.106. Pendapatan Transfer Daerah – Lainnya – LO

Uraian	Realisasi Tahun 2020 (Audited) (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	161.879.276.768,00	163.009.375.121,00	(1.130.098.353,00)	(0,69)
Pajak Kendaraan Bermotor	45.312.486.718,00	38.936.461.265,00	6.376.025.453,00	16,38
BBNKB	16.684.819.575,00	28.550.829.285,00	(11.866.009.710,00)	(41,56)
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	35.502.496.001,00	46.832.887.405,00	(11.330.391.404,00)	(24,19)
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	296.641.396,00	269.884.249,00	26.757.147,00	9,91



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi Tahun 2020 (Audited) (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	64.082.833.078,00	48.419.312.917,00	15.663.520.161,00	32,35
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	161.879.276.768,00	163.009.375.121,00	(1.130.098.353,00)	(0,69)

(4) Bantuan Keuangan - LO

Bantuan Keuangan- LO untuk periode Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp10.689.403.000,00 dan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp12.730.533.000,00 terdapat penurunan sebesar Rp2.041.130.000,00 atau sebesar (16,03)% sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.107. Bantuan Keuangan – LO

Uraian	Realisasi Tahun 2020 (Audited) (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3* 100
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO	10.689.403.000,00	12.730.533.000,00	(2.041.130.000,00)	(16,03)
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat - LO	0,00	0,00	0,00	
Realisasi Bantuan Keuangan - LO	10.689.403.000,00	12.730.533.000,00	(2.041.130.000,00)	(16,03)

Rincian Bantuan Keuangan per SKPD sebagai berikut :

Tabel 5.108. Bantuan Keuangan – LO Per SKPD

No	Nama SKPD	Tahun 2020 (Audited) (Rp)	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	(%)
1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	10.689.403.000,00	12.730.533.000,00	(2.041.130.000,00)	(16,03)
	Pendapatan Bantuan Keuangan - LO	10.689.403.000,00	12.730.533.000,00	(2.041.130.000,00)	(16,03)

c) Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah -LO

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO untuk periode Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp118.068.828.201,00 dan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp100.723.984.677,75 terdapat kenaikan sebesar Rp17.344.843.523,25 atau sebesar 17,22%.

Tabel 5.109. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Uraian	Realisasi Tahun 2020 (Audited) (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Pendapatan Hibah	118.068.828.201,00	100.723.984.677,75	17.344.843.523,25	17,22
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	118.068.828.201,00	100.723.984.677,75	17.344.843.523,25	17,22



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Pendapatan Hibah - LO untuk periode Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp118.068.828.201,00 dan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp100.723.984.677,75. Terdapat kenaikan sebesar Rp17.344.843.523,25 atau 17,22% dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5.110. Pendapatan Hibah – LO

Nama SKPD	Hibah Dari Pemerintah (Rp)	Hibah dari Kelompok Masyarakat				Total Hibah Tahun 2020 (Audited) (Rp)
		Hibah Uang (Rp)	CSR Barang (Rp)	CSR Uang (Rp)	Total Hibah dari Kelompok Masyarakat (Rp)	
DISDIKBUD	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00
DINKES	4.357.823.997,00	0,00	287.972.312,00	132.660.000,00	420.632.312,00	4.778.456.309,00
RSUD Muntian	0,00	0,00	661.231.796,00	0,00	661.231.796,00	661.231.796,00
SATPOL PP	0,00	0,00	0,00	51.620.000,00	51.620.000,00	51.620.000,00
DINSOS	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
BPBD	1.169.575.666,00	0,00	321.292.855,00	82.350.000,00	403.642.855,00	1.573.218.521,00
DISPERINAHER	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
DISHUB	0,00	0,00	0,00	65.454.000,00	65.454.000,00	65.454.000,00
DISDAGKOP	815.918.000,00	0,00	0,00	479.647.100,00	479.647.100,00	1.295.565.100,00
DISPETERIKAN	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
SETDA	0,00	0,00	0,00	36.490.000,00	36.490.000,00	36.490.000,00
PPKD	109.475.852.475,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	109.476.392.475,00
Jumlah	115.909.170.138,00	540.000,00	1.270.496.963,00	888.621.100,00	2.159.658.063,00	118.068.828.201,00

2) Beban-LO

Beban - LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar – benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama satu tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar.

Beban - LO Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp1.936.965.983.395,68 sedangkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.029.224.812.797,57 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp92.258.829.401,89 atau sebesar (4,55)%.

Rincian Beban Operasi, Beban Non Operasional, dan Beban Luar Biasa diuraikan sebagai berikut:

a) Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan beban pegawai periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Beban Pegawai disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan Beban Pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai Beban Pegawai sebesar Belanja Pegawai yang dibayarkan pada Tahun 2020 dan tidak termasuk pembayaran atas Belanja Pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan Belanja Pegawai yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap dan ditambah dengan utang Belanja Pegawai yang terjadi pada Tahun 2020.



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Beban Pegawai Tahun Anggaran 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp796.304.373.556,00 dan Rp842.355.659.278,00 terdapat penurunan sebesar Rp46.051.285.722,00 atau (5,47)%.

Tabel 5.111. Beban Pegawai – LO

Uraian	Realisasi Tahun 2020 (Audited) (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	748.446.056.832,00	789.453.420.775,00	(41.007.363.943,00)	(5,19)
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	29.822.932.749,00	34.961.110.122,00	(5.138.177.373,00)	(14,70)
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	9.323.200.000,00	9.482.000.000,00	(158.800.000,00)	(1,67)
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	786.070.626,00	5.933.633.221,00	(5.147.562.595,00)	(86,75)
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	29.401.120,00	512.220.100,00	(482.818.980,00)	(94,26)
Beban Uang Lembur - LO	2.566.650.800,00	2.013.275.060,00	553.375.740,00	27,49
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya-LO	5.330.061.429,00	0,00	5.330.061.429,00	0,00
Realisasi Beban Pegawai - LO	796.304.373.556,00	842.355.659.278,00	(46.051.285.722,00)	(5,47)

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020 adalah sebesar Rp795.312.940.429,00 dan ada utang Beban Pegawai Tahun 2019 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran, Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp10.447.519,00 serta Tahun 2020 pada Dispermades dan Kecamatan Muntilan sebesar Rp9.580.646,00, dan adanya reklas dari BTT sebesar Rp992.300.000,00 sehingga Beban Pegawai Tahun 2020 menjadi sebesar Rp796.304.373.556,00.

Tabel 5.112. Beban Pegawai

Uraian	Belanja Pegawai (Rp)	Utang Gaji Tahun 2020 (Rp)	Reklas Dari Belanja Tak Terduga (Rp)	Utang Gaji Tahun 2019 (Rp)	Beban Pegawai – LO (Audited) (Rp)
1	2	3	4	5	6=2+3+4-5
Beban Gaji dan Tunjangan	748.446.923.705,00	9.580.646,00	0,00	10.447.519,00	748.446.056.832,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS	29.822.932.749,00	0,00	0,00	0,00	29.822.932.749,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	9.323.200.000,00	0,00	0,00	0,00	9.323.200.000,00
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	786.070.626,00	0,00	0,00	0,00	786.070.626,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Belanja Pegawai (Rp)	Utang Gaji Tahun 2020 (Rp)	Reklas Dari Belanja Tak Terduga (Rp)	Utang Gaji Tahun 2019 (Rp)	Beban Pegawai - LO (Audited) (Rp)
1	2	3	4	5	6=2+3+4-5
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	29.401.120,00	0,00	0,00	0,00	29.401.120,00
Beban Uang Lembur	1.574.350.800,00	0,00	992.300.000,00	0,00	2.566.650.800,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya-LO	5.330.061.429,00	0,00	0,00	0,00	5.330.061.429,00
Jumlah	795.312.940.429,00	9.580.646,00	992.300.000,00	10.447.519,00	796.304.373.556,00

Rincian Beban Pegawai-LO terdapat dalam **Lampiran 5.44**.

b) Beban Persediaan

Beban Persediaan yaitu beban yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional kantor.

Tabel 5.113. Beban Persediaan

NO.	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
PERSEDIAAN AWAL 2020		21.411.185.873,18
PENAMBAH		
1	Pembelian (Belanja Persediaan)	119.346.198.785,00
2	Reklas dari Aset Tetap	830.759.540,00
3	koreksi masuk persediaan di SKPD BPBD dari Hibah Provinsi, BNPB, dan CSR	1.490.868.521,00
4	koreksi masuk persediaan di SKPD Dinas Kesehatan dari Hibah Provinsi dan Kemenkes	4.645.796.309,00
5	ditambah reklas dari beban pemeliharaan pada SKPD DPUPR	5.536.058.000,00
6	Ditambah Utang PFK	223.375.266,00
7	Ditambah Pendapatan Hibah BTT COVID	3.735.992.950,00
8	Ditambah Pendapatan Hibah BTT MERAPI	776.887.100,00
9	Ditambah Hibah Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat di SKPD DISTANPANGAN	614.569.000,00
10	Ditambah Reklas Dari BTT	4.454.396.082,00
11	Ditambah Reklas Dari Beban Hibah	560.731.796,00
JUMLAH PENAMBAH		142.215.633.349,00
PENGURANG		
1	Saldo akhir Persediaan 2020	26.876.831.761,41
2	Dikurang Persediaan Hibah 2019 DPUPR dan DISTANPANGAN	2.508.943.603,00
3	Dikurangi Reklas ke AT/ATB	5.204.248.590,00
JUMLAH PENGURANG		34.590.023.954,41
BEBAN PERSEDIAAN 2020		129.036.795.267,77

Beban Persediaan Tahun 2020 adalah sebesar Rp129.036.795.267,77 dan Tahun 2019 adalah sebesar Rp92.891.702.966,67 terdapat kenaikan sebesar Rp36.145.092.301,10 atau 38,91%.



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 5.114. Beban Persediaan per Jenis

Uraian	Realisasi Tahun 2020 (Audited) (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Beban Bahan Pakai Habis	29.368.121.145,30	21.986.372.283,00	7.381.748.862,30	33,57
Beban Persediaan Bahan/ Material	22.597.686.577,31	15.227.697.091,67	7.369.989.485,64	48,40
Beban Cetak	3.179.656.026,00	5.178.230.102,00	(1.998.574.076,00)	(38,60)
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	319.830.000,00	353.228.000,00	(33.398.000,00)	(9,46)
Beban Pakaian Kerja	1.496.153.075,00	1.094.729.269,00	401.423.806,00	36,67
Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	283.184.855,00	827.135.280,00	(543.950.425,00)	(65,76)
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	18.570.448.413,00	0,00	18.570.448.413,00	0,00
Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.027.500.000,00	0,00	3.027.500.000,00	0,00
Beban Persediaan BOS	23.017.786.538,00	20.226.917.257,00	2.790.869.281,00	13,80
Beban Persediaan BLUD	27.176.428.638,16	27.997.393.684,00	(820.965.045,84)	(2,93)
Beban Persediaan	129.036.795.267,77	92.891.702.966,67	36.145.092.301,10	38,91

Rincian Beban Persediaan terdapat dalam **Lampiran 5.45**.

Didalam nilai Beban Persediaan sebesar Rp129.036.795.267,77 terdapat beban persediaan yang tidak diyakini senilai Rp7.784.600,00 pada SKPD Dinas Kesehatan dikarenakan tidak ada bukti pengeluarannya.

c) Beban Jasa

Beban Jasa yaitu beban yang terkait baik dengan kebutuhan operasional kantor dan kegiatan pelayanan utama/tusi utama suatu instansi.

Beban Jasa Tahun 2020 adalah sebesar Rp319.912.386.963,25 dan Tahun 2019 adalah sebesar Rp376.084.176.588,75 atau terdapat penurunan sebesar Rp56.171.789.625,50 atau (14,94) %.

Tabel 5.115. Beban Jasa

Uraian	Tahun 2020 (Audited) (Rp)	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Beban Jasa Kantor	142.936.499.345,00	131.823.637.064,00	11.112.862.281,00	8,43
Beban Premi Asuransi	18.582.901.766,00	25.044.713.027,00	(6.461.811.261,00)	(25,80)
Beban Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir/Tanah	382.840.517,00	939.685.600,00	(556.845.083,00)	(59,26)
Beban Sewa Sarana Mobilitas	200.030.650,00	1.230.538.600,00	(1.030.507.950,00)	(83,74)
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	877.123.645,00	1.838.269.660,00	(961.146.015,00)	(52,29)
Beban Makanan dan Minuman	16.891.043.162,00	34.769.002.180,00	(17.877.959.018,00)	(51,42)
Beban Jasa Konsultasi	1.218.547.500,00	9.906.263.595,00	(8.687.716.095,00)	(87,70)
Beban Beasiswa	80.550.000,00	69.600.000,00	10.950.000,00	15,73



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Tahun 2020 (Audited) (Rp)	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Pendidikan PNS				
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.204.008.873,00	5.380.213.843,00	(3.176.204.970,00)	(59,03)
Beban Honorarium PNS	17.664.269.100,00	27.849.759.495,00	(10.185.490.395,00)	(36,57)
Beban Honorarium Non PNS	4.141.764.502,00	10.809.365.478,00	(6.667.600.976,00)	(61,68)
Beban Pajak / Retribusi	239.938.992,00	199.668.864,00	40.270.128,00	20,17
Beban Pegawai BLUD	33.072.435.670,00	36.081.511.582,00	(3.009.075.912,00)	(8,34)
Beban Barang Jasa BLUD	0,00	6.114.837.861,00	(6.114.837.861,00)	(100,00)
Beban Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur	2.682.637.500,00	7.591.777.000,00	(4.909.139.500,00)	(64,66)
Beban Jasa BOS	38.897.112.636,00	40.439.328.849,00	(1.542.216.213,00)	(3,81)
Beban Jasa BLUD	39.126.036.480,25	35.195.760.970,75	3.930.275.509,50	11,17
Beban Pegawai BOS	714.646.625,00	800.242.920,00	(85.596.295,00)	(10,70)
Beban Jasa	319.912.386.963,25	376.084.176.588,75	(56.171.789.625,50)	(14,94)

Rincian Beban Jasa per SKPD terdapat dalam **Lampiran 5.46**.

d) Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan yaitu beban yang digunakan untuk pemeliharaan Aset Tetap atau Aset Lainnya milik suatu instansi atau yang dipergunakan oleh suatu instansi.

Beban Pemeliharaan Tahun 2020 adalah sebesar Rp35.938.420.581,00 dan Tahun 2019 adalah sebesar Rp47.409.954.402,00 atau terdapat penurunan sebesar Rp11.471.533.821,00 atau (24,20)%.

Tabel 5.116. Beban Pemeliharaan

Uraian	Tahun 2020 (Audited) (Rp)	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Beban Pemeliharaan	12.853.143.691,00	28.455.401.474,00	(15.602.257.783,00)	(54,83)
Beban Pemeliharaan BOS	10.500.948.523,00	4.042.684.833,00	6.458.263.690,00	159,75
Beban Pemeliharaan BLUD	3.694.766.720,00	3.133.344.049,00	561.422.671,00	17,92
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	8.889.561.647,00	11.778.524.046,00	(2.888.962.399,00)	(24,53)
Beban Pemeliharaan	35.938.420.581,00	47.409.954.402,00	(11.471.533.821,00)	(24,20)

Rincian Beban Pemeliharaan per SKPD terdapat dalam **Lampiran 5.47**.

e) Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah beban yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional instansi maupun yang berhubungan dengan tugas utama suatu instansi.



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 adalah sebesar Rp22.938.777.419,00 dan Tahun 2019 adalah sebesar Rp48.664.259.432,00 atau terdapat penurunan sebesar Rp25.725.482.013,00 atau (52,86)%.

Tabel 5.117. Beban Perjalanan Dinas

Uraian	Tahun 2020 (Audited) (Rp)	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3* 100
Beban Perjalanan Dinas SKPD	21.322.045.279,00	45.454.051.742,00	(24.132.006.463,00)	(53,09)
Beban Perjalanan Dinas BOS	1.208.404.100,00	1.955.007.770,00	(746.603.670,00)	(38,19)
Beban Perjalanan Dinas BLUD	408.328.040,00	1.255.199.920,00	(846.871.880,00)	(67,47)
Beban Perjalanan Dinas	22.938.777.419,00	48.664.259.432,00	(25.725.482.013,00)	(52,86)

Rincian Beban Perjalanan Dinas per SKPD pada pada **Lampiran 5.48**.

f) Beban Hibah

Beban Hibah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp59.248.019.574,00 dan Tahun 2019 sebesar Rp71.533.972.620,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp12.285.953.046,00 atau (17,17)%.

Tabel 5.118. Beban Hibah

Uraian	Tahun 2020 (Audited) (Rp)	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Beban Hibah barang kepada pemerintah	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	55.647.760.660,00	46.064.197.000,00	9.583.563.660,00	20,80
Beban Hibah Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ Masyarakat	3.510.258.914,00	25.469.775.620,00	(21.959.516.706,00)	(86,22)
Realisasi Beban Hibah	59.248.019.574,00	71.533.972.620,00	(12.285.953.046,00)	(17,17)

Rincian belanja hibah barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dan beban hibah barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat sebagai berikut:

Tabel 5.119. Beban Hibah Barang Yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

Nama SKPD	Belanja Hibah Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ Masyarakat (Rp)	Penambahan dari Reklas BTT COVID 2020 (Rp)	Penambahan dari Persediaan 2019 (Rp)	Pengurangan dari Persediaan 2020 (Rp)	Beban Hibah Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ Masyarakat (Rp)
1	2		3	4	4=2+3-4
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	843.122.623,00	843.122.623,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Nama SKPD	Belanja Hibah Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ Masyarakat (Rp)	Penambahan dari Reklas BTT COVID 2020 (Rp)	Penambahan dari Persediaan 2019 (Rp)	Pengurangan dari Persediaan 2020 (Rp)	Beban Hibah Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ Masyarakat (Rp)
1	2		3	4	4=2+3-4
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	39.240.000,00	1.575.344.311,00	0,00	0,00	1.614.584.311,00
Dinas Pertanian Dan Pangan	0,00	0,00	614.569.000,00	1.665.820.980,00	1.051.251.980,00
Jumlah	39.240.000,00	1.576.644.311,00	614.569.000,00	2.508.943.603,00	3.510.258.914,00

g) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp59.400.210.000,00 dan Tahun 2019 sebesar Rp31.625.859.000,00 sehingga terdapat kenaikan Rp27.774.351.000,00 atau 87,82%.

Beban Bantuan Sosial tahun 2020 tersebut berbeda dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2020 sebesar Rp10.637.410.000,00 karena ada penambahan dari Reklas BTT pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebesar Rp48.762.800.000,00 sehingga Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2020 menjadi Rp59.400.210.000,00.

Tabel 5.120. Beban Bantuan Sosial

Uraian	Tahun 2020 (Audited) (Rp)	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	59.400.210.000,00	30.198.609.000,00	29.201.601.000,00	96,70
Beban Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ Masyarakat	0,00	1.427.250.000,00	(1.427.250.000,00)	(100,00)
Realisasi Beban Bantuan Sosial	59.400.210.000,00	31.625.859.000,00	27.774.351.000,00	87,82

h) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp212.936.163.814,87 dan Rp214.186.862.590,94 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp1.250.698.776,07 atau (0,58)%.



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 5.121. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	Realisasi Tahun 2020 (Audited) (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	94.362.938.458,74	79.202.143.902,68	15.160.794.556,06	19,14
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	33.244.605.906,51	35.636.632.312,70	(2.392.026.406,19)	(6,71)
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	83.546.749.488,37	97.274.537.420,56	(13.727.787.932,19)	(14,11)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.781.869.961,25	2.073.548.955,00	(291.678.993,75)	(14,07)
Realisasi Penyusutan dan Amortisasi	212.936.163.814,87	214.186.862.590,94	(1.250.698.776,07)	(0,58)

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per SKPD terdapat dalam **Lampiran 5.49**.

i) Beban Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat tertagih (*Net Realizable Value*)

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp25.218.911.053,79 dan Rp3.648.551.349,21 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp21.570.359.704,58 atau 591,20%. Berikut Beban Penyisihan Piutang Tahun 2020 dan 2019:

Tabel 5.122. Beban Penyisihan Piutang

Uraian	Realisasi Tahun 2020 (Audited) (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	25.218.911.053,79	3.648.551.349,21	21.570.359.704,58	591,20
Realisasi Beban Penyisihan Piutang	25.218.911.053,79	3.648.551.349,21	21.570.359.704,58	591,20

Rincian Beban Penyisihan Piutang per SKPD sebagai berikut :

Tabel 5.123. Beban Penyisihan Piutang Per SKPD

SKPD	Beban Penyisihan Piutang (Rp)		Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
	Tahun 2020 (Audited) (Rp)	Tahun 2019 (Audited) (Rp)		
RSUD Muntilan	1.104.938.352,90	0,00	1.104.938.352,90	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	669.332.800,00	0,00	669.332.800,00	0,00
Dinas Perhubungan	151.268.050,00	13.259.093,75	138.008.956,25	1.040,86
Dinas Komunikasi dan Informatika	7.284.265,00	0,00	7.284.265,00	0,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.674.013.175,45	2.669.651.515,20	4.361.660,25	0,16



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

SKPD	Beban Penyisihan Piutang (Rp)		Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
	Tahun 2020 (Audited) (Rp)	Tahun 2019 (Audited) (Rp)		
Dinas Peternakan dan Perikanan	16.935.440,00	17.983.928,00	(1.048.488,00)	(5,83)
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	20.595.138.970,44	947.656.812,26	19.647.482.158,18	2.073,27
Beban Penyisihan Piutang	25.218.911.053,79	3.648.551.349,21	21.570.359.704,58	591,20

j) Beban Lain-Lain

Beban lain – lain adalah beban Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang.

Beban lain – lain diakui saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah karena Pemerintah Daerah telah mendapatkan hak dan kemanfaatan atas barang dan jasa yang disediakan oleh pihak ketiga.

Beban Lain-lain pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp431.961.449,00 dan Tahun 2019 sebesar Rp231.784.708,00 atau terdapat kenaikan sebesar Rp200.176.741,00 atau 86,36%.

Beban lain – lain pada Tahun 2020 seluruhnya merupakan beban atas barang *ekstracomtable*. Barang *ekstracomtable* merupakan barang dengan harga perolehan dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset.

Rincian Beban Lain – Lain per SKPD terdapat dalam **Lampiran 5.50**.

k) Beban Penyisihan Investasi Non Permanen

Beban Penyisihan Investasi Non Permanen pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp0,00 dan Tahun 2019 adalah sebesar Rp0,00 sehingga tidak terdapat kenaikan/ penurunan sebesar Rp00,00 atau 0,00%.

l) Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban transfer Tahun 2020 yang diberikan kepada Provinsi, pemerintah desa dan partai politik.

Beban Transfer pada Tahun Anggaran 2020 dan 2019 sebesar Rp275.599.963.717,00 dan Rp300.592.029.862,00 terdapat penurunan sebesar Rp24.992.066.145,00 atau (8.31)%.

Tabel 5.124. Beban Transfer

Uraian	Tahun 2020 (Audited) (Rp)	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	15.683.755.000,00	14.130.217.300,00	1.553.537.700,00	10,99
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan	15.683.755.000,00	14.130.217.300,00	1.553.537.700,00	10,99



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Tahun 2020 (Audited) (Rp)	Tahun 2019 (Audited) (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Desa/ Kelurahan				
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	4.860.897.500,00	4.521.758.861,00	339.138.639,00	7,50
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa	4.848.627.500,00	3.379.422.100,00	1.469.205.400,00	43,48
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Provinsi	12.270.000,00	1.142.336.761,00	(1.130.066.761,00)	(98,93)
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	252.755.580.217,00	280.863.087.201,00	(28.107.506.984,00)	(10,01)
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	252.755.580.217,00	280.863.087.201,00	(28.107.506.984,00)	(10,01)
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	2.299.731.000,00	1.076.966.500,00	1.222.764.500,00	113,54
Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik	2.299.731.000,00	1.076.966.500,00	1.222.764.500,00	113,54
Beban Transfer	275.599.963.717,00	300.592.029.862,00	(24.992.066.145,00)	(8,31)

m) Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi.

Surplus/Defisit dari Operasi selama Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp63.381.723.415,74 dan Tahun 2019 sebesar Rp149.642.090.109,59 terdapat penurunan sebesar Rp86.260.366.693,85 atau (57,64)%.

n) Beban Non Operasional

Realisasi Beban Non Operasional pada Tahun Anggaran 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp583.013.113,73 dan Rp64.901.499,78 terdapat kenaikan sebesar Rp518.111.613,95 atau 798,30%.

Beban Non Operasional merupakan penghapusan Bangunan Gedung berdasarkan SK Bupati Nomor No. 180,182/445/kep/23/2020 tgl 30 Des 2020. Barang-barang yang dihapuskan tersebut nilai bukunya jauh lebih kecil dari nilai perolehannya. Pada saat aset-aset tersebut dipindahkan ke Aset Lain-Lain sebelum dihapuskan, Pemerintah Kabupaten Magelang sudah melakukan penyusutan sehingga nilai yg tercantum di nilai Aset Lain-Lain tersebut sebesar nilai buku.



o) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun Anggaran 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp583.013.113,73 dan Rp64.901.499,78 atau terdapat kenaikan sebesar Rp518.111.613,95 atau 798,30%.

p) Pendapatan Luar Biasa – LO

Pendapatan Luar Biasa - LO pada Tahun Anggaran 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

q) Beban Luar Biasa- LO

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Beban Luar Biasa - LO pada Tahun Anggaran 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp71.700.000,00 dan Rp73.755.000,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp2.055.000,00 atau (2,79%). Beban Luar Biasa terdiri dari Beban Tak Terduga untuk penanganan bencana.

Tabel 5.125. Beban Transfer BTT

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	BTT penanganan sementara bencana banjir bandang di Desa Salam Kanci	61,270,000.00
2	Pengembalian kelebihan setor pembayaran retribusi IMTA	10,430,000.00
Total		71.700.000.00

Dari total belanja tak terduga Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp64.637.965.303,00 dilakukan reklasifikasi beban luar biasa untuk penanganan Covid-19 dan Tanggap darurat Merapi masing- masing sebesar Rp62.788.537.180,00 dan Rp1.777.728.123,00. Beban Luar Biasa Penanganan Covid-19 dan Tanggap Darurat Merapi direklasifikasi pembebanannya ke dalam Laporan Operasional dan Neraca masing- masing SKPD penerima Belanja Tak Terduga penanganan Covid-19 dan Tanggap darurat Merapi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.126. Rincian Reklasifikasi Beban Luar Biasa Penanganan Covid- 19 dan Tanggap Darurat Merapi

No.	Reklasifikasi Beban dan Aset	Jumlah (Rp)
A.	Penanganan Covid-19	
1.	Beban Pegawai	992.300.000,00
2.	Beban Persediaan	4.256.196.982,00
3.	Beban Jasa	2.864.864.850,00
4.	Beban Pemeliharaan	189.980.449,00
5.	Beban Bantuan Sosial	48.762.800.000,00
6.	Beban Hibah	1.576.644.311,00
7.	Menjadi Aset Tetap	409.757.638,00
8.	Menjadi Persediaan Akhir	3.735.992.950,00
	Total	62.788.537.180,00
B.	Tanggap Darurat Merapi	
1.	Beban Pegawai	



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Reklasifikasi Beban dan Aset	Jumlah (Rp)
2.	Beban Persediaan	198.199.100,00
3.	Beban Jasa	694.830.000,00
4.	Beban Pemeliharaan	9.141.923,00
5.	Beban Bantuan Sosial	
6.	Menjadi Aset Tetap	98.670.000,00
7.	Menjadi Persediaan Akhir	776.887.100,00
	Total	1.777.728.123,00

Reklasifikasi Beban Tak Terduga Penanganan Covid- 19 dan Tanggap Darurat merapi dapat dilihat pada **Lampiran 5.51** dan **Lampiran 5.52**

r) Surplus/Defisit – LO

Surplus/Defisit – LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Pada Laporan Operasional Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten memperoleh surplus sebesar Rp62.727.010.302,01 dan Tahun 2019 mengalami surplus sebesar Rp149.503.433.609,81 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp86.776.423.307,80 atau (58,04)%.

5.e. PENJELASAN LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan ini menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi baik keuangan maupun non keuangan, pembiayaan dan non anggaran. Informasi ini bertujuan untuk:

- 1) Menilai pengaruh dari masing – masing aktivitas terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah;
- 2) Mengevaluasi hubungan antara masing-masing aktivitas.

Komponen laporan arus kas yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang terdiri atas arus kas aktivitas operasi, arus kas aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas aktivitas pembiayaan, dan arus kas aktivitas non anggaran.

1) Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

a) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi tahun 2020 sebesar Rp2.380.176.254.805,00 dan Tahun 2019 sebesar Rp2.575.327.998.124,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5.127. Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2020 (Audited) (Rp)	Tahun 2019 (Audited) (Rp)
Penerimaan Pajak Daerah	115.530.759.532,00	156.886.789.644,00
Penerimaan Retribusi Daerah	27.049.700.014,00	22.934.190.849,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Tahun 2020 (Audited) (Rp)	Tahun 2019 (Audited) (Rp)
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	30.637.364.531,00	23.700.417.768,00
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	156.269.943.348,00	213.544.874.069,00
Dana Alokasi Umum	987.675.947.000,00	1.097.366.974.000,00
Dana Alokasi Khusus	309.473.831.783,00	327.189.198.665,00
Dana Desa	391.044.107.982,00	383.071.777.000,00
Dana Penyesuaian	59.165.462.000,00	47.781.527.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak	32.547.800.849,00	26.872.678.200,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	1.816.492.146,00	1.375.208.237,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	147.910.429.045,00	167.256.161.818,00
Bantuan Keuangan	10.689.403.000,00	12.730.533.000,00
Pendapatan Hibah	110.365.013.575,00	94.617.667.874,00
Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	2.380.176.254.805,00	2.575.327.998.124,00

Penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah di arus kas masuk operasi berbeda dengan Penerimaan Lain -Lain PAD Yang Sah di Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp36.523.585,00 disebabkan karena untuk tahun 2019 BLUD RSUD Muntilan belum menerapkan Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah sehingga atas pendapatan tersebut sudah masuk kas di tahun 2019 tetapi di catat di Laporan Realisasi Anggaran baru pada tahun 2020.

b) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi tahun 2020 sebesar Rp2.089.968.858.759,00 dan tahun 2019 sebesar Rp2.182.063.607.163,00 merupakan pengeluaran kas untuk biaya operasional pemerintah dalam Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.128. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2020 (Audited) (Rp)	Tahun 2019 (Audited) (Rp)
Pembayaran Pegawai	795.312.940.429,00	842.384.330.471,00
Pembayaran Barang dan Jasa	495.998.821.668,00	550.024.856.503,00
Pembayaran Hibah	55.647.760.660,00	74.042.916.223,00
Pembayaran Bantuan Sosial	10.637.410.000,00	31.625.859.000,00
Pembayaran Tak Terduga	64.637.965.303,00	73.755.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	21.634.541.500,00	18.900.059.265,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	646.099.419.199,00	665.011.830.701,00
Jumlah Arus Kas keluar dari Aktivitas Operasi	2.089.968.858.759,00	2.182.063.607.163,00

Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2020 sebesar Rp290.207.396.046,00 dan Tahun 2019 sebesar Rp393.264.390.961,00.

2) Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk



meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

a) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi tahun 2020 sebesar Rp244.818.500,00 dan tahun 2019 sebesar Rp125.060.750,00 merupakan penerimaan Pemerintah Kabupaten Magelang yang berasal dari pencairan dana cadangan, penjualan aset tetap dan aset lainnya. Berikut rincian Arus Kas masuk dari Aktivitas Investasi:

Tabel 5.129. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun 2020 (Audited) (Rp)	Tahun 2019 (Audited) (Rp)
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	3.519.000,00	400.000,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	67.373.500,00	110.878.750,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya	19.766.000,00	13.782.000,00
Penjualan Aset Lainnya	154.160.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	244.818.500,00	125.060.750,00

b) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi tahun 2020 sebesar Rp221.611.058.402,00 dan tahun 2019 sebesar Rp396.733.995.844,00 merupakan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Magelang untuk pembentukan dana cadangan, perolehan aset tetap dan aset lain serta penyertaan modal Pemerintah Daerah. Berikut rincian Arus Kas keluar dari Aktivitas Investasi:

Tabel 5.130. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun 2020 (Audited) (Rp)	Tahun 2019 (Audited) (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Perolehan Tanah	5.507.345.948,00	14.038.662.136,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	119.261.429.185,00	131.750.646.976,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	50.299.523.649,00	131.649.038.026,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	32.195.982.259,00	91.473.924.357,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	6.365.747.356,00	15.782.598.699,00
Perolehan Aset Lainnya	777.030.005,00	1.835.125.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.204.000.000,00	10.204.000.000,00
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi	221.611.058.402,00	396.733.995.844,00

Arus kas bersih dari aktivitas investasi pada Tahun 2020 sebesar (Rp.221.366.239.902,00) dan Tahun 2019 sebesar (Rp396.608.935.094,00). Ini menggambarkan bahwa pada tahun ini Pemerintah Kabupaten Magelang investasi untuk pengadaan asetnya lebih kecil dibanding tahun lalu.

Arus Kas Keluar dari aktivitas investasi berbeda dengan realisasi belanja modal di tahun 2020 sebesar Rp7.204.000.000,00 disebabkan pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Magelang melakukan penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Daerah.



3) Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

a) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan tahun 2020 sebesar Rp230.000.000.000,00 dan tahun 2019 sebesar Rp11.400.000,00 merupakan penerimaan Pemerintah Kabupaten Magelang yang berasal dari penerimaan kembali pinjaman dana bergulir dan penerimaan hasil pencairan deposito . Berikut rincian arus kas masuk dari Aktivitas Pendanaan:

Tabel 5.131. Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Pendanaan

Uraian	Tahun 2020 (Audited) (Rp)	Tahun 2019 (Audited) (Rp)
Penerimaan Kembali Pinjaman dana bergulir	0,00	11.400.000,00
Penerimaan pinjaman BLUD	230.000.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan	230.000.000.000,00	11.400.000,00

b) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan tahun 2020 sebesar Rp230.000.000.000,00 dan tahun 2019 sebesar Rp0,00 berasal dari pemindah bukuan ke investasi jangka pendek:

Tabel 5.132. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

Uraian	Tahun 2020 (Audited) (Rp)	Tahun 2019 (Audited) (Rp)
Pemindahbukuan ke investasi jangka pendek	230.000.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	230.000.000.000,00	0,00

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan pada Tahun 2020 sebesar Rp0,00 sedangkan pada Tahun 2019 arus kas bersih dari aktivitas ini sebesar Rp11.400.000,00

4) Aktivitas Transitoris

Aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah.

a) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris (non anggaran) adalah penerimaan perhitungan pihak ketiga yang menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari SP2D atau diterima secara tunai oleh pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes, penerimaan UUDP tahun lalu maupun penerimaan atas kesalahan setor. Arus keluar kas dari aktivitas non anggaran adalah pengeluaran perhitungan pihak ketiga, pengeluaran kesalahan BOS serta penerimaan UUDP di bendahara pengeluaran.



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Metode yang digunakan dalam menyajikan Laporan Arus Kas ini menggunakan metode langsung dengan mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto. Keuntungan metode ini adalah:

- Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus kas di masa yang akan datang.
- Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan.
- Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

Arus kas masuk dari aktivitas transitoris pada tahun 2020 sebesar Rp13.366.530.795,00 dan tahun 2019 sebesar Rp6.470.301.277,00 Adapun penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.133. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Tahun 2020 (Audited) (Rp)	Tahun 2019 (Audited) (Rp)
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	13.366.530.795,00	6.470.301.277,00
Penerimaan UUDP Tahun lalu	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris	13.366.530.795,00	6.470.301.277,00

b) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris (non anggaran) adalah pengeluaran perhitungan pihak ketiga, pengembalian lebih salur ke provinsi serta penerimaan UUDP di bendahara pengeluaran.

Arus kas keluar dari aktivitas transitoris pada tahun 2020 sebesar Rp13.331.089.600,00 dan tahun 2019 sebesar Rp6.690.942.905,00 Adapun penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.134. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Tahun 2020 (Audited) (Rp)	Tahun 2019 (Audited) (Rp)
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	13.331.089.600,00	6.506.172.905,00
Pengembalian Lebih Salur Ke Provinsi Uang Untuk Dipertanggungjawabkan di Bendahara Pengeluaran	0,00	184.770.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	13.331.089.600,00	6.690.942.905,00

Pada Tahun 2020 arus kas bersih dari aktivitas ini sebesar Rp35.441.195,00 dan pada Tahun 2019 arus kas bersih dari aktivitas ini adalah (Rp220.641.628,00)

Terdapat kenaikan bersih kas selama periode sebesar Rp68.876.597.339,00 yang merupakan penjumlahan dari arus kas bersih dari aktivitas operasi, arus kas bersih dari aktivitas investasi, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris. Saldo awal kas BUD, BLUD dan BOS sebesar Rp218.893.323.318,00 dan terdapat koreksi saldo awal BOS sebesar Rp13.105.000,00 sehingga saldo akhir kas sebesar Rp287.756.815.657,00 merupakan penjumlahan dari saldo akhir kas di BUD, Kas BLUD dan Kas BOS, Kas di bendahara pengeluaran dan Kas di bendahara penerimaan.



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 5.135. Kenaikan Penurunan Kas

Uraian	Tahun 2020 (Audited) (Rp)	Tahun 2019 (Audited) (Rp)
Kenaikan/Penurunan Kas	68.876.597.339,00	(3.553.785.761,00)
Saldo awal Kas di BUD/Kas Daerah, Kas BLUD, Kas BOS	218.893.323.318,00	222.516.783.076,00
Koreksi saldo awal kas di BUD/Kas Daerah, Kas di BLUD dan Kas BOS setelah koreksi	13.105.000,00	(69.673.997,00)
Saldo awal kas di BUD/Kas Daerah, Kas BLUD dan Kas BOS setelah koreksi	218.880.218.318,00	222.447.109.079,00
Saldo akhir Kas di BUD /Kas Daerah, Kas BLUD, Kas BOS	287.756.815.657,00	218.893.323.318,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah, Kas di BLUD dan Kas di BOS Selain yang diinvestasikan	0,00	0,00
Saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	287.756.815.657,00	218.893.323.318,00

5.f. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan Laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas dan aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Ekuitas awal pada Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp3.256.956.976.794,83.

Penambahan Ekuitas bersumber dari saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan sebesar Rp62.727.010.302,01 merupakan selisih antara jumlah pendapatan yang diterima dikurangi jumlah beban pada Laporan Operasional.

Laporan Perubahan Ekuitas juga dipengaruhi faktor pengurang dan penambah yang merupakan dampak kumulatif kesalahan mendasar berupa koreksi-koreksi akuntansi sebesar Rp88.791.191.164,39

Pada Tahun 2020 tidak terdapat Koreksi Nilai Persediaan dan Selisih Revaluasi Aset Tetap. Ini berarti Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar hanya dipengaruhi oleh adanya Koreksi ekuitas lainnya. Koreksi ekuitas lainnya Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp88.791.191.164,39 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.136. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

NO.	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR		88.791.191.164,39
PENAMBAH		
1	KOREKSI ASET TETAP	22.383.104.303,17
	Merupakan nilai koreksi ekuitas lainnya yang disebabkan adanya koreksi aset tetap dari mutasi antar SKPD, dari hibah aset tetap, reklas aset tetap antar SKPD, koreksi atas kesalahan kodefikasi barang aset yang sebelumnya salah penempatan, penambahan aset tetap dari beban sertifikasi, beban jasa konsultan dan beban perencanaan atas temuan BPK.	
2	AKUMULASI DEPRESIASI	44.500.500.868,27
	Merupakan nilai koreksi ekuitas lainnya yang disebabkan oleh koreksi akumulasi depresiasi aset tetap. Ini terjadi karena kesalahan pencatatan dan/atau penghitungan nilai akumulasi depresiasi serta kesalahan pencatatan dan/atau penghitungan nilai aset tetap pada pembukuan tahun sebelumnya yang menyebabkan kesalahan perhitungan akumulasi depresiasi.	
3	KOREKSI ASET LAINNYA	3.744.200.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

NO.	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
	Merupakan nilai koreksi ekuitas lainnya yang disebabkan oleh koreksi aset lainnya, berupa reklas dari aset tetap yang menjadi aset lainnya dan juga koreksi atas penghapusan aset lainnya.	
4	PENYISIHAN PIUTANG	21.283.715.218,95
	Merupakan nilai koreksi ekuitas lainnya yang disebabkan pencatatan penyesuaian / jurnal penyisihan piutang tahun sebelumnya.	
5	KOREKSI PERSEDIAAN	5.139.731.300,00
	Merupakan nilai koreksi ekuitas lainnya atas penambahan persediaan di SKPD dari BTT COVID yang dianggarkan di PPKD.	
6	INVESTASI NON PERMANEN	5.708.000,00
	Merupakan nilai koreksi ekuitas lainnya yang disebabkan karena adanya pengakuan kembali dana bergulir.	
JUMLAH PENAMBAH		97.056.959.690,39
PENGURANG		
7	KOREKSI NILAI PIUTANG	(2.250.000,00)
	Merupakan nilai koreksi ekuitas lainnya yang disebabkan adanya koreksi nilai piutang tahun sebelumnya pada Dinas Kesehatan atas klaim yang tidak terbayarkan oleh BPJS	
8	BEBAN DIBAYAR DIMUKA	(39.777.400,00)
	Merupakan nilai neto koreksi ekuitas lainnya yang disebabkan karena kesalahan kelebihan pencatatan beban dibayar dimuka tahun 2019 atas beban sewa tanah dibayar di muka pada Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang.	
9	KOREKSI UTANG	(2.562.477.188,00)
	Merupakan Nilai koreksi ekuitas lainnya yang disebabkan adanya koreksi nilai utang atas pengakuan utang bagi hasil pajak atas lebih salur pemerintah pusat berdasarkan PMK 113/PMK.07/2020 yang sudah diganti PMK 25/ PMK-07/2021 pada PPKD	
10	KOREKSI BTT	(5.648.158.938,00)
	Merupakan nilai koreksi ekuitas lainnya yang disebabkan adanya reklas belanja tak terduga dari PPKD ke beberapa skpd	
11	KOREKSI DANA BOS	(13.020.810,00)
	Merupakan nilai koreksi ekuitas lainnya yang disebabkan karena adanya koreksi silpa dana BOS tahun 2019 dan Bunga bank yang belum di setor ke RKUD.	
12	KOREKSI JAGIR	(84.190,00)
	Merupakan Nilai koreksi ekuitas lainnya yang disebabkan adanya koreksi jasa giro tahun 2020 yang terdiri atas jagir SDN kebonagung dan jagir SDN trenten 2 yang belum di setor ke rekening RKUD.	
JUMLAH PENGURANG		(8.265.768.526,00)

Beberapa pencatatan koreksi ekuitas merupakan pencatatan mutasi antar SKPD di tahun berkenaan yang seharusnya di catat melalui Laporan Operasional (LO) yang tidak bisa di akomodir oleh sistem. Nilai ekuitas awal ditambah dengan nilai Surplus/Defisit-LO ditambah dengan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar didapat nilai ekuitas akhir Tahun 2020 sebesar Rp3.408.475.178.261,23.

Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2020 terdapat dalam **Lampiran 5.53**.

5.g. INFORMASI PENTING LAINNYA

a. Dana Bencana Alam

Pemerintah Kabupaten Magelang memiliki rekening untuk menampung dana bantuan dari masyarakat yang berada di rekening Bank Jateng Cabang Magelang dengan Nomor Rekening 1.005.00829.4 Saldo Per 31 Desember 2019 Rp461.062.190,00 sedangkan Saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp484.812.684,00.



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 5.137. Mutasi Rekening Dana Bencana Alam

MUTASI REKENING DANA BENCANA KAB. MAGELANG			
No. REK : 1-005-00829-4			
		D	K
Saldo Tahun 2019		461.062.190,00	
Mutasi Dana COVID-19			
- Masuk		1.215.563.360,00	
- Keluar			796.132.960,00
- Disetorkan ke RKUD			427.253.102,00
<i>Dana Covid Murni</i>	419.427.400,00		
<i>Bunga Jagir</i>	7.825.702,00		
Mutasi Dana Merapi			
- Masuk		120.558.000,00	
- Keluar			116.186.241,00
Bunga Jagir :			
- Bunga Jagir Keseluruhan		27.201.437,00	
		1.824.384.987,00	1.339.572.303,00
Saldo per 31 Desember 2020		484.812.684,00	

b. Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes

Pemerintah Kabupaten Magelang terdiri dari 21 kecamatan dan 367 desa. Selama tahun 2020, total penerimaan dan pengeluaran Desa adalah Rp639.676.764.164,00 dan Rp643.864.016.297,00.

Sesuai Permendagri Nomor 50 Tahun 2018, Pemda diwajibkan menyusun ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dapat dilihat pada **Lampiran 5.54**.

c. Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama

Laporan Keuangan Tingkat Koordinator Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 Wilayah (0319) Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

1) Neraca

Tabel 5.138. Neraca TP / UB

URAIAN	Per 31 Des 2020	Per 31 Des 2019
	(Rp)	(Rp)
ASET		
Piutang Bukan Pajak	0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	0,00	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN	Per 31 Des 2020	Per 31 Des 2019
	(Rp)	(Rp)
Persediaan	0,00	7.120.070.500,00
Aset Lancar	0,00	7.120.070.500,00
Aset Tetap		
Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Jalan Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap	0,00	0,00
Aset Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH ASET	0,00	7.120.070.500,00
KEWAJIBAN		
Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00
EKUITAS		
Ekuitas	0,00	7.120.070.500,00
JUMLAH EKUITAS	0,00	7.120.070.500,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0,00	7.120.070.500,00

2) **Laporan Realisasi Anggaran**

Tabel 5.139. LRA TP / UB

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI 2020 (Rp)	REALISASI 2019 (Rp)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH			
PENERIMAAN NEGARA		0,00	41.255.750,00
Penerimaan Perpajakan	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Negara Bukan Pajak	0,00	0,00	41.255.750,00
HIBAH	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH		0,00	41.255.750,00
BELANJA			
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang	5.713.000.000,00	4.747.877.500,00	13.941.955.025,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
Subsidi	0,00	0,00	0,00
Hibah	0,00	0,00	0,00
Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA	5.713.000.000,00	4.747.877.500,00	13.941.955.025,00
PEMBIAYAAN			
JUMLAH PEMBIAYAAN			



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

3) **Laporan Perubahan Ekuitas**

Tabel 5.140. LPE TP / UB

URAIAN	JUMLAH (Rp)
EKUITAS AWAL	7.120.070.500,00
SURPLUS/ DEFISIT- LO	(11.867.948.000,00)
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN	0,00
PENYESUAIAN NILAI ASET	0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN	0,00
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	4.747.877.500,00
KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS	0,00
EKUITAS AKHIR	0,00

4) **Laporan Operasional**

Tabel 5.141. Laporan Operasional TP / UB

URAIAN	2020	2019
PENDAPATAN		
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0,00	1.800.000,00
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0,00	1.800.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	0,00	1.800.000,00
BEBAN		
BEBAN PEGAWAI		
BEBAN PERSEDIAAN	819.078.000,00	20.768.250,00
BEBAN BARANG DAN JASA	91.830.000,00	215.430.000,00
BEBAN PEMELIHARAAN	0,00	-
BEBAN PERJALANAN DINAS	67.392.000,00	274.375.050,00
BEBAN BANTUAN SOSIAL	0,00	0,00
BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	10.889.648.000,00	12.615.463.725,00
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0,00	0,00
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH	0,00	(163.529,00)
JUMLAH BEBAN	11.867.948.000,00	13.125.873.496,00
SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(11.867.948.000,00)	(13.124.073.496,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL		
PENDAPATAN DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	0,00	6.750.000,00
BEBAN DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	0,00	0,00
SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	6.750.000,00
SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	0,00	6.750.000,00
POS LUAR BIASA	0,00	0,00
SURPLUS/ DEFISIT LO	(11.867.948.000,00)	(13.117.323.496,00)



Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada pasal 48 ayat (1) menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa didanai dari APBN bagian anggaran kementerian/lembaga melalui dana tugas pembantuan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota/Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

a) Dasar Hukum Tugas Pembantuan

Dasar hukum pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah sebagai berikut:

- (1) Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

b) Tugas Pembantuan yang Diterima

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota/Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Tugas Pembantuan Tahun 2020 dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD yaitu Dinas Pertanian dan Pangan, dengan rincian sebagai berikut:



1. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

a. Belanja

Realisasi Belanja pada TA 2020 adalah sebesar Rp4.747.877.500,00 atau 83.11% dari anggaran belanja sebesar Rp5.713.000.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.142. Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2020

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang	5.713.000.000,00	4.747.877.500,00	83,11
Total Belanja Kotor	5.713.000.000,00	4.747.877.500,00	83,11
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Total Belanja	5.713.000.000,00	4.747.877.500,00	83,11

Dibandingkan dengan Tahun 2019, Realisasi Belanja TA 2020 mengalami penurunan sebesar (63.05%) dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain karena anggaran Tahun 2020 banyak berkurang.

Tabel 5.143. Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	%
Belanja Barang	4.747.877.500,00	12.849.472.725,00	(63,05)
Total Belanja	4.747.877.500,00	12.849.472.725,00	(63,05)

b. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4.747.877.500,00 dan Rp12.849.472.725,00. Realisasi belanja barang TA 2020 mengalami penurunan sebesar (63.05%) dari TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh pengurangan anggaran:

Tabel 5.144. Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00
Belanja Barang Non Operasional	35.830.000,00	68.366.000,00	(47,59)
Belanja Barang Persediaan	3.160.000,00	20.768.250,00	(84,78)
Belanja Jasa	4.400.000,00	21.514.000,00	(79,55)
Belanja Pemeliharaan	0,00	38.896.000,00	(100,00)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	67.392.000,00	246.265.750,00	(72,63)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	415.288.500,00	233.223.600,00	(78,06)
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	4.170.207.000,00	12.168.839.125,00	(65,73)
Jumlah Belanja Kotor	4.747.877.500,00	12.849.472.725,00	(63,05)
Pengembalian Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	4.747.877.500,00	12.849.472.725,00	(63,05)



2. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca

a. Aset Lancar

1) Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp6.304.152.500,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.45. Perbandingan Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00	2.190.000.000,00
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0,00	4.114.152.500,00
Jumlah	0,00	6.304.152.500,00

b. Ekuitas

1) Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp6.304.152.500,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

3. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional

a. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.800.000,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 5.146. Perbandingan PNBPN Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	1.800.000,00	(100,00)
Jumlah	0,00	1.800.000,00	(100,00)



b. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp3.160.000,00 dan Rp20.768.250,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.147. Perbandingan Beban Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	3.160.000,00	20.768.250,00	(84,78)
Jumlah	3.160.000,00	20.768.250,00	(84,78)

c. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp91.830.000,00 dan Rp141.480.000,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.148. Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Bahan	29.230.000,00	57.866.000,00	(49,49)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	51.600.000,00	51.600.000,00	(0,00)
Beban Honor Output Kegiatan	6.600.000,00	10.500.000,00	(37,14)
Beban Jasa Lainnya	4.400.000,00	19.514.000,00	(77,45)
Beban Jasa Profesi	0,00	2.000.000,00	(100,00)
Jumlah	91.830.000,00	141.480.000,00	(35,09)

d. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp67.392.000,00 dan Rp246.265.750,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 5.149. Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	11.180.000,00	71.265.750,00	(84,31)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	52.600.000,00	158.900.000,00	(66,90)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	16.100.000,00	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.612.000,00	0,00	(0,00)
Jumlah	67.392.000,00	246.265.750,00	(72,63)

e. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp10.889.648.000,00 dan Rp6.136.806.225,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.150. Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	5.392.501.000,00	537.116.725,00	(903,97)
Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0,00	5.343.068.500,00	(100,00)
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	32.500.000,00	38.896.000,00	(16,44)
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	5.122.300.000,00	49.500.000,00	10.248,08
Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	342.347.000,00	168.225.000,00	103,51
Jumlah	10.889.648.000,00	6.136.806.225,00	77,45

f. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan (Rp163.529,00). Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 5.151. Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang PNB	0,00	(59.800,00)	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0,00	(103.729,00)	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	(163.529,00)	(100,00)

g. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.152. Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0,00	6.750.000,00	(100,00)
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	6.750.000,00	(100,00)

4. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

a. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp6.304.152.500,00 dan Rp32.542.221,00.

b. Surplus /Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp11.052.030.000,00) dan (Rp6.536.606.696,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.



c. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

d. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4.747.877.500,00 dan Rp12.808.216.975,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 5.153. Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2020

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2020
Ditagihkan ke Entitas Lain	4.747.877.500,00
Jumlah	4.747.877.500,00

e. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2020 saldo DDEL adalah sebesar Rp0.00 sedangkan DKEL sebesar Rp4.747.877.500,00.

f. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp6.304.152.500,00.

d. Dana Dekonsentrasi

Anggaran Dana Dekonsentrasi pada tahun 2020 adalah sebesar Rp1.894.152.400,00 dengan realisasi sebesar Rp1.861.038.057,00 atau sebesar 98,25% dan realisasi fisik sebesar 95,32% dengan rincian sebagaimana berikut :



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 5.154. Laporan Realisasi Dana Dekonsentrasi

No	Instansi/kegiatan	Nama Program/Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi		
				Keuangan		Fisik
				Rp	%	%
1	DISTANPANGAN					
	4	DEKONSENTRASI				
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat				
		1 Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	209.520.000,00	209.474.100,00	99,98	100,00
		- Operasional Kegiatan (belanja bahan, honor tim teknis, ATK, perjalanan, transport meeting)	29.520.000,00	29.474.100,00	99,84	100,00
		- PUPM Tahap Pengembangan	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	100,00
		- PUPM Tahap Pembinaan	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	100,00
		2 Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan	492.000.000,00	487.482.150,00	99,08	100,00
		Pendampingan Pertanian Keluarga Kabupaten Magelang	450.000.000,00	446.641.250,00	99,25	100,00
		Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah	42.000.000,00	40.840.900,00	97,24	100,00
		3 Pengembangan Penganeka-ragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	380.050.000,00	379.925.000,00	99,97	100,00
		- Operasional Kegiatan (belanja bahan, honor tim teknis, ATK, perjalanan, transport meeting)	50.050.000,00	49.925.000,00	99,75	100,00
		- Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahap Penumbuhan	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	100,00
		- Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahap Pengembangan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	100,00
		4 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan	17.955.000,00	17.655.000,00	98,33	100,00
		JUMLAH	1.099.525.000,00	1.094.536.250,00	99,55	100,00
2	DINSOS PPKB PPPA					
	6	DEKONSENTRASI				
		Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				
		1 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Instansi/kegiatan	Nama Program/Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi		
				Keuangan		Fisik
				Rp	%	%
		2 Pembinaan Pembangunan Keluarga di seluruh Tingkat Wilayah	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00
		3 Penggerakkan Stakeholder, Mitra Kerja, serta Perubahan Sikap dan Perilaku Masyarakat, Berdasarkan Data dan Informasi yang Berbasis IT dalam Program KKBP	17.085.000,00	0,00	0,00	0,00
		4 Kesertaan BerKB Melalui Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KBKR yang sesuai dengan Standar Pelayanan	143.170.000,00	143.170.000,00	100,00	55,00
		5 Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	21.995.000,00	21.745.000,00	98,86	100,00
		6 Peningkatan Promosi Pengasuhan 1000 HPK bagi Ibu Hamil dan Keluarga Baduta	40.863.400,00	40.725.000,00	99,66	100,00
		JUMLAH	230.233.400,00	205.640.000,00	89,32	61,50
3	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA					
	1	DEKONSENTRASI				
		Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas				
		1 Pelatihan Berbasis Kompetensi Nonboarding UPTD BLK (224 siswa)	564.394.000,00	560.861.807,00	99,37	100,00
		JUMLAH	564.394.000,00	560.861.807,00	99,37	100,00
	11	JUMLAH TOTAL	1.894.152.400,00	1.861.038.057,00	98,25	95,32

a. Dana APBN

Anggaran Pembangunan di Kabupaten Magelang yang berasal dari Dana APBN tahun 2020 adalah sebesar Rp472.765.643.835,00 dengan realisasi sebesar Rp,417.267.968.240.00 atau sebesar 88.26% dengan rincian sebagaimana dalam **Lampiran 5.55**.



b. Dana APBD Provinsi

Anggaran Pembangunan di Kabupaten Magelang yang berasal dari Dana APBD Provinsi tahun 2020 adalah sebesar Rp6.912.723.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.909.953.000,00 atau sebesar 99.96% dengan rincian sebagaimana dalam **Lampiran 5.56**.



BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI
NON KEUANGAN SKPD

1. Domisili Entitas

Pemerintah Kabupaten Magelang berdomisili di Jalan Soekarno Hatta Kota Mungkid berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36).

2. Perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah

Memenuhi amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengharuskan terjadi perubahan struktur perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Magelang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang berlaku mulai 6 Oktober 2016.

Tabel 6.1. Perubahan Struktur OPD

No.	SKPD Lama	SKPD baru (Perda 19 Tahun 2016)
1	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah Tipe A;
2	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD Tipe A;
3	Inspektorat	Inspektorat Tipe A;
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A
5	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Tipe A
6	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A
7	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C
8	Satpol PP	Satuan Polisi Pamong Prajadan Penanggulangan Kebakaran Tipe A
9	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A
10	Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe A
11	Badan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Tipe A
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A
13	Bapermaspuan & KB	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A
14	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan Tipe B
15	DISKOMINFO	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Tipe A
16	BPMPTT	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A
17	Kantor Perpustakaan dan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A
18	Dinas Peternakan dan Perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan Tipe A
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A
20	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Kehutanan	Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A
21	Dinas Perdagangan dan Pasar	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A
22	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe A



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No.	SKPD Lama	SKPD baru (Perda 19 Tahun 2016)
23	DPPKAD	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A
24	BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A
25	Kecamatan Salaman;	Kecamatan Salaman;
26	Kecamatan Borobudur;	Kecamatan Borobudur;
27	Kecamatan Ngluwar;	Kecamatan Ngluwar;
28	Kecamatan Salam;	Kecamatan Salam;
29	Kecamatan Srumbung;	Kecamatan Srumbung;
30	Kecamatan Dukun;	Kecamatan Dukun;
31	Kecamatan Sawangan;	Kecamatan Sawangan;
32	Kecamatan Muntilan;	Kecamatan Muntilan;
33	Kecamatan Mungkid;	Kecamatan Mungkid;
34	Kecamatan Mertoyudan;	Kecamatan Mertoyudan;
35	Kecamatan Tempuran;	Kecamatan Tempuran;
36	Kecamatan Kajoran;	Kecamatan Kajoran;
37	Kecamatan Kaliangkrik;	Kecamatan Kaliangkrik;
38	Kecamatan Bandongan;	Kecamatan Bandongan;
39	Kecamatan Candimulyo;	Kecamatan Candimulyo;
40	Kecamatan Pakis;	Kecamatan Pakis;
41	Kecamatan Ngablak;	Kecamatan Ngablak;
42	Kecamatan Grabag;	Kecamatan Grabag;
43	Kecamatan Tegalrejo;	Kecamatan Tegalrejo;
44	Kecamatan Secang;	Kecamatan Secang; dan
45	Kecamatan Windusari.	Kecamatan Windusari.

Sementara SKPD yang tidak berubah adalah sebanyak 12 SKPD, yaitu:

- a. Kantor Kesbangpol;
- b. RSUD Muntilan;
- c. Kelurahan Muntilan;
- d. Kelurahan Mendut;
- e. Kelurahan Sawitan;
- f. Kelurahan Sumberrejo;
- g. Kelurahan Secang;
- h. BPPKP;
- i. BPBD;
- j. DPRD;
- k. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (KDH dan WKDH); dan
- l. PPKD.

Beberapa hal terkait perubahan perangkat daerah tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong



Praja, tetap melaksanakan tugas sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

- b. Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub Urusan Bencana yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang, tetap melaksanakan tugas.
- d. Sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya UPT yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan berbentuk rumah sakit daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. UPT yang sudah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT yang baru.
- g. Pada tahun 2020 diterbitkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang yang membagi Sekretariat Daerah menjadi 9 (sembilan) bagian, yaitu:
 1. Bagian Pemerintahan
 2. Bagian Hukum
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat
 4. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 5. Bagian Administrasi Pembangunan
 6. Bagian Pengadaan Barang Jasa
 7. Bagian Umum
 8. Bagian Organisasi



9. Bagian protokol dan Komunikasi Pimpinan

3. Permasalahan Batas Wilayah Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang

Pada Tahun 2001 Pemerintah Kota Magelang berencana mengadakan kegiatan penegasan batas dengan Kabupaten Magelang, namun kegiatan tersebut baru terlaksana pada Tahun 2007 berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Sebagai tindak lanjut dari rencana penegasan tersebut pada tanggal 23 Januari 2007 dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) antara Bupati Magelang dengan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2007 dan Nomor 01/PERJ/I/2007 tentang Pelaksanaan Penegasan Batas Daerah Antara Pemerintah Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang.

Kegiatan tersebut berhasil menegaskan batas antara kota Magelang dengan Kecamatan Bandongan, Kecamatan Secang dan Kecamatan Tegalrejo di Kabupaten Magelang dengan telah ditandatanganinya Berita Acara pada Tahun 2009. Sedangkan perbatasan antara Kota Magelang dan Kabupaten Magelang di sisi Selatan yang berbatasan dengan Kecamatan Mertoyudan yang meliputi sebagian dari 3 (tiga) desa yaitu Desa Bulurejo, Desa Banyurojo dan Desa Mertoyudan di Kabupaten Magelang dengan 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Jurangombo, Kelurahan Magersari dan Kelurahan Tidar di Kota Magelang belum dapat disepakati karena pihak Kota Magelang tidak bersedia menerima penggunaan dokumen berupa peta desa (menitplan) dari Desa Bulurejo, Desa Banyurojo dan Desa Mertoyudan yang telah dengan jelas menunjukkan batas kedua wilayah.

Pada tahun 2008 telah disepakati batas-batas antara Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang di sisi Utara, Barat dan Timur yang dituangkan dalam Berita Acara Pelacakan Batas Daerah antara Kabupaten Magelang dan Kota Magelang yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota Magelang. Dimana salah satu dokumen yang digunakan untuk penegasan batas di sisi Utara Barat dan Timur tersebut adalah peta desa dan buku C desa.

Sesuai dengan ketentuan dan Permendagri bahwa apabila terdapat permasalahan batas antara dua daerah dalam satu wilayah provinsi maka Gubernur memfasilitasi untuk penyelesaiannya. Berdasarkan hal tersebut Gubernur Jateng telah berkali-kali mengadakan pertemuan untuk mediasi penyelesaian permasalahan tersebut, namun tetap tidak dapat menghasilkan keputusan. Hasil mediasi oleh Gubernur tersebut kemudian disampaikan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat untuk dimintakan keputusan.

Pada tanggal 10 Pebruari 2016, Bupati Magelang beserta tim diundang oleh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (BAK) Kemendagri untuk bertemu dengan Walikota Magelang dan Tim. Hasil pertemuan diberikan 4 alternatif batas dan dimohon kepada masing-masing daerah untuk memilih salah satu dari keempat alternatif tersebut. Pemerintah Kabupaten Magelang telah memilih alternatif ketiga dengan catatan tambahan yang telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Pada tanggal 15 Juni 2020 telah ditandatangani Berita Acara Kesepakatan Penentuan Batas Wilayah Kabupaten Magelang dan Kota Magelang Nomor: 100/124/01.01/2020 dan Nomor:130/250/111. Berita Acara tersebut menyepakati



penentuan batas wilayah Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Secara umum penentuan batas wilayah Kabupaten Magelang dan Kota Magelang sudah ada kesesuaian dan tidak ada permasalahan.
2. Penentuan batas wilayah Kabupaten Magelang dan Kota Magelang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang Provinsi Jawa tengah.
3. Berita Acara mengikat kedua belah pihak sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan.



BAB VII

PENJELASAN REFOCUSING DAN REALOKASI ANGGARAN

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian nasional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Seiring perubahan dampak Covid-19 yang semakin meluas, diperlukan upaya penanganan bersama antara Pemerintah dan Pemda melalui realokasi dan refocusing anggaran belanja APBN dan APBD TA 2020 untuk penanganan pandemi dan dampak Covid-19. Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai pedoman yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional (SKB Mendagri dan Menkeu), dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (PMK No.35/2020). Hasil penyesuaian APBD tersebut dituangkan dalam Laporan Penyesuaian APBD (Laporan APBD) dan selanjutnya wajib disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Guna memastikan komitmen Pemda dalam pencegahan/penanganan Covid-19, maka sesuai ketentuan PMK No.35/PMK.07/2020 Pemda yang tidak memenuhi ketentuan Laporan APBD TA 2020 dapat dilakukan penundaan penyaluran sebagian DAU dan/atau DBH-nya.

Kabupaten Magelang melaksanakan 7 (tujuh) kali Pergeseran APBD, sedangkan untuk Refocusing APBD untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dilaksanakan pada Pergeseran ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat). Tahapan Pergeseran APBD tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

Tabel. 7.1 Tahapan Pergeseran APBD Tahun Anggaran 2020

No	Tahapan Revisi	Uraian	Poin Perubahan	Dasar Alasan Perubahan
1	2	3	4	5
1	Revisi ke I Perbup No.8 11 Pebruari 2020	Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang No 49 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Magelang TA 2020	Pendapatan / belanja tetap tidak ada penambahan / pengurangan	Penyesuaian Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 973/6643/Keuda Perihal Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah unsur TPP pertimbangan obyektif lainnya
2	Revisi ke II Perbup No 9 28 Pebruari 2020	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang No 49 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Magelang TA 2020	Pendapatan bertambah Rp15.032.000.000, menjadi Rp2.636.201.424.000, dan belanja bertambah sebesar Rp15.032.000.000,00 Rp2.729.002.048.600,00	Penyesuaian bantuan Gubernur, DAK Fisik Keselamatan jalan yg blm dianggarkan dan penyesuaian TPP ke rek pertimbangan obyektif lainnya
3	Revisi ke III Perbup No 16 6 April 2020	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang No 49 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Magelang TA 2020 (<i>Covid & Anulir Kenaikan Tpp</i>)	Pendapatan bertambah Rp15.032.000.000,00 menjadi Rp2.636.201.424.000, dan belanja bertambah sebesar Rp15.505.371.000,, Rp2.729.002.048.600	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang <i>Refocusing Kegiatan</i> dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/14089/SJ tanggal 17 Desember 2019
4	Revisi ke IV Perbup No 21 15 Mei 2020	Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang No 49 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten	Pendapatan berkurang (Rp417.313.758.002,00).menjadi Rp2.203.855.665.998,00dan belanja berkurang sebesar	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang <i>Refocusing</i>



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Tahapan Revisi	Uraian	Poin Perubahan	Dasar Alasan Perubahan
1	2	3	4	5
		Magelang TA 2020 (Percepatan Refocusing),	(Rp416.840.387.002,00), menjadi Rp2.296.656.290.598,00	Kegiatan dan SKB Mendagri Menkeu 119/2813/SJ 177/KMK.07/2020
5	Revisi ke V Perbup No 28 29 Juli 2020	Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Magelang No 49 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Magelang TA 2020 (Bagi hasil pajak DAK Fisik Reguler dan Penugasan, Bok Gel III. Silpa Blud)	Pendapatan berkurang (Rp401.530.352.002,00).menjadi Rp2.219.639.071.998,00 dan belanja berkurang sebesar (Rp371.386.293.732,00), menjadi Rp2.342.110.383.868,00	Perpres 72 perubahan postur APBN Perubahan alokasi Bagi hasil pajak, DAK Fisik Reguler dan Penugasan Penganggaran SiLPA BLUD (Hasil Pemeriksaan BPK TA 2019)
6	Revisi ke VI Perbup No 48 9 Nopember 2020	Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang No 40 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Magelang TA 2020 (Tambahan Hibah Pariwisata - Pen)	Pendapatan bertambah Rp7.657.600.000 menjadi Rp2.353.920.992.500, dan belanja bertambah sebesar Rp7.657.600.000, menjadi Rp2.565.544.190.159	Surat Menteri Keuangan Nomor S-244/MK.7/2020 Perihal Penetapan Pemberian Hibah Pariwisata TA 2020
7	Revisi ke VII Perbup No 54 21 Desember 2020	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang No 40 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Magelang TA 2020 (Bok Gel. V Insentif nakes)	Pendapatan bertambah Rp13.558.614.128,00, menjadi Rp2.359.822.006.628,00 dan belanja bertambah sebesar Rp13.558.614.128,00, menjadi Rp2.571.445.204.287,00	Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 28/KM.7/2020 Tanggal 18 Desember 2020 (BOK) Tambahan Gelombang V

Refocusing tersebut diatas digunakan untuk mendanai:

1. Belanja bidang kesehatan dan hal- hal lain terkait kesehatan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.
2. Penyediaan jaring pengaman sosial/ *social safety net*.
3. Penanganan dampak ekonomi.

Total anggaran refocusing dan realokasi belanja penanganan covid-19 adalah sebesar Rp217.898.953.363,00 dengan realisasi Rp138.885.938.616,00. Adapun realisasi realokasi belanja refocusing Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1. Bidang Kesehatan

Tabel 7.2 Realisasi Belanja Refocusing Bidang Kesehatan

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d)/(c)
I.	Dinas Kesehatan			
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			
1	Penyelenggaraan Surveilans Penyakit Menular dan Keracunan Makanan yang berpotensi KLB serta Penanganan Krisis Kesehatan	954,780,000	664,026,179	69.5%
2	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (DAK Penugasan)	105,000,000	61,600,000	58.7%
3	BOK Puskesmas	1,335,802,460	1,142,459,184	85.5%
4	BOK UMKM Kabupaten	12,574,186,128	12,535,820,225	99.7%
	Program Pelayanan Kesehatan			
1	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan	2,353,380,000	2,065,966,200	87.8%
2	Pelayanan Rumah Sakit Merah Putih	14,037,048,000	13,005,265,277	92.6%
3	Pelayanan Rumah Sakit Candi Umbul	1,495,902,800	1,082,594,273	72.4%



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan
4	Pelayanan Rumah Sakit Bukit Menoreh	1,536,327,600	1,249,987,509	81,4%
5	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas	15,700,784,000	12,923,811,993	82.3%
	Program Sumber Daya Kesehatan			
1	Pengadaan Perbekalan Kesehatan (BMHP) dan Reagensia	1,800,967,000	1,641,232,909	91.1%
2	Pengadaan Alat Kesehatan	740,000,000	661,818,228	89.4%
3	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	786,344,000	763,044,980	97.0%
	Program Kesehatan Masyarakat			
1	Pelayanan Kesehatan Lingkungan	122,500,000	120,500,000	98.4%
2	Upaya Promosi Kesehatan	111,480,000	106,302,500	95.4%
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah			
1	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	217,863,000	209,936,380	96.4%
II.	RSUD Muntilan			
	Program Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit			
1	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit (Belanja BLUD)	30,747,237,296	27,863,035,699	90.6%
III.	PPKD			
	Belanja Tidak Terduga			
1	Belanja Bidang Kesehatan dan Hal-hal Lain Terkait Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19	51,415,703,279	14.025.737.180	36.6%
TOTAL		136,035,305,563	90.123.138.716	66.2%

2. Penanganan Dampak Ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial.

Tabel 7.3 Realisasi Belanja Refocusing Penanganan Dampak Ekonomi dan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d)/(c)
	PPKD			
	Penanganan Dampak Ekonomi	31,221,647,800	0,00	0.0%
1	Penanganan Dampak Ekonomi	31,221,647,800	0,00	0.0%
	Penyediaan <i>social safety net</i> jaring pengaman sosial	50,642,000,000	48.762.800.000	96.3 %
1	Penyediaan Jaring Pengaman Sosial	50,642,000,000	48.762.800.000	96.3 %
TOTAL		81,863,647,800	48.762.800.000	59.6 %

Akun-akun belanja yang terkait dengan refocusing dan realokasi belanja penanganan covid-19 beserta realisasinya adalah sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 7.4 Akun Belanja Terkait Refocusing dan Realisasi

Rekening Belanja	APBD Penetapan (Rp)	Anggaran Setelah Refocusing (Rp)	Tambahan Refocusing (Rp)	Realisasi Refocusing (Rp)
Honorarium PNS	106,815,000.00	242,939,705.00	136,124,705.00	49,400,000.00
Belanja Bahan Pakai Habis	9,388,315,536.00	12,775,261,436.00	4,801,434,560.00	4,238,012,777.00
Belanja Bahan Material	13,216,250,500.00	17,758,997,085.00	4,542,746,585.00	4,126,728,745.00
Belanja Jasa Kantor	11,425,219,800.00	25,319,830,928.00	14,121,191,128.00	14,004,931,565.00
Belanja Premi asuransi	62,304,000.00	76,628,000.00	14,324,000.00	0,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	154,938,750.00	170,338,750.00	15,400,000.00	0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	300,307,070.00	11,929,190.00	179,249,920.00	174,868,980.00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Tempat	0,00	3,240,000.00	3,240,000.00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman	749,161,500.00	1,273,252,180.00	543,368,680.00	516,250,558.00
Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	390,990,000.00	517,868,300.00	220,288,300.00	207,150,000.00
Belanja Pemeliharaan	1,173,300,000.00	1,673,300,000.00	500,000,000.00	169,543,000.00
Belanja Jasa Konsultansi	30,000,000.00	80,000,000.00	50,000,000.00	0,00
Belanja Kursus, Pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0,00	50,000,000.00	50,000,000.00	49,350,000.00
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	11,000,000.00	(2,000,000.00)	9,000,000.00	8,850,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	103,255,000.00	2,133,255,000.00	2,030,000,000.00	1,982,987,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	2,760,686,510.00	2,760,686,510.00	2,236,771,636.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	490,033,000.00	690,033,000.00	200,000,000.00	196,900,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	1,998,330,000.00	5,392,856,600.00	3,394,526,600.00	3,016,718,028.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	283,570,000.00	4,883,570,000.00	4,600,000,000.00	4,332,091,455.00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	60,714,024,600.00	106,430,643,896.00	45,716,619,296.00	40,283,204,201.00
Belanja Modal BLUD	3,523,151,100.00	4,254,553,100.00	731,402,000.00	503,643,491.00
Belanja Tak Terduga	5,000,000,000.00	138,279,351,079.00	133,279,351,079.00	62,788,537,180.00
JUMLAH	109,120,965,856.00	324,776,534,759.00	217,898,953,363.00	138,885,938,616.00



BAB VIII

PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020.

 **BUPATI MAGELANG**

ZAENAL ARIFIN, S.IP